

LAPORAN KINERJA

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

2025



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Obat NPPZA) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, meliputi penetapan sasaran, pencapaian kinerja, serta realisasi penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025.

Pada tahun pelaksanaan 2025, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA melaporkan capaian kinerja, sasaran strategis, program, dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Evaluasi pencapaian dilakukan dengan mengacu pada indikator output dan outcome yang telah ditetapkan sebagai upaya memperkuat efektivitas sistem pengawasan Obat NPPZA di Indonesia.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA sepanjang tahun 2025, serta menjadi wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan atas penyelenggaraan pengawasan yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, masukan, serta umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kualitas kinerja, pengembangan inovasi, serta penguatan efektivitas pengawasan BPOM di masa mendatang, khususnya di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dalam mendukung terwujudnya pengawasan obat yang berstandar internasional.

Jakarta, Februari 2026

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,



dr. William Adi Teja, MD., BMed., MMed.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
HIGHLIGHTS KINERJA.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2.1. Tugas Dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Uraian Singkat Renstra.....	9
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	12
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	13
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	19
2.5 Metode Pengukuran.....	24
2.5.1. Metode Pengukuran Indikator Kinerja.....	24
2.5.2. Kriteria Pencapaian Indikator.....	52
2.5.3. Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO).....	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	54
3.1 Capaian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA.....	54
3.1.1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO).....	60
3.1.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	63
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	132
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	147
3.3.1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja.....	147
3.3.2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja.....	147
3.3.3 Penyesuaian Perencanaan Kinerja untuk Periode Berikutnya.....	148
3.4 Realisasi Anggaran.....	150

3.4.1 Realisasi Anggaran yang Telah Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.....	152
3.4.2 Realisasi anggaran per Sasaran Program.....	156
3.4.3 Evaluasi dan Analisis Anggaran Berisi Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran per Program/ Kegiatan pada Tahun yang Bersangkutan Baik yang Berasal dari DIPA Maupun Hibah dan Analisa Tingkat Pencapaiannya.....	156
3.4.4 Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran.....	157
BAB IV PENUTUP.....	159
4.1 Kesimpulan.....	159
4.2 Saran.....	160
LAMPIRAN.....	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.....	4
Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat NPPZA.....	4
Gambar 1.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat.....	5
Gambar 1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.....	5
Gambar 1.5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.....	6
Gambar 1.6 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.....	6
Gambar 3. 1 Diagram Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan - Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA 2025-2029.....	55
Gambar 3. 2 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Obat Aman Bermutu antar Komoditas.....	75
Gambar 3. 3 Grafik Perbandingan Persentase Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan antar Komoditas di BPOM.....	82
Gambar 3. 4 Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat tahun 2025.....	87
Gambar 3. 5 Persentase Apotek Yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Per Provinsi.....	94
Gambar 3. 6 Grafik Perbandingan antar Komoditas di BPOM.....	105
Gambar 3. 7 Grafik Perbandingan Capaian antar Komoditas di BPOM.....	108
Gambar 3. 8 Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Obat Dibandingkan dengan Komoditi Lain.....	111
Gambar 3. 9 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat.....	115
Gambar 3. 11 Nilai IKPA Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2025 dari Aplikasi Omspan.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja.....	10
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.....	12
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang Disusun Berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2025-2029.....	15
Tabel 2. 4 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang Disusun Berdasarkan Pemutakhiran Rancangan Renstra 2025-2029.....	18
Tabel 2. 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang Disusun Berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2025-2029.....	20
Tabel 2. 6 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang Disusun Berdasarkan Pemutakhiran Rancangan Renstra 2025-2029.....	22
Tabel 2. 7 Kriteria Evaluasi Kinerja dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target.	52
Tabel 2. 8 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO).....	52
Tabel 3. 1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA sepanjang Triwulan Tahun 2025.....	60
Tabel 3. 2 Pencapaian NKO berdasarkan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	61
Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2025, dibandingkan terhadap Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah.....	64
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan Deputi II, Deputi III, dan Deputi IV di Lingkungan BPOM.....	68
Tabel 3. 5 Capaian IKSP pada SP1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	72
Tabel 3. 6 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	74
Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi persentase obat aman bermutu antar komoditas.....	74
Tabel 3.8 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	76
Tabel 3. 9 Capaian IKSP Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tahun 2025.....	77
Tabel 3. 10 Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	77
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian IKK Kedeputian 1 dibandingkan Kedeputian Lain di BPOM tahun 2025.....	78

Tabel 3. 12 Capaian Persentase Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	81
Tabel 3. 13 Perbandingan realisasi Persentase Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan antar Komoditas di BPOM.....	81
Tabel 3. 14 Capaian Fasilitas Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	83
Tabel 3. 15 Perbandingan realisasi Persentase Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan antar Komoditas di BPOM.....	84
Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	84
Tabel 3. 17 Capaian Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	85
Tabel 3. 18 Perbandingan realisasi Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan antar komoditas.....	85
Tabel 3. 19 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	87
Tabel 3. 20 Capaian Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	90
Tabel 3. 21 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	91
Tabel 3. 22 Target Tahunan Indikator Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter tahun 2025-2029.....	93
Tabel 3. 23 Capaian Persentase Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	95
Tabel 3. 24 Pencapaian Capaian Persentase Sentra Uji Klinik dan Bioekivalensi yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	97
Tabel 3. 25 Capaian IKSP pada SP2 Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	98
Tabel 3. 26 Pencapaian Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah..	99
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Nilai Indeks antar Deputi.....	99
Tabel 3. 28 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	101
Tabel 3. 29 Capaian IKSP pada SP3. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan	

kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	102
Tabel 3. 30 Capaian Kinerja Persentase Pengawasan Hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai Standar per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra.....	104
Tabel 3. 31 Perbandingan antar Komoditas di BPOM.....	104
Tabel 3.32 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	106
Tabel 3. 33 Capaian Persentase Industri Farmasi yang Meningkatkan Level Maturitasnya Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	107
Tabel 3. 34 Perbandingan realisasi antar komoditas di BPOM.....	108
Tabel 3. 35 Capaian IKSP pada Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA yang Optimal.....	109
Tabel 3. 36 Indeks Pelayanan Publik Unit Teknis Kedeputian 1.....	110
Tabel 3. 37 Capaian Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	110
Tabel 3. 38 Perbandingan realisasi antar komoditas di BPOM.....	110
Tabel 3. 39 Capaian Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	116
Tabel 3. 40 Nilai Realisasi IKSP Indeks ZI Unit Teknis di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025.....	116
Tabel 3. 41 Pencapaian Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dibandingkan dengan target tahun Tahun 2025.....	117
Tabel 3. 42 Perbandingan realisasi antar komoditas di BPOM.....	117
Tabel 3. 43 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	118
Tabel 3. 44 Pencapaian Capaian IKSP Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025.....	119
Tabel 3. 45 Capaian IKSP Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025....	120
Tabel 3. 46 Capaian Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	120
Tabel 3. 47 Perbandingan capaian SAKIP Kedeputian 1 dibandingkan Kedeputian Lain di BPOM tahun 2025.....	121
Tabel 3. 48 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	122
Tabel 3. 49 Tabel Ukuran Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	123
Tabel 3. 50 Target dan Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2025 (Pagu setelah dikurangi blokir).....	125

Tabel 3. 51 Capaian Realisasi Output Unit di Kedeputian 1 Tahun 2025.....	126
Tabel 3. 52 Kategori Nilai Kinerja Anggaran.....	127
Tabel 3. 53 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	129
Tabel 3. 54 Pencapaian Capaian IKSP Nilai Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025.....	130
Tabel 3. 55 Perbandingan capaian manajemen resiko Kedeputian 1 dibandingkan Kedeputian Lain di BPOM tahun 2025.....	130
Tabel 3. 56 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025.....	131
Tabel 3. 57 Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV Tahun 2025.....	132
Tabel 3. 58 Penyesuaian Kinerja Sesuai Hasil Evaluasi Kinerja.....	148
Tabel 3. 59 perubahan anggaran pada setiap indikator kinerja.....	152
Tabel 3. 60 Perbandingan Realisasi Kinerja vs Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	153
Tabel 3. 61 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran vs Sasaran Program Tahun 2025.....	156
Tabel 3. 62 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025.....	157

Ringkasan Eksekutif



Pada Tahun 2025, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Obat NPPZA) melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari upaya strategis Badan POM dalam menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, sekaligus memperkuat tata kelola pengawasan obat secara berkelanjutan. Pelaksanaan kinerja Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025–2029, yang disusun selaras dengan RPJMN serta kebijakan pembangunan kesehatan nasional.

Sesuai Rencana Strategis 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025, terdapat 4 (empat) Sasaran Program (SP) meliputi:

- Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
- Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Capaian Sasaran Program

Terhadap ke-4 SP tersebut diturunkan menjadi 17 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian sebagai berikut:

- Tiga (3) IKU dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** ($\geq 110\%$)
- Tujuh (7) IKU dengan kategori **SANGAT BAIK** ($100\% < x \leq 110\%$)
- Lima (5) IKU dengan kategori **BAIK** ($90\% < x \leq 100\%$)
- Satu (1) IKU dengan kategori **CUKUP** ($60\% < x \leq 90\%$)

- e. Satu (1) IKU tidak dapat diukur karena terdapat blokir seluruh anggaran hingga akhir tahun.

Secara umum, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025 mencapai predikat BAIK **(91,92%)**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025 telah sesuai target yang ditetapkan.

Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan target kinerja, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan, adapun pagu anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025 adalah sebesar Rp 19.632.525.000 hingga akhir tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp 19.622.634.918 atau sebesar 99,95% dari total pagu tidak termasuk *Auto Adjustment* sebesar Rp 31.338.083.000. Dengan tingkat efisiensi dari kinerja anggaran sebesar 0,0559 dengan kategori **efisien**.

Kendala dan Langkah Antisipatif Tahun Mendatang

Dalam pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025 dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain kompleksitas regulasi, dinamika standar global, keterbatasan sumber daya, kondisi geografis dan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang beragam. Untuk menjawab tantangan tersebut pada tahun mendatang, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA akan memperkuat regulasi, optimalisasi pengawasan berbasis risiko dan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola dan inovasi manajemen kinerja, guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja organisasi dan kesiapan BPOM dalam menjalankan peran sebagai otoritas pengawasan obat yang efektif, kredibel, dan berdaya saing global.

HIGHLIGHTS KINERJA



Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator kinerja utama, tetapi juga menunjukkan berbagai capaian kinerja strategis lainnya yang mencerminkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi secara menyeluruh. Capaian tersebut terlihat dari penguatan integritas organisasi, inovasi dalam manajemen kinerja, serta pengakuan kinerja dari pihak eksternal.

1. Penguatan Integritas dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA secara konsisten melaksanakan berbagai inisiatif pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, serta internalisasi nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai.

Selain itu, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA aktif mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat. Hingga saat ini ke-5 unit di bawah kedeputian 1 telah berstatus WBK (4 unit) dan WBBM (1 unit).

2. Inovasi dalam Manajemen Kinerja

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan kinerja, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA mengembangkan berbagai inovasi manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Inovasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta mendorong pengambilan

keputusan berbasis data (*evidence based decision making*).

Pada tahun 2025, inovasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder, mendukung optimalisasi pemantauan capaian indikator kinerja, percepatan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, serta peningkatan sinergi antar unit kerja. Adapun inovasi yang telah dilaksanakan yaitu LENTERA. Program LENTERA merupakan akronim dari Layanan Edukasi dan Navigasi Terarah untuk Apotek, melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan fasilitasif seperti pelaksanaan bimbingan teknis, penyediaan materi edukasi digital, asistensi langsung, serta layanan konsultasi atau diseminasi informasi melalui kanal komunikasi yang mudah diakses. Pendekatan ini dipilih sebagai respons atas kebutuhan di lapangan, dimana apotek sebagai pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan yang terarah agar mampu menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program ini berkontribusi dalam mendukung sasaran program: meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Secara lebih spesifik, bertujuan untuk memperkuat kapasitas para pelaku UMKM yang menjadi stakeholder Badan POM di bidang distribusi obat yaitu apotek. Program LENTERA juga selaras dengan Program Prioritas Nasional Presiden tahun 2025, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” melalui inisiatif Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam kerangka pengembangan KDMP terdiri atas beberapa unit usaha, diantaranya terdapat UMKM Apotek Desa.

Melalui program LENTERA yang digagas, diharapkan kedua program dapat memiliki semangat yang sama dalam mendorong kemandirian berusaha serta penguatan peran UMKM dalam sistem kesehatan nasional terutama apotek. Dalam konteks ini, LENTERA dapat menjadi komponen pendukung yang strategis untuk memfasilitasi apotek yang tergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih agar siap beroperasi dan berdaya saing.

3. Capaian Strategis 2025: BPOM Raih Status WHO Listed Authority

Indonesia melalui BPOM mencapai tonggak strategis dengan ditetapkannya sebagai WHO Listed Authority (WLA) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk produk vaksin pada 21 Desember 2025. WLA merupakan suatu *framework* yang transparan dan berbasis bukti untuk menilai dan menetapkan *regulatory authorities* yang masuk ke

daftar negara yang memiliki kinerja regulatori obat *advance* untuk diakui secara global. Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang terdaftar sebagai WLA bersama dengan 40 otoritas dari 38 negara lainnya, yaitu Swiss, Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat, 30 negara anggota Uni Eropa, Inggris, Kanada, Jepang, dan Australia. Capaian ini menegaskan pengakuan global atas kapasitas dan kredibilitas sistem pengawasan obat nasional.

Dalam proses pencapaian WLA tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA berperan sebagai koordinator teknis penguatan sistem pengawasan vaksin melalui sinergi lintas unit terkait di lingkungan Badan POM. Dalam proses persiapan dan pelaksanaan evaluasinya melibatkan seluruh unit Kedeputian 1, seluruh unit Kesektamaan, Pusat-Pusat, Inspektorat Utama, dan UPT. Selain itu juga melibatkan K/L terkait, diantaranya adalah Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Penilaian WLA dilakukan tidak hanya dengan melihat ketersediaan peraturan dan regulasi yang dimiliki Indonesia namun juga untuk melihat pelaksanaan dan kinerja pengawasan produk vaksin.

Keberhasilan ini mencerminkan penguatan tata kelola regulatori nasional serta mendukung peningkatan kepercayaan internasional dan daya saing sektor farmasi Indonesia.

4. Asistensi Regulatori Obat Terpadu

Badan POM memiliki fungsi melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre market*) dan sesudah beredar (*post market*). Dalam rangka melakukan pengawasan Obat sebelum beredar maupun selama beredar, Badan POM harus melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran dan penggunaan obat yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, mutu, dan keamanan. Selain itu, Badan POM harus melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran dan penggunaan obat yang tidak tepat akibat promosi/iklan obat yang tidak obyektif, tidak lengkap dan menyesatkan. Masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan hak informasi yang jelas dan benar dalam iklan produk obat, terlebih di era digital saat ini dimana informasi dapat diperoleh dengan mudah.

Kegiatan intensifikasi asistensi regulatori terpadu merupakan kegiatan terpadu kedeputian I untuk merespons kebutuhan pelaku usaha terhadap asistensi regulatori

Obat dari Badan POM dan merupakan kegiatan koordinasi antara Badan POM dengan Pelaku Usaha di Bidang Farmasi untuk menyampaikan arahan kebijakan serta menyerap aspirasi, tantangan, dan harapan pelaku usaha. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan asistensi regulatori obat terpadu ini adalah:

- a. Mendukung produksi obat, bahan obat oleh Fasilitas Produksi sebagai langkah strategis pada kemandirian obat Nasional.
- b. Mengedepankan pelayanan publik prima melalui asistensi regulatori berupa desk registrasi, desk sertifikasi, desk CAPA, dan desk regulatori secara tatap muka dengan pelaku usaha untuk mempercepat tindak lanjut hasil proses evaluasi registrasi, inspeksi dan evaluasi iklan serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi NSPK.
- c. Meningkatkan kualitas pengawasan obat di lingkungan BPOM dalam hal ini Kedeputian Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan mengedepankan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan di bidang obat, yang disertai dengan penyerahan sertifikat (CPOB, CDOB) dan persetujuan izin edar kepada pelaku usaha yang telah dievaluasi sebelumnya dan memenuhi persyaratan.

5. Penyebaran Informasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS)

Badan POM sebagai instansi yang diamanatkan untuk melaksanakan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik yang beredar, diamanatkan juga untuk menjalankan fungsi penyebarluasan informasi tentang bahaya merokok kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi dalam bentuk KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik bagi kesehatan dan bagaimana strategi industri dalam mempromosikan produknya.

Badan POM terus berinovasi terhadap metode KIE yang dilakukan, salah satunya yaitu melalui aplikasi *game* edukasi. Pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi *game* edukasi bahaya merokok berbasis android dengan nama RIKO - Game Edukasi Anti Rokok sudah diperkenalkan sejak tahun 2021. Aplikasi yang sudah dapat diunduh melalui laman google play store ini diharapkan dapat menjadi metode pembelajaran baru yang menarik dan menyenangkan serta mudah diakses dan digunakan oleh siapapun dan dimanapun.

Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) pada tanggal 31 Mei, maka diselenggarakan kegiatan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat dalam bentuk Lomba Game Edukasi Bahaya Merokok bagi Pelajar SMA/SMK/Sederajat di wilayah Jakarta. Kegiatan Penyebaran Informasi yang dilaksanakan tanggal 14 Mei 2025 tersebut mengusung tema “Lindungi Generasi Sehat, Masa Depan Bangsa dari Bahaya Produk Tembakau demi Indonesia Emas 2045”. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu meningkatkan pemahaman generasi muda terkait bahaya merokok bagi kesehatan, memotivasi para generasi muda untuk menjadi “*agent of change*” dalam mensosialisasikan bahaya merokok bagi kesehatan di lingkungannya, serta mendorong generasi muda berpartisipasi aktif dalam pengendalian produk tembakau di Indonesia.

6. Pelaksanaan Puncak *World Antimicrobial Awareness Week* : Aksi Kendalikan Resistensi Antimikroba

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sukses menggelar puncak acara WAAW (*World Antimicrobial Awareness Week*) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada hari Minggu tanggal 30 November 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu komitmen BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan Strategi Nasional (STRANAS) Pengendalian Resistensi Antimikroba Sektor Kesehatan 2025 – 2029 sebagai program strategi pemerintah untuk mengurangi dan memperlambat penyebaran AMR serta mengurangi angka mortalitas dan morbiditas akibat infeksi Resistensi Antimikroba. Resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan kondisi ketika bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan seiring waktu sehingga tidak lagi merespons obat-obatan. Akibatnya, infeksi menjadi lebih sulit diobati dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, keparahan, hingga kematian.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya Resistensi Antimikroba atau AMR kepada masyarakat, BPOM berpartisipasi dalam kampanye global yang dicanangkan oleh WHO yaitu Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba atau yang dikenal sebagai WAAW (*World Antimicrobial Awareness Week*). Kampanye ini diperingati setiap tanggal 18 – 24 November setiap tahun. Oleh karena itu, BPOM menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka peringatan WAAW 2025, mulai dari kegiatan Pre – Event hingga puncak acaranya di tanggal 30 November 2025. Rangkaian kegiatan tersebut bertemakan “Act Now: Protect Our Present, Secure Our Future,

Saatnya AKSI (Awasi peredaran obat, Kendalikan resistensi, Sinergi digital, Indonesia terlindungi)” yang bertujuan menyampaikan pesan kesadaran tentang produk medis substandar dan palsu, membeli antibiotik dengan resep dokter di fasyankes.

Acara WAAW 2025 ini, BPOM menghadirkan berbagai pihak yang berperan penting dalam pengendalian AMR antara lain kementerian / lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Mitra Pembangunan seperti WHO, FAO, Fleming Fund, pelaku usaha, asosiasi / organisasi profesi, Unit Pusat Badan POM serta UPT Badan POM seluruh Indonesia, influencer dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia.

Melalui WAAW 2025, BPOM mengajak seluruh pihak untuk memahami urgensi resistensi antimikroba, mengambil peran nyata dalam pencegahannya, serta memanfaatkan teknologi digital untuk edukasi dan pengawasan obat yang lebih efektif. Dengan kepatuhan terhadap regulasi dan sinergi lintas sektor, upaya pengendalian AMR diharapkan semakin kuat demi melindungi kesehatan masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Isu Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika global di bidang kesehatan dan farmasi terjadi semakin kompleks, ditandai dengan percepatan inovasi produk obat, peningkatan peredaran obat lintas negara, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan kesehatan, menuntut penguatan peran otoritas pengawasan obat yang adaptif dan kredibel.

Di sisi lain, tantangan nasional berupa disparitas akses dan mutu obat, potensi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, serta risiko penggunaan obat yang tidak rasional, menegaskan pentingnya sistem pengawasan obat yang efektif, konsisten, dan berbasis risiko. Kondisi tersebut menempatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada posisi strategis dalam memastikan bahwa setiap obat yang beredar memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu demi perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA menjadi krusial sebagai pengampu fungsi pengawasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Organisasi ini dibentuk untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan melalui penetapan standar, pengendalian produksi dan distribusi, serta penguatan tata kelola pengawasan obat secara nasional. Selain itu, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA berperan dalam memperkuat kapasitas regulatori Indonesia agar sejajar dengan standar internasional, termasuk mendukung pengakuan global terhadap sistem pengawasan obat nasional. Dengan peran tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA diharapkan mampu menjawab tantangan strategis pengawasan obat sekaligus mendorong terwujudnya sistem perlindungan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk untuk melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Tugas

utama BPOM adalah memastikan bahwa produk tersebut aman, berkhasiat, dan bermutu, sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Sesuai dengan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang didukung oleh penguatan kelembagaan. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2.1. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Sedangkan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA adalah melakukan:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

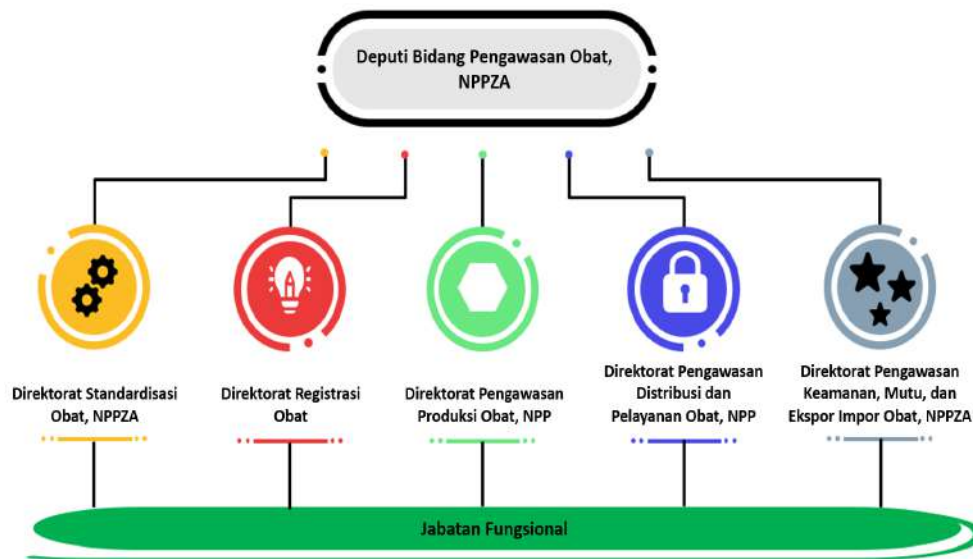
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA:

1. Pengawasan Obat sebelum beredar di masyarakat (*pre-market*) yang mencakup perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, dan peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat selama beredar di masyarakat (*post-market*) yang mencakup pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan pengujian, pengawasan sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan obat di seluruh Indonesia serta pengawasan penandaan serta pelaksanaan farmakovigilans; dan
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat.

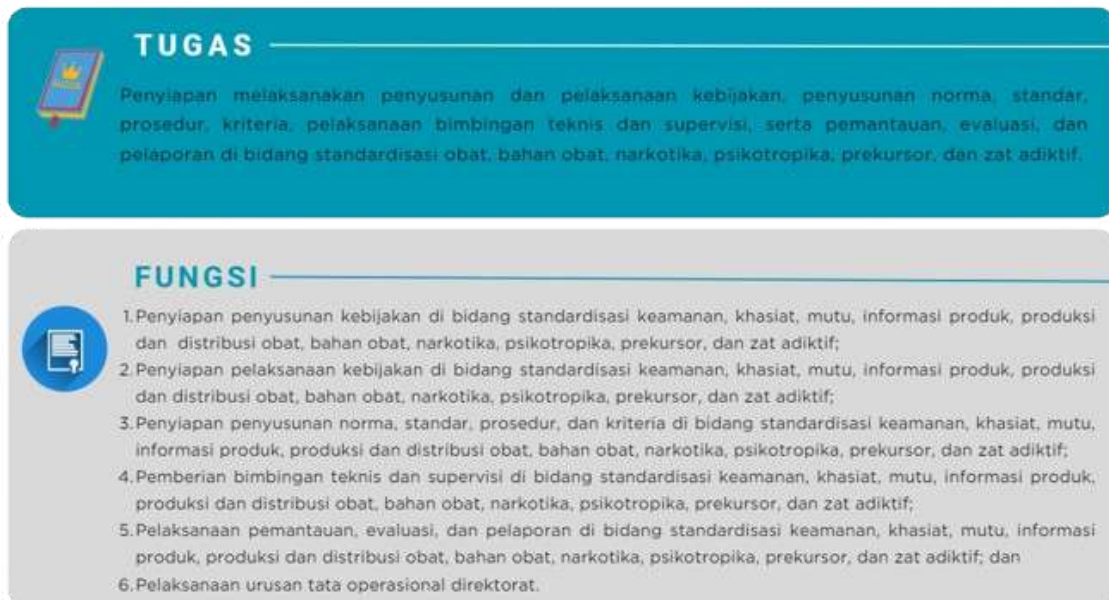
1.3 Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA.



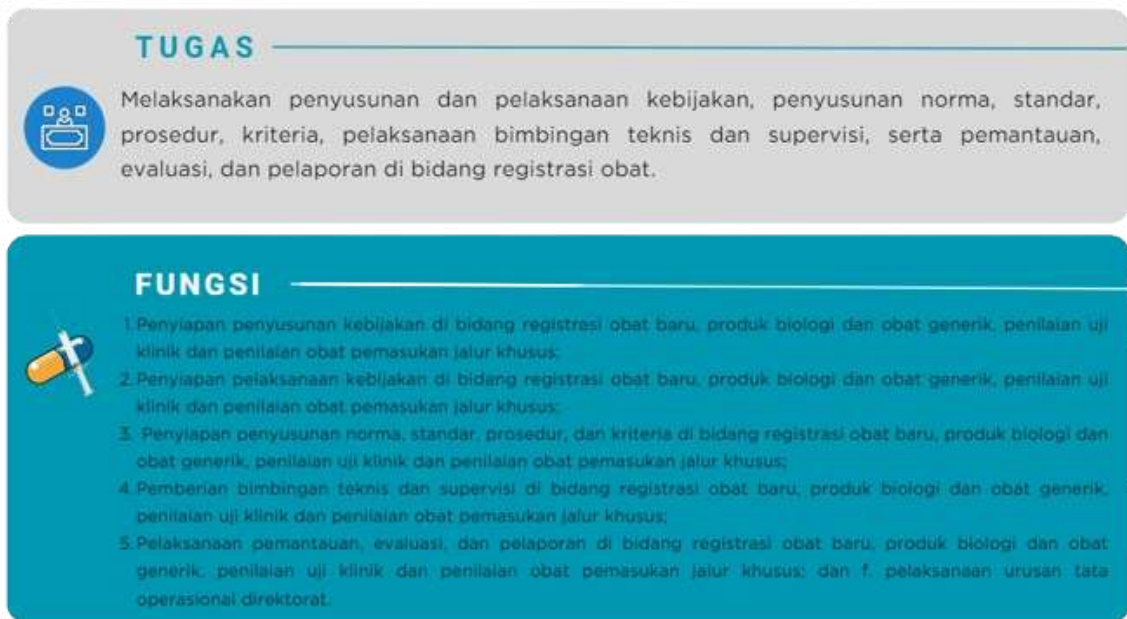
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA
Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 5 (lima) Direktorat, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Direktorat Standardisasi Obat NPPZA



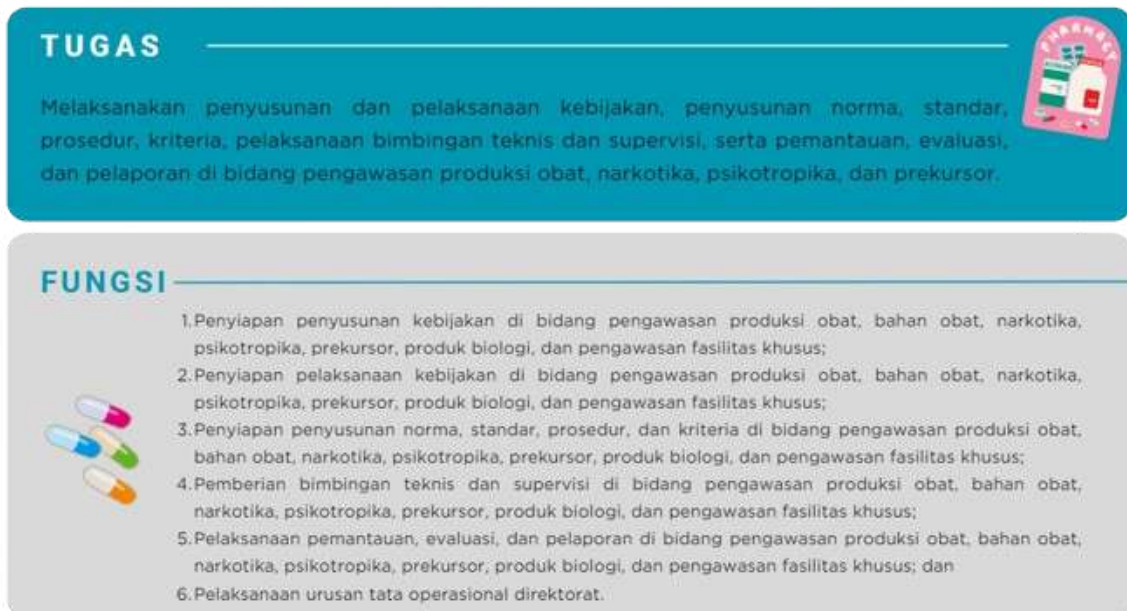
Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat NPPZA

2. Direktorat Registrasi Obat



Gambar 1.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat

3. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor



Gambar 1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

4. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor



TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

FUNGSI

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus; dan
6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.



Gambar 1.5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

5. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.



FUNGSI



1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif; dan
6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1.6 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

1.4 Isu Strategis

Tahun 2025 merupakan periode strategis bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA seiring dimulainya implementasi Rencana Strategis 2025–2029 serta meningkatnya tuntutan terhadap efektivitas dan kredibilitas sistem pengawasan obat nasional. Berikut ini dijabarkan isu-isu strategis yang menjadi tantangan di tahun 2025:

1. Penguatan Kapasitas Regulatori dan Pencapaian WHO Listed Authority (WLA)

Penguatan kapasitas regulatori menjadi isu strategis utama Tahun 2025 seiring proses asesmen BPOM menuju status *WHO Listed Authority* (WLA). Hal ini menuntut konsistensi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta kesiapan tata kelola dan sistem pengawasan obat yang memenuhi standar internasional, termasuk penguatan koordinasi lintas unit dalam pemenuhan indikator asesmen WLA.

2. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans

Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

3. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline

Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

4. Pengendalian Penggunaan Obat yang Rasional dan Pencegahan Resistensi Antimikroba

Masih ditemukannya praktik penggunaan obat yang tidak rasional, khususnya antibiotik, menjadi isu strategis yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Pengawasan terhadap penyerahan obat keras dan antibiotik tanpa resep memerlukan penguatan sinergi antara pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

5. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha

BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha.

6. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi

BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Dinamika perkembangan produk, kompleksitas rantai distribusi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat dan transparan menuntut sistem pengawasan yang adaptif, berbasis risiko, dan didukung tata kelola yang akuntabel. Dalam konteks tersebut, optimalisasi fungsi perencanaan, penganggaran, SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci untuk memastikan efektivitas pengawasan sekaligus mempercepat proses layanan melalui sistem elektronik, terintegrasi, dan mudah diakses, sehingga mampu meningkatkan kepastian hukum, efisiensi layanan, dan kepercayaan publik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Uraian Singkat Renstra
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.3 Perjanjian Kinerja (PK)
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- 2.5 Metode Pengukuran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan. Sebagai unit Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dengan mengacu dan selaras sepenuhnya pada Renstra Badan POM Tahun 2025-2029, guna menjamin keterpaduan arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja.

Dalam rangka menjaga relevansi dan akuntabilitas perencanaan, Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Surat Keputusan Nomor HK.02.02.3.12.25.17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025. Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selanjutnya, sebagai bentuk penjabaran operasional dari visi dan misi Badan POM, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA menetapkan sasaran program dan indikator kinerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja Deputy. Perumusan sasaran program dan indikator kinerja tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara arah kebijakan strategis Badan POM dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat NPPZA, sekaligus mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Badan POM dengan sasaran program dan indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	1) Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1) Persentase Obat aman dan bermutu 2) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat 3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 4) Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan 5) Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan 6) Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan 7) Persentase Label Produk tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan 8) Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter 9) Persentase sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan
	2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	2) Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	10) Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar 11) Persentase industri farmasi yang meningkat Level maturitasnya
	3) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan	3) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan	12) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
	Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	
	4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	4) Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	13) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat 14) Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 15) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 16) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 17) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Badan POM sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif merumuskan tujuan strategis sebagai arah pencapaian kinerja jangka menengah. Tujuan strategis tersebut menjadi dasar dalam penetapan sasaran program, indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA. Adapun tujuan strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA untuk periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan, Efektif, dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran sasaran dan program dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025-2029 ke dalam target kinerja tahunan yang akan dicapai pada Tahun 2025. RKT Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan dan pengendalian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dalam mendukung pencapaian tujuan strategis dan visi misi Badan POM.

RKT Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Nomor HK.02.02.3.09.24.13 tanggal 19 September 2024 tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

RKT Tahun 2025 menetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran program sebagai komitmen kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA. Target tersebut difokuskan pada peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan *regulatory assistance* dan kemandirian industri, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Rincian sasaran program, indikator kinerja, dan target kinerja Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang obat	1) Persentase Obat yang aman dan bermutu	90%
		2) Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	88,05
		3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84,00%
		4) Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77%
		5) Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	78,5%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan yang Aman dan Bermutu	6) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	87,5
3.	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Obat	7) Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75%
		8) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52%
4.	Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	9) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,69
5.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	10) Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	93,38
		11) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	82,89
		12) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	93,06
		13) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,7

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Wujud nyata komitmen Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.01.25.23 tentang Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Tahun 2025, dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja mengacu pada:

1. Alokasi anggaran pada DIPA tahun 2025
2. Informasi kinerja baik Sasaran, Indikator, Target, dan Cascading Kinerja sebagaimana Rancangan Renstra BPOM 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Periode Renstra 2025-2029, kertas kerja yang digunakan adalah kertas kerja rancangan Renstra yang digunakan sebagai dasar penyusunan PK dan RAPK 2025.

Dibandingkan dengan RKT Tahun 2025 terdapat perubahan karena menyesuaikan rancangan Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perubahan target indikator “Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor” dari 84,00% menjadi 30%.
2. Penambahan indikator “Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan” dengan target 79%.
3. Penambahan indikator “Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan” dengan target 75%.
4. Penambahan indikator “Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter” dengan target 4,9%.
5. Perubahan target indikator “Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu” dari 87,5 menjadi 90,6.
6. Perubahan target indikator “Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat” dari 4,69 menjadi 4,68.
7. Perubahan target indikator “Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif” dari 93,38 menjadi 92,9.
8. Perubahan target indikator “Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif” dari 82,89 menjadi 81,47.
9. Perubahan target indikator “Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif” dari 93,06 menjadi 5.

10. Perubahan target indikator “Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif” dari 3,7 menjadi 2,97.

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2025 ditetapkan pada 11 Februari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang Disusun Berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi Pengukuran
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1) Persentase Obat yang aman dan bermutu	90%	Bulanan
	2) Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	88,05	Tahunan
	3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	30%	Tahunan
	4) Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77%	Bulanan
	5) Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	78,5%	Bulanan
	6) Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	79%	Bulanan
	7) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	75%	Bulanan
	8) Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	4,9%	Triwulanan
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	9) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90,6	Tahunan
Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	10) Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75%	Bulanan
	11) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52%	Tahunan
Layanan Publik BPOM yang Prima	12) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,68	Tahunan
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	13) Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	92,9	Tahunan
	14) Nilai AKIP Deputy 1	81,47	Tahunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi Pengukuran
	15) Nilai Kinerja Anggaran Deputi 1	5	Tahunan
	16) Indeks Manajemen Risiko Deputi 1	2,97	Tahunan

Pagu awal tahun 2025 sebesar Rp 50.358.861.000 dengan sumber dana RM sebesar Rp36.752.204.000 dan PNBPN sebesar Rp 13.606.657.000, jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp25.837.021.000 dengan rincian Belanja Barang Rp 25.442.021.000, dan Belanja Modal sebesar Rp 395.000.000.

Adanya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 13.995.319.000. Total pemotongan anggaran sebesar Rp 36.386.367.000 dengan rincian Belanja Barang Rp 36.363.542.000 dan belanja modal Rp 22.825.000.

Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA memiliki PAGU awal tahun 2025 sebesar Rp50.358.861.000 untuk pelaksanaan 6 kegiatan, yaitu:

Kegiatan	Pagu
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 2.862.455.000,-
2. Standardisasi Obat NPPZA	Rp 7.217.562.000,-
3. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	Rp 6.887.731.000,-
4. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, NPPZA	Rp 11.315.272.000,-
5. Pengawasan Produksi Obat NPP	Rp 9.420.920.000,-
6. Registrasi Obat	Rp 12.654.921.000,-

B. Revisi Perjanjian Kinerja (PK)

Proses pemutakhiran Renstra 2025-2029 mengakibatkan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

sesuai, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM, perlu dilakukan revisi terhadap dokumen PK dan RAPK tahun 2025.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, dilakukan revisi dokumen PK dan RAPK untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2025-2029. Revisi PK dan RAPK 2025 mengacu pada:

1. Alokasi anggaran pada DIPA Harian tahun 2025
2. Informasi kinerja baik Sasaran, Indikator, Target, dan Cascading Kinerja sebagaimana Rancangan Renstra BPOM 2025-2029 yang pada saat itu dalam proses pemutakhiran.

Kertas kerja yang digunakan adalah kertas kerja Renstra yang digunakan sebagai dasar penyusunan PK dan RAPK 2025.

Dibandingkan dengan PK dan RAPK Tahun 2025 yang sebelumnya, terdapat perubahan menyesuaikan pemutakhiran rancangan Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perubahan indikator "Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dengan target 88,05" menjadi "Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dengan target 82,9". Perubahan indikator ini sama dengan perubahan untuk Kedeputian 2 dan 3 dan telah sesuai dengan rancangan Renstra Deputy I.
2. Perubahan pengukuran "persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter", yaitu menghapus target pada bulan ke-9 karena pengukuran indikator ini akan diukur pada akhir tahun karena terdapat perubahan pengukuran indikator dari per TW menjadi per tahun.
3. Penambahan indikator "Persentase sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan" dengan pengukuran target per TW, merupakan indikator tambahan dari Direktorat Registrasi Obat dan telah sesuai dengan rancangan Renstra Deputy I.
4. Perubahan Sasaran Program untuk indikator "Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat" dari "Layanan Publik BPOM yang Prima" menjadi "Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" yang sejalan dengan Sasaran Strategis Renstra Badan POM.

Revisi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA 2025 ditetapkan pada 20 Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang Disusun Berdasarkan Pemutakhiran Rancangan Renstra 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi Pengukuran
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1) Persentase Obat yang aman dan bermutu	90%	Bulanan
	2) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	82,9	Tahunan
	3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	30%	Tahunan
	4) Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77%	Bulanan
	5) Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	78,5%	Bulanan
	6) Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	79%	Bulanan
	7) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	75%	Bulanan
	8) Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	4,9%	Tahunan
	9) Persentase Sentra Uji Klinik dan Bioekivalensi yang Memenuhi Ketentuan	80%	Triwulanan
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90,6	Tahunan
Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1) Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75%	Bulanan
	2) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52%	Tahunan
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	1) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,68	Tahunan
	2) Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	92,9	Tahunan
	3) Nilai AKIP Deputy 1	81,47	Tahunan
	4) Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1	5	Tahunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi Pengukuran
	5) Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	2,97	Tahunan

Pada bulan Agustus 2025 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan WLA sebesar Rp 443.414.000,- sehingga pada revisi PK 2025, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA memiliki PAGU tahun 2025 sebesar Rp. 50.802.275.000,- untuk pelaksanaan 6 kegiatan, yaitu:

Kegiatan	Pagu
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 3.232.529.000,-
2. Standardisasi Obat NPPZA	Rp 7.596.133.000,-
3. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	Rp 6.692.731.000,-
4. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, NPPZA	Rp 11.315.272.000,-
5. Pengawasan Produksi Obat NPP	Rp 9.310.689.000,-
6. Registrasi Obat	Rp 12.654.921.000,-

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung.

A. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Awal

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Awal Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2025 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang Disusun Berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	11,268,195,000
2	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat												88,05	4.071.170.000
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor												30%	2.175.000.000
4	Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	4.605.876.000
5	Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	78,5 %	78,5%	78,5 %	78,5 %	78,5%	78,5 %	78,5 %	78,5 %	78,5 %	78,5%	78,5%	78,5%	1.983.071.000
6	Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	157.547.000
7	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	833.687.000
8	Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter			4,9			4,9			4,9			4,9	325.000.000

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
9	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu												90,6	2.500.000.000
10	Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar			75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	3.419.326.000
11	Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya												52%	279.700.000
12	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat												4,68	10.417.571.000
13	Nilai Pembangunan ZI Deputy 1												92,9	1.244.008.000
14	Nilai AKIP Deputy 1												81,47	2.380.428.000
15	Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1												5	3.930.271.000
16	Indeks Manajemen Risiko Deputy 1												2,97	683.133.000
TOTAL														Rp 50.358.861.000

B. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Revisi RAPK Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2025 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang Disusun Berdasarkan Pemutakhiran Rancangan Renstra 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	11,268,195,000
2	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat												82,9	4.556.723.000
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor												30%	1.980.000.000
4	Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	4.605.876.000
5	Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	78,5 %	78,5%	78,5%	78,5 %	78,5 %	78,5 %	78,5%	78,5 %	78,5%	78,5 %	78,5%	78,5%	1.921.419.000
6	Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	170.472.000
7	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	807.387.000
8	Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter			49			49						49	414.300.000

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
9	Persentase Sentra Uji Klinik dan Bioekivalensi yang Memenuhi Ketentuan									80			80	0
10	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu												90,6	2.500.000.000
11	Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar			75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	3.084.510.000
12	Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya												52	275.680.000
13	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat												4,68	10.556.631.000
14	Nilai Pembangunan ZI Deputy 1												92,9	1.344.164.200
15	Nilai AKIP Deputy 1												81,47	2.511.016.200
16	Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1												5	4.203.850.000
17	Indeks Manajemen Risiko Deputy 1												2,97	602.051.600
TOTAL														Rp 50.802.275.000

2.5 Metode Pengukuran

2.5.1. Metode Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diukur berdasarkan Manual IKU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, berikut ini adalah cara pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program	1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau kondisi patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi pada manusia. 2. Kriteria Obat Aman dan Bermutu mencakup: 1) Memiliki NIE yang sah dan berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian 3. Sampel dihitung berdasarkan satuan bets. 4. Metode perhitungan persentase obat aman dan bermutu berdasarkan perbandingan antara sampel obat yang memenuhi kriteria aman dan bermutu sebagaimana butir (b) terhadap keseluruhan sampel obat yang di sampling berdasarkan analisis risiko sesuai dengan Pedoman Sampling yang berlaku.
Cara Perhitungan dan Formula	1. Sampel dihitung berdasarkan satuan bets. 2. Jumlah sampel obat yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibagi seluruh populasi obat dikali 100.
Satuan Pengukuran	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	SIPT

Metode Cascading	(√) Lingkup Dipersempit () Adopsi Langsung () KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximal () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	(√) Bulanan () Semesteran () Triwulanan () Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12	
Penanggung Jawab Data	- Biro Perencanaan dan Keuangan; - Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor, dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atan (IKSS)	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu

b. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	1. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. 2. Kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian 3. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan Makanan 4. Jumlah kebijakan yang disampaikan untuk pengukuran berjumlah sama untuk seluruh Instansi Pemerintah yaitu sebanyak 3 kebijakan dengan kriteria: 1) Mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas 2) Telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.
---	---

Cara Perhitungan dan Formula	Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari: - Profil Kebijakan (10%), - Perencanaan Kebijakan (20%), - Implementasi Kebijakan (25%), dan - Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%), serta - Transparansi dan Partisipasi Publik (15%). Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN Kriteria yang digunakan adalah: 1) 91,00 – 100 : unggul 2) 80,00 – 90,99 : sangat baik 3) 65,00 – 79,99 : baik 4) 50,00 – 64,99 : cukup 5) ≤ 50,00 : kurang baik
Satuan Pengukuran	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	Hasil Evaluasi dari LAN
Metode Cascading	() Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12	
Penanggung Jawab Data	- Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan; - Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti Oleh Lintas Sektor

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui Unit Kerja Pusat kepada Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah penerbit perizinan berusaha fasilitas distribusi, fasilitas penyerahan, dan fasilitas peredaran obat secara daring yang diterbitkan oleh instansi selain Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Rekomendasi hasil pengawasan berupa: 1) Pencabutan izin/perizinan berusaha 2) Penutupan atau pemblokiran sementara Sistem Elektronik 3. Lintas Sektor meliputi Kementerian / Lembaga atau pemerintah daerah penerbit perizinan berusaha fasilitas distribusi, fasilitas penyerahan, dan fasilitas peredaran obat secara daring selain Badan Pengawas Obat dan Makanan 4. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari Lintas Sektor terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Unit Kerja Pusat.
Cara Perhitungan dan Formula	Menghitung total rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada tahun berjalan dibandingkan dengan total rekomendasi yang diterbitkan pada tahun berjalan. = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Total rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan x 100%
Satuan Pengukuran	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Metode Cascading	() Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	() Bulanan () Semesteran (√) Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12	

Penanggung Jawab Data	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

d. Persentase Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	1. Sarana Produksi adalah Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Pengelola Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sarana Pengolahan Sel Punca, dan Rumah Sakit). 2. Memenuhi Ketentuan adalah kesimpulan atas tindak lanjut hasil inspeksi berupa perintah perbaikan atau sanksi peringatan. 3. Dalam hal, hasil inspeksi sarana produksi menetapkan tindak lanjut lebih dari satu tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan jenis fasilitas/bentuk sediaan, maka Kesimpulan Memenuhi Ketentuan didasarkan atas masing-masing tindak lanjut yang diberikan kepada sarana produksi dimaksud.
Cara Perhitungan dan Formula	Jumlah tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi berupa tindakan perbaikan atau sanksi peringatan dibandingkan dengan jumlah tindak lanjut hasil inspeksi yang diterbitkan atas hasil inspeksi sarana produksi yang dilaksanakan.
Satuan Pengukuran	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SIPT
Metode Cascading	() Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	() Bulanan (√) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B03-B12	

Penanggung Jawab Data	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

e. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Fasilitas distribusi meliputi PBF, IFP, Apotek, Toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan fasilitas lain (<i>hypermarket, supermarket, dan minimarket</i>).
Cara Perhitungan dan Formula	Persentase fasilitas distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung berdasarkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dibandingkan terhadap jumlah sarana yang diperiksa.
Satuan Pengukuran	☒ Persentase ☐ Nilai
Sumber Data	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SMART BPOM dan BOC
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☒ Lingkup Dipersempit ☐ KPI Sendiri
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	☒ Lag Output ☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan	☒ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12	
Penanggung Jawab Data	Direktorat Pengawasan Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

f. Persentase Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotika tanpa resep dokter
Cara Perhitungan Dan Formula	1. "Persentase Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter" merupakan persentase selisih apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dibandingkan dengan jumlah apotek yang diperiksa menggunakan <i>tools</i> AMR pada tahun n terhadap tahun n-1. Cara Perhitungan: $\frac{(\%tahun_{n-1} - \%tahun_n)}{\%tahun_{n-1}} \times 100\%$ 2. Persentase apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter dihitung berdasarkan jumlah apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dibandingkan dengan jumlah apotek yang diperiksa menggunakan <i>tools</i> AMR % Apotek yang menyerahkan AB tanpa resep = $\left(\frac{\text{jumlah apotek yang menjual antibiotik tanpa resep dokter}}{\text{jumlah apotek yang diperiksa dengan tools AMR}} \times 100\% \right)$ 3. Jumlah apotek yang diperiksa menggunakan <i>tools</i> AMR merupakan data yang diperoleh dari pelaporan pemeriksaan oleh UPT melalui SIPT
Satuan Pengukuran	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	- UPT BPOM - Direktorat Pengawasan Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Metode Cascading	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi pada B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u>	

● Diisi pada B12	
Penanggung Jawab Data	Direktorat Pengawasan Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

g. Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	1. Persentase hasil pengawasan iklan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang memenuhi ketentuan, diukur berdasarkan jumlah laporan pengawasan iklan ONPP yang memenuhi ketentuan terhadap hasil pengawasan iklan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang dilaporkan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM melalui SIPT; yang dilaporkan masyarakat dan/atau merupakan hasil pengawasan yang diselesaikan oleh Pusat. 2. Iklan Obat adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat. 3. Iklan obat yang dipublikasi/diedarkan harus memenuhi kriteria lengkap, objektif, tidak menyesatkan dan sesuai persetujuan iklan obat/persetujuan NIE sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengawasan iklan obat.
Cara Perhitungan dan Formula	(Jumlah Laporan Pengawasan Iklan ONPP yang diverifikasi memenuhi ketentuan dibandingkan dengan jumlah laporan pengawasan iklan ONPP yang diselesaikan) x 100%
Satuan Pengukuran	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SMART BPOM dan BOC
Metode Cascading	() Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	Direktorat Pengawasan Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

h. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	1. Pengawasan Label dilaksanakan melalui penilaian/evaluasi terhadap pemenuhan ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. 2. Penilaian/evaluasi pemenuhan ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk informasi pada kemasan dilakukan terhadap sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). 3. Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan (MK) adalah jika pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan pada Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan peraturan teknisnya. 4. Yang dimaksud Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya. 5. Yang dimaksud Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya
---	---

	yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. Termasuk juga untuk Rokok Elektronik yang mengandung nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
Cara Perhitungan Dan Formula	1. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah “Label Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Label Kemasan” dan “Sampel Produk Tembakau yang diperiksa yang memenuhi ketentuan” terhadap keseluruhan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang disampling dan Sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai dengan pedoman yang berlaku. 2. Formula = (Jumlah Label Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Label Kemasan” dan “Sampel Produk Tembakau yang diperiksa yang memenuhi ketentuan) / (Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang disampling* dan Sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai dengan pedoman yang berlaku). 3. Diukur berdasarkan rekapitulasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai /Loka POM seluruh Indonesia
Satuan Pengukuran	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SIPT
Metode Cascading	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	Direktorat Pengawasan Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

i. Persentase Sentra Uji Klinik dan Bioekivalensi yang Memenuhi Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sentra uji klinik dan bioekivalensi yang diawasi adalah sentra yang dilakukan inspeksi dengan protokol yang sama atau berbeda. Memenuhi ketentuan adalah kesimpulan atas hasil inspeksi sentra uji klinik dan uji bioekivalensi yang tidak diberikan sanksi.
Cara Perhitungan dan Formula	Persentase sentra uji klinik dan uji bioekivalensi yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan jumlah sentra uji klinik dan uji bioekivalensi yang diinspeksi dalam (1) satu tahun berjalan.
Satuan Pengukuran	(☒) Persentase () Nilai
Sumber Data	Laporan Bulanan
Metode Cascading	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (☒) KPI Sendiri
Polarisasi	(☒) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(☒) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	() Bulanan (☒) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B03, B06, B09, B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B03, B06, B09, B12
Penanggung Jawab Data	Direktorat Registrasi Obat
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

j. Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat Yang Aman Dan Bermutu

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Sediaan farmasi dan Makanan yang aman dan bermutu. 2. Masyarakat adalah konsumen obat yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. 3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: 1) Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. 2) Sikap (<i>Attitude</i>) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat yang aman dan bermutu. 3) Perilaku (<i>Practices</i>) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dengan baik.
---	--

Cara Perhitungan Dan Formula	Indeks kesadaran masyarakat dilakukan melalui survei dengan metode <i>Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)</i> berbasis <i>offline</i> dan <i>online</i>. Desain sampling menggunakan <i>stratified random sampling</i> dimana pengembangan desain dan metodologi survei kesadaran masyarakat dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei – Badan Pusat Statistik. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (<i>weighted mean score</i>) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan per aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Indeks Kesadaran Nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.
Satuan Pengukuran	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	Hasil Survei oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan
Metode Cascading	() Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12
Penanggung Jawab Data	- Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan; - Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu

k. Persentase Pengawasan Hilirisasi Obat Pengembangan Baru Yang Dikawal Sesuai Standar

Definisi Kinerja Program (IKSP)	Indikator Sasaran	1. Fasilitas produksi Obat dari hulu ke hilir adalah fasilitas yang digunakan untuk memproduksi Obat atau bahan Obat berupa molekul baru atau Formula baru, Produk Biologi/bioteknologi baru yang sedang dibuat dan/atau dikembangkan oleh Sarana Produksi di Indonesia. 2. Sarana Produksi adalah sarana produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru termasuk radiofarmaka, vaksin, produk terapi <i>advanced</i> (misal sel punca, dan produk terapi gen), molekul baru, biosimilar, bahan baku plasma darah dan produk obat derivat plasma. 3. Produk obat / bahan obat baru adalah obat atau bahan obat yang belum ada/belum disetujui di Indonesia. 4. Tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru termasuk radiofarmaka, vaksin, produk terapi <i>advanced</i> (misal sel punca, dan produk terapi gen), molekul baru, biosimilar, bahan baku plasma darah dan produk obat derivat plasma yang diproduksi dan/atau yang dikembangkan di dalam negeri yang dikawal dibandingkan dengan pendampingan fasilitas obat pengembangan baru yang dilakukan. 5. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap sarana/fasilitas dan produk mulai proses produksi, pra klinik, uji klinik, registrasi sampai dengan penerbitan izin edar atau dapat digunakan di masyarakat.
---------------------------------------	----------------------	---

Cara Perhitungan dan Formula	Kriteria inovasi obat pengembangan baru harus memenuhi 2 tahapan besar yaitu: (1) Tahapan pengawalan pemenuhan Fasilitas (50%) meliputi: - Tahap Pengajuan desain dan diskusi/konsultasi awal perencanaan fasilitas (25%) - Tahap Asistensi onsite/penilaian awal fasilitas (50%) - Tahap Inspeksi sertifikasi (75%) - Tahap Persetujuan Penggunaan Fasilitas/sertifikasi CPOB (100%) - Pengawalan fasilitas produksi dihitung terhadap pengajuan desain fasilitas produksi yang dilakukan pada tahun berjalan. Kemudian disesuaikan dengan proses produksi pada fasilitas berdasarkan tingkat kritikalitasnya Cara Perhitungan: Pembilang: Jumlah persentase capaian pemenuhan CPOB dari setiap fasilitas produksi obat dan bahan obat baru Penyebut: Jumlah fasilitas produksi obat dan bahan obat baru yang diajukan (2) Tahapan dalam rangka memperoleh izin edar dengan melalui empat tahap penilaian (50%) meliputi: - Tahapan uji non klinik (25%) - Tahap uji klinik (50%) - Tahap registrasi dokumen efikasi, keamanan, dan mutu obat (75%) - Tahap penerbitan NIE (100%) Cara Perhitungan: Persentase dihitung dari jumlah berkas obat pengembangan baru sesuai <i>roadmap</i> yang diajukan (baik masih dalam proses maupun sudah selesai sesuai standar registrasi obat), dibandingkan dengan semua berkas permohonan pengajuan obat pengembangan baru. Perhitungan untuk indikator ini adalah rata-rata dari capaian pendampingan pemenuhan fasilitas produksi dan capaian pengawalan proses pengajuan izin edar. Catatan: Tahapan proses dihitung dari capaian indikator terkait pada tingkat eselon II.
Satuan Pengukuran	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	Perhitungan Direktorat Registrasi Obat dan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Metode Cascading	() Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize

Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B03-B12 • Target flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B03-B12
Penanggung Jawab Data	- Direktorat Registrasi Obat - Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar

I. Persentase Industri Farmasi Yang Meningkatkan Level Maturitasnya

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	1. Maturitas adalah kemampuan industri farmasi dalam pemenuhan CPOB dan regulasi terkait khususnya industri farmasi secara proaktif melakukan self improvement dalam pemenuhan CPOB serta aspek kepatuhan terhadap regulasi yang terkait antara lain farmakovigilans, ketentuan registrasi/Good Submission Practice, dan lain-lain. 2. Level maturitas pemenuhan CPOB dibagi menjadi 4, yaitu: Level 1: Sistem Mutu Industri Farmasi belum komprehensif. Manajemen Risiko Mutu belum diterapkan secara menyeluruh. Industri Farmasi hanya mengutamakan Corrective Action atas temuan Badan POM, belum sampai pada Preventive Action. Level 2: Sistem Mutu Industri Farmasi dan Manajemen Risiko Mutu belum diimplementasikan secara konsisten. Industri Farmasi sudah mengerti dan mulai menjalankan Corrective Action and Preventive Action dengan baik. Tidak melakukan gap analysis secara mandiri terhadap ketentuan regulasi terkini baik nasional maupun internasional Level 3: Sistem Mutu Industri Farmasi dan Manajemen Risiko Mutu sudah dijalankan, namun belum ada perbaikan berkelanjutan (continual improvement). Telah melakukan gap analysis secara mandiri terhadap ketentuan regulasi terkini baik nasional maupun internasional, namun perbaikan belum sepenuhnya dilakukan. Level 4: Sistem Mutu Industri Farmasi dan Manajemen Risiko Mutu sudah dijalankan secara konsisten termasuk perbaikan berkelanjutan (continual improvement). Implementasi Sistem Mutu Industri Farmasi, mulai dikendalikan dengan sistem komputerisasi. Pemenuhan gap terhadap regulasi terkini telah dilakukan sebelum regulasi diterapkan (diundangkan). 3. Industri farmasi yang meningkat maturitasnya adalah industri farmasi yang berdasarkan penilaian tahun berjalan memiliki level maturitas lebih tinggi minimal 1 level dari level sebelumnya berdasarkan hasil penilaian maturitas yang telah ditetapkan sebelumnya.
Cara Perhitungan dan Formula	Pembilang: Jumlah industri farmasi yang meningkat level maturitasnya pada tahun berjalan. Penyebut: Jumlah seluruh industri farmasi produk jadi yang telah memiliki sertifikat CPOB dan diverifikasi pada tahun berjalan.
Satuan Pengukuran	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	Perhitungan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Metode Cascading	() Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12
Penanggung Jawab Data	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Nama Sasaran Strategis Atasan	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	Tingkat kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (produsen non UMKM)

m. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: - Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); - Profesionalitas SDM (25%); - Sarana Prasarana (18%); - Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); - Konsultasi dan Pengaduan (10%); - Inovasi (12%). - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). - IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.
---	---

Cara Perhitungan Dan Formula	1. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM di bawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. 2. Kategori nilai: 0 - 1,00 F Gagal 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk 1,51 - 2,00 D Buruk 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 2,51 - 3,00 C Cukup 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 3,51 - 4,00 B Baik 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik 4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima
Satuan Pengukuran	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	Hasil penilaian oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM
Metode Cascading	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12	
Penanggung Jawab Data	Seluruh Unit Pelayanan Publik di Kedeputian 1 yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi: - Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif - Direktorat Registrasi Obat - Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, dan Psikotropika - Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika - Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Layanan Publik yang Prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	Indeks Pelayanan Publik BPOM
----------------------------	------------------------------

n. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Deputy 1

Definisi Kinerja Program (IKSP)	Indikator Sasaran	1. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 2. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. 3. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan. 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.
---------------------------------------	----------------------	---

Cara Perhitungan dan Formula	Nilai pembangunan ZI Deputy 1 adalah rata-rata dari hasil evaluasi zona integritas unit Eselon 2 di Lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan <i>self-assessment</i> dan revidi oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr> </tbody> </table>	NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tatalaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %	2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %
NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT																													
1	Manajemen Perubahan	8%																													
2	Penataan Tatalaksana	7%																													
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																													
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																													
5	Penguatan Pengawasan	15%																													
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																													
NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT																													
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %																													
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %																													
Satuan Pengukuran	() Persentase (√) Nilai																														
Sumber Data	Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama																														
Metode Cascading	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																														
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize																														
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																														
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan																														
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12																															

Penanggung Jawab Data	- Inspektorat Utama; - Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif - Direktorat Registrasi Obat - Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, dan Psikotropika - Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika - Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	Indeks RB BPOM

o. Nilai Akip Deputy 1

Cara Perhitungan Dan Formula	Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90 – 100 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80 – 90 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70 – 80 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60 – 70 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50 – 60 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30 – 50 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0 – 30.
Satuan Pengukuran	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	Laporan hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit (☒) KPI Sendiri
Polarisasi	(☒) Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Kriteria	(☒) Lag Output ☐ Lag Input ☐ Lead Proses
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran (☒) Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12	
Penanggung Jawab Data	- Inspektorat Utama; - Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif - Direktorat Registrasi Obat - Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, dan Psikotropika - Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika - Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif
Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	Indeks RB BPOM

p. Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	1. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 3. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1) Revisi DIPA (bobot 10%) 2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4) Belanja Kontraktual (bobot 10%) 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 7) Capaian <i>Output</i> (bobot 25%) 8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) 4. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. 5. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1) Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2) Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)																		
Cara Perhitungan Dan Formula	Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran <table><tr><td>Nilai</td><td>Kategori</td><td>Konversi Nilai</td></tr><tr><td>0 s.d. 50</td><td>Sangat Kurang</td><td>1</td></tr><tr><td>50,01 s.d. 60</td><td>Kurang</td><td>2</td></tr><tr><td>60,01 s.d. 80</td><td>Cukup</td><td>3</td></tr><tr><td>80,01 s.d. 90</td><td>Baik</td><td>4</td></tr><tr><td>90,01 s.d. 100</td><td>Sangat Baik</td><td>5</td></tr></table>	Nilai	Kategori	Konversi Nilai	0 s.d. 50	Sangat Kurang	1	50,01 s.d. 60	Kurang	2	60,01 s.d. 80	Cukup	3	80,01 s.d. 90	Baik	4	90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5
Nilai	Kategori	Konversi Nilai																	
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1																	
50,01 s.d. 60	Kurang	2																	
60,01 s.d. 80	Cukup	3																	
80,01 s.d. 90	Baik	4																	
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5																	

Satuan Pengukuran	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan
Metode Cascading	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12	
Penanggung Jawab Data	- Biro Perencanaan dan Keuangan; - Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif - Direktorat Registrasi Obat - Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, dan Psikotropika - Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika - Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif
Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	Indeks RB BPOM

q. Indeks Manajemen Risiko Deputy 1

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
	2. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
	3. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naïve</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan Tingkat kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan

		organisasi, pengukuran, dan pelaporan.																
	<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan Keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan																
	4. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan. 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko. 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko																	
Cara Perhitungan dan Formula	Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut: <table><tr><th>Menuju Tingkat Maturitas</th><th>Skor Total</th><th>Nilai Maturitas</th><th>Tingkat Maturitas</th></tr><tr><td><i>Risk Naïve</i></td><td>0 – 16</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td><i>Risk Aware</i></td><td>17 – 32</td><td>2</td><td>Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i></td></tr><tr><td><i>Risk Defined</i></td><td>33 – 48</td><td>3</td><td>Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i></td></tr></table>		Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas	<i>Risk Naïve</i>	0 – 16	1	-	<i>Risk Aware</i>	17 – 32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>	<i>Risk Defined</i>	33 – 48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas															
<i>Risk Naïve</i>	0 – 16	1	-															
<i>Risk Aware</i>	17 – 32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>															
<i>Risk Defined</i>	33 – 48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>															

	<i>Risk Managed</i>	49 – 64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
	<i>Risk Enabled</i>	65 – 80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>
Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = (Skor Total)/16 Keterangan: a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan evaluasi oleh Inspektorat Utama				
Satuan Pengukuran	() Persentase (✓) Nilai			
Sumber Data	Hasil Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama			
Metode Cascading	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (✓) KPI Sendiri			
Polarisasi	(✓) Maximize () Minimize () Stabilize			
Kriteria	(✓) Lag Output () Lag Input () Lead Proses			
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (✓) Tahunan			
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi B12			

Penanggung Jawab Data	- Inspektorat Utama - Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif - Direktorat Registrasi Obat - Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, dan Psikotropika - Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika - Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Nama Sasaran Strategis Atasan	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif
Nama_IKU_Aatasan (IKSS)	Indeks RB BPOM

2.5.2. Kriteria Pencapaian Indikator

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Kriteria Evaluasi Kinerja dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Kurang	<60%	

2.5.3. Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Tabel 2. 8 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Predikat	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

FORUM DISKUSI HASIL INTENSIFIKASI PENGAWASAN PSIKOTROPIKA UNTUK MENJAMIN AKSES DAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN

18 DESEMBER 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA
- 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya
- 3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja
- 3.4 Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA

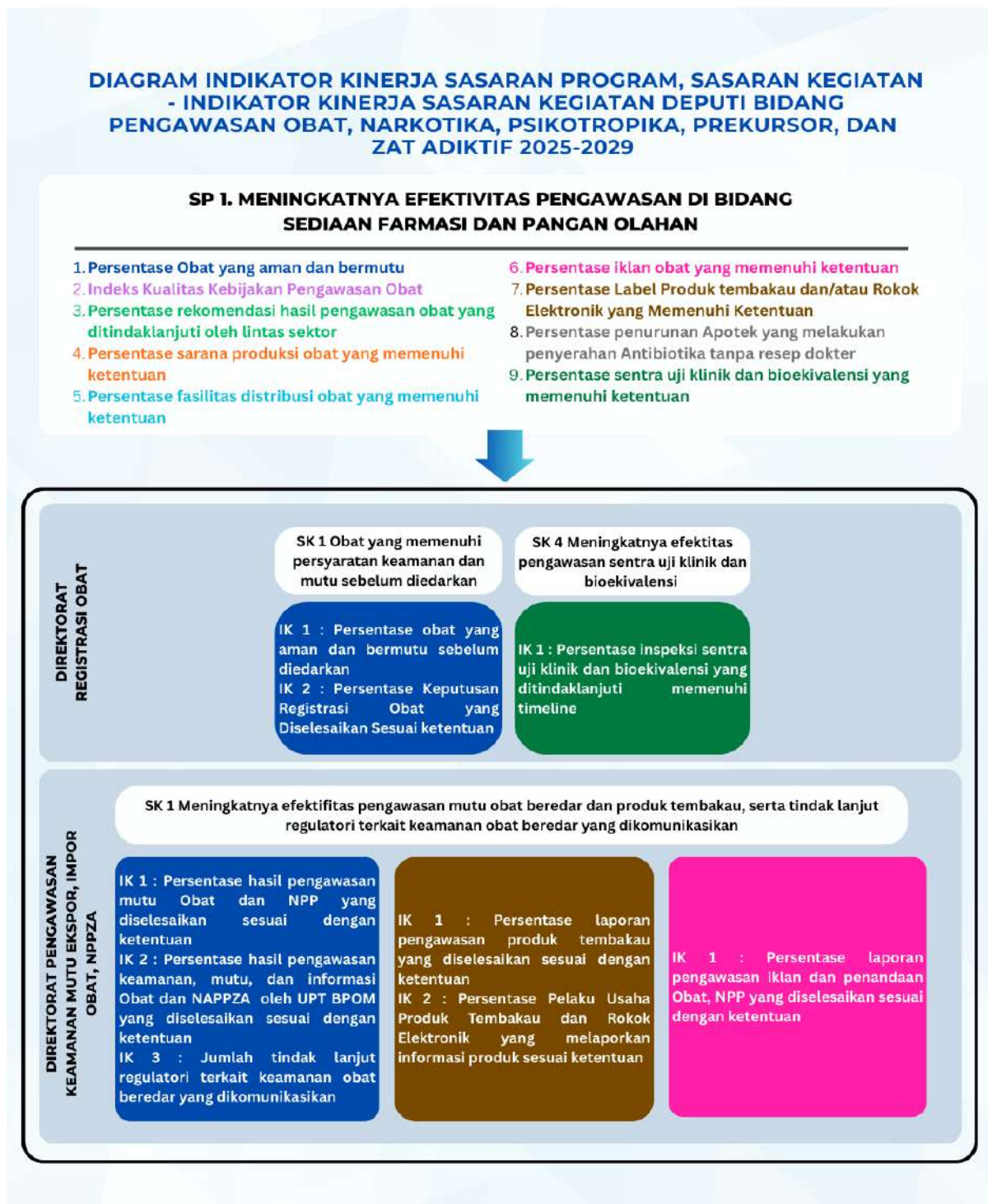
Penyusunan laporan kinerja menjadi instrumen penting untuk memonitor efektivitas program, kebijakan, dan intervensi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Dengan adanya evaluasi berbasis data ini, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan pencapaian indikator serta menilai apakah program yang dilaksanakan telah memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas pengawasan dan pelayanan publik.

Pelaporan kinerja juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Melalui analisis capaian dan tantangan yang muncul, unit kerja dapat menyusun strategi tindak lanjut yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika industri farmasi, perkembangan teknologi, maupun risiko peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan zat berbahaya.

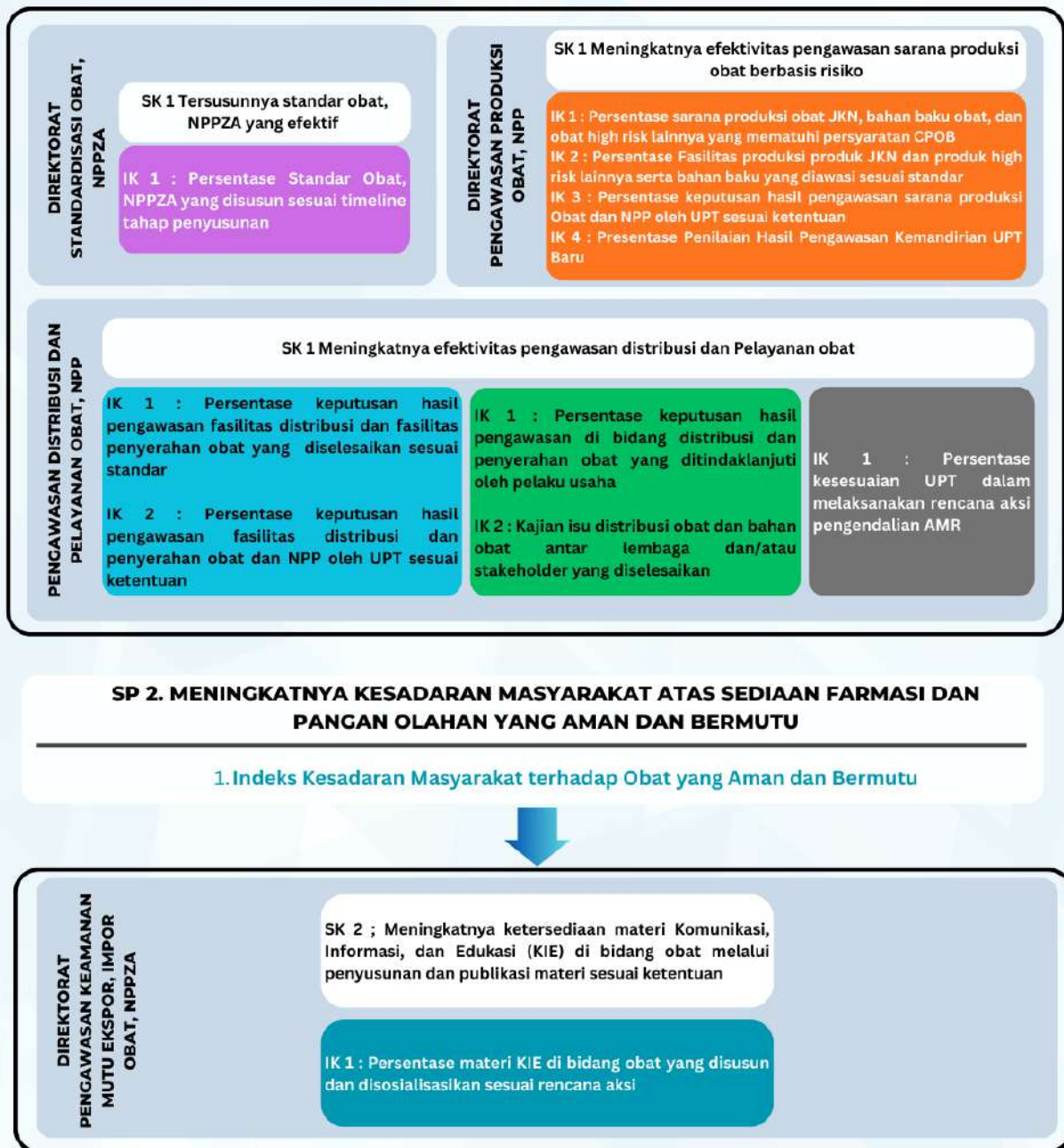
Pada tahun 2025 Capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA diukur secara kuantitatif melalui Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi (NKO). Komponen nilai NKO disusun dari pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator Kerja Sasaran Program (IKSP). Pengukuran kinerja masing-masing IKSP dilakukan sesuai dengan definisi operasional yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis dengan membandingkan realisasi tahun 2025 serta terhadap target akhir periode Renstra 2025-2029, dimana analisis dilakukan dengan mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Gambar 3.1 menunjukkan diagram Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan - Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA 2025-2029 yang memetakan Sasaran Program (SP) yang diturunkan sebagai IKSP kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Gambar 3. 1 Diagram Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan - Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA 2025-2029



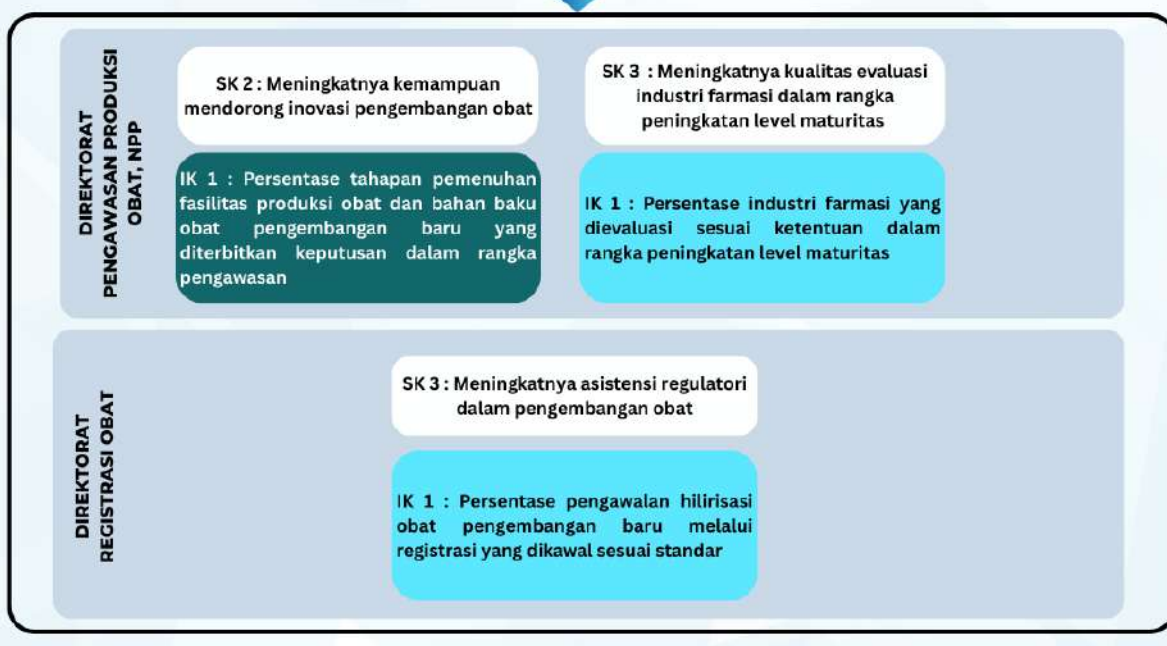
**DIAGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN
- INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF 2025-2029**



**DIAGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN
- INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF 2025-2029**

**SP 3. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS *REGULATORY ASSISTANCE* DAN KEMANDIRIAN
INDUSTRI DALAM PENGEMBANGAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN**

1. Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar
2. Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya



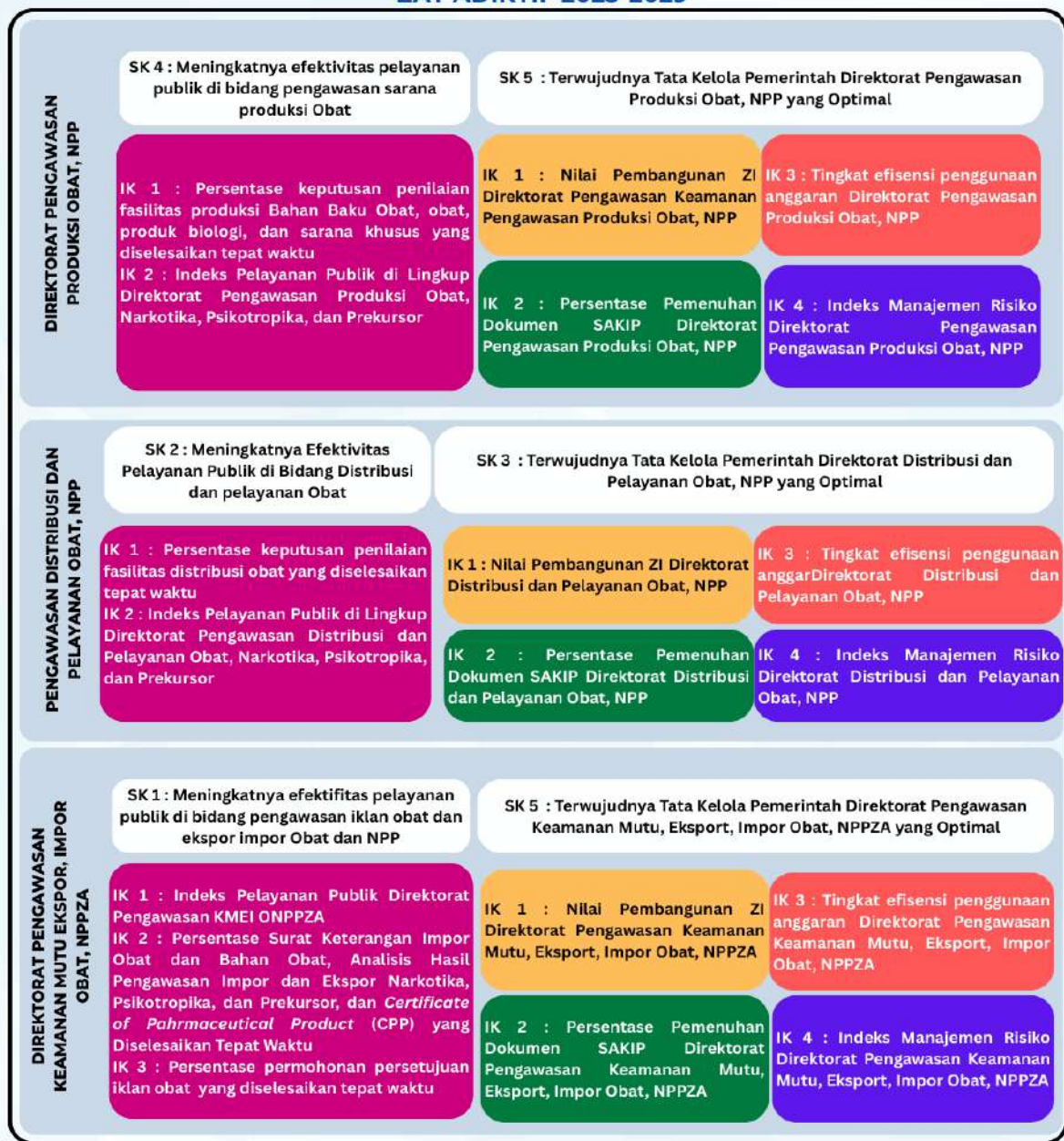
**DIAGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN
- INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF 2025-2029**

**SP 4. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN SERTA PELAYANAN PUBLIK
UNIT ORGANISASI YANG PRIMA**

1. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat
2. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
3. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA
4. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA
5. Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA



**DIAGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN
- INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF 2025-2029**



Penilaian capaian sasaran program dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target setiap IKSP penyusun pada masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025 Berikut ini merupakan capaian kinerja ditinjau dari capaian terhadap NP Sasaran program hingga akhirnya dapat diperoleh NKO Total sebagai hasil kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.

3.1.1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Berikut ini merupakan data pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2025 per Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dengan kategori capaian sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA sepanjang triwulan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Nilai NKO berada pada kisaran 91,98 –104,07%, mencerminkan stabilnya pelaksanaan program, efektivitas tindak lanjut perbaikan kinerja, serta ketepatan penyelesaian target indikator selama 1 tahun.

Tabel 3. 1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA sepanjang Triwulan Tahun 2025

Triwulan	NKO (%)
I	104.07
II	100.66
III	98.92
IV	91.92

Pada bulan Desember, capaian NKO belum optimal karena keterbatasan pelaksanaan program hingga di akhir tahun, khususnya akibat belum tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan secara penuh. Kondisi ini menyebabkan beberapa indikator tidak dapat mencapai target hingga bulan terakhir. Secara keseluruhan, performa organisasi pada Januari–Desember menunjukkan capaian kinerja yang baik. Pada akhir tahun 2025, capaian sasaran program dan indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA menunjukkan hasil yang secara umum memenuhi target, dengan demikian, sebagian besar komponen indikator berhasil menunjukkan kinerja yang terarah, selaras dengan sasaran program, dan mendukung peningkatan kualitas pengawasan obat serta perlindungan masyarakat.

Tabel 3. 2 Pencapaian NKO berdasarkan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program	IKSP	Capaian IKSP (%)	Kategori	Notifikasi Warna
01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 – Persentase obat yang aman dan bermutu	106,87	Sangat Baik	
	02 – Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat	112,48	Tidak Dapat Disimpulkan	
	03 – Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Tidak dapat diukur	-	-
	04 – Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	102,40	Sangat Baik	
	05 – Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	83,34	Cukup	
	06 – Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan	115,66	Tidak Dapat Disimpulkan	
	07 – Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	106,55	Sangat Baik	
	08 – Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	197,76	Tidak Dapat Disimpulkan	
	09 – Persentase sentra uji klinik dan bioekuivalensi yang memenuhi ketentuan	101,56	Sangat Baik	
05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	99,43	Baik	
06 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri	01 - Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	99,42	Baik	

Sasaran Program	IKSP	Capaian IKSP (%)	Kategori	Notifikasi Warna
dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	02 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	108,17	Sangat Baik	
10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	103,42	Sangat Baik	
	02 - Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	97,85	Baik	
	03 - Nilai AKIP Deputy 1	96,02	Baik	
	04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1	100,00	Baik	
	05 - Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	98,92	Baik	
Capaian NKO Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA		91,92	Baik	

Dari hasil pengukuran kinerja sesuai aplikasi SIMETRIS, diperoleh data capaian nilai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025 yaitu sebesar 91,92% dengan predikat **Baik**. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi yang tinggi adalah indikator positif yang menunjukkan bahwa organisasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi, serta mencerminkan efektivitas program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

3.1.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

A. Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025, dibandingkan terhadap Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Informasi nilai capaian yang ditampilkan pada Tabel 3.3 menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025, dibandingkan terhadap Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah. Capaian 17 IKSP pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- a. **3 (tiga)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Tidak dapat disimpulkan**, yaitu:
 - 1) Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter
 - 2) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat
 - 3) Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan
- b. **7 (tujuh)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Sangat Baik**, diantaranya:
 - 4) Persentase Obat yang aman dan bermutu
 - 5) Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan
 - 6) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan
 - 7) Persentase sentra uji klinik dan BE yang memenuhi ketentuan
 - 8) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya
 - 9) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat
 - 10) Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1
- c. **5 (lima)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Baik**, yaitu:
 - 11) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu
 - 12) Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar
 - 13) Nilai Pembangunan ZI Deputy 1
 - 14) Nilai AKIP Deputy 1
 - 15) Indeks Manajemen Risiko Deputy 1
- d. **1 (satu)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Cukup**, yaitu:
 - 16) Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan
- e. **1 (satu)** IKSP tidak dapat diukur kinerjanya karena terdapat blokir anggaran hingga akhir tahun yaitu indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2025, dibandingkan terhadap Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	IKSP	Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)			Tahun 2025				Target Jangka Menengah			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 – Persentase obat yang aman dan bermutu	-	-	-	90%	96,18%	106,87	Sangat Baik	94%	96,18%	102,32	Tercapai/ Melampaui
	02 – Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat	93,79	93,79	100,00	82,9	93,25	112,48	Tidak Dapat Disimpulkan	83,3	93,25	111,94	Tercapai/ Melampaui
	03 – Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82	91,63	111,74	30%	N/A	N/A	N/A	50%	N/A	N/A	N/A
	04 – Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	-	-	-	77%	78,85%	102,40	Sangat Baik	85%	78,85%	92,76	Akan Tercapai
	05 – Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	-	-	-	78,5%	65,42%	83,34	Cukup	80,5%	65,42%	81,27	Akan Tercapai

Sasaran Strategis	IKSP	Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)			Tahun 2025				Target Jangka Menengah			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	06 – Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan	-	-	-	79%	91,37%	115,66	Tidak Dapat Disimpulkan	83%	91,37%	110,09	Tercapai/ Melampaui
	07 – Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	-	-	-	75%	79,91%	106,55	Sangat Baik	83%	79,91%	96,28	Akan Tercapai
	08 – Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	-	-	-	4,9%	9,69%	197,76	Tidak Dapat Disimpulkan	9,1%	9,69%	106,48	Tercapai/ Melampaui
	09 – Persentase sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan	-	-	-	80%	81,25%	101,56	Sangat Baik	84%	81,25%	96,73	Akan Tercapai
02-Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	87,5	90,44	103,36	90,6	90,08	99,43	Baik	91	90,08	98,99	Akan Tercapai

Sasaran Strategis	IKSP	Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)			Tahun 2025				Target Jangka Menengah			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu												
03-Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pengawasan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	-	-	-	75%	74,57%	99,42	Baik	87%	74,57%	85,71	Akan Tercapai
	02 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	-	-	-	52%	56,25%	108,17	Sangat Baik	60%	56,25%	93,75	Akan Tercapai
04-Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,7	4,87	103,57	4,68	4,84	103,42	Sangat Baik	4,88	4,84	99,18	Akan Tercapai
	02 - Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	-	-	-	92,9	90,90	97,85	Baik	93,63	90,90	93,63	Akan Tercapai
	03 - Nlai AKIP Deputy 1	81,94	81,08	98,95	81,47	78,23	96,02	Baik	83,03	78,23	94,22	Akan Tercapai
	04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1	93.06	96,61	103,81	5	5	100	Sangat Baik	5	5	100,00	Tercapai/ Melampaui

Sasaran Strategis	IKSP	Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)			Tahun 2025				Target Jangka Menengah			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	05 - Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	-	-	-	2,97	2,938	98,92	Baik	3,1	2,938	94,77	Akan Tercapai

B. Perbandingan Capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan Satuan Kerja lain Tahun 2025

Berikut ini merupakan tabel perbandingan realisasi kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan Deputy Bidang Pengawasan komoditi lainnya di lingkungan BPOM. Adapun satuan kerja lain yang digunakan sebagai perbandingan adalah Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II), Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III), Deputy Bidang Penindakan (Deputi IV).

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan Deputy II, Deputy III, dan Deputy IV di Lingkungan BPOM

No.	IKSP	Realisasi (%)				Analisis
		Deputi I	Deputi II	Deputi III	Deputi IV	
SP 1						
1.	a. Persentase obat yang aman dan bermutu b. Persentase Obat bahan Alam, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu c. Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	96,18	74,23	88,76	-	Deputi I mencatat realisasi tertinggi sebesar 96,18%, melampaui Deputi III (88,76%) dan Deputi II (74,23%)
2.	a. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat b. Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik c. Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Makanan	93,25	97,75	95,19	-	Realisasi Deputi I sebesar 93,25 berada pada kategori unggul dan relatif sebanding dengan Deputi III (95,19), meskipun masih di bawah Deputi II (97,75)
3.	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan.Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan	-	83,5	-	-	Data kinerja Deputi I tidak dapat diukur karena blokir anggaran hingga akhir tahun

No.	IKSP	Realisasi (%)				Analisis
		Deputi I	Deputi II	Deputi III	Deputi IV	
	yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor					
4.	a. Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan b. Persentase sarana produksi Obat bahan Alam, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi ketentuan c. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	78,85	73,76	63,92	-	Deputi I mencatat realisasi 78,85%, lebih tinggi dibandingkan Deputi III (63,92%) dan sebanding dengan Deputi II (73,76%).
5.	a. Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan b. Persentase Fasilitas distribusi Obat bahan Alam, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi ketentuan c. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	65,42	80,38	78,03	-	Deputi I mencapai 65,42%, relatif lebih rendah dibandingkan Deputi II dan Deputi III, menunjukkan adanya ruang perbaikan pada aspek pengawasan distribusi.
6.	a. Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan b. Persentase Iklan Obat bahan Alam, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi ketentuan c. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	91,37	70,82	77,08	-	Deputi I mencatat realisasi 91,37%, merupakan nilai tertinggi dibandingkan Deputi II (70,82%) dan Deputi III (77,08%), yang mencerminkan efektivitas pengawasan promosi dan periklanan obat.
SP 2						
7.	a. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu b. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu c. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap	90,08	88,89	87,69	-	Deputi I menunjukkan keunggulan dengan nilai 90,08%, lebih tinggi dibandingkan Deputi II dan III (87,69%).

No.	IKSP	Realisasi (%)				Analisis
		Deputi I	Deputi II	Deputi III	Deputi IV	
	pangan olahan yang aman dan bermutu					
SP3						
8.	a. Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar b. Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar c. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	74,57	45,15	100,00	-	Deputi I mencatat realisasi 74,57%, masih berada di bawah Deputi III yang telah mencapai 100%, menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan pada tahap pengembangan Obat.
SP 4						
9.	a. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat b. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam. Kosmetik dan Suplemen Kesehatan c. Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,84	4,908	4,93	-	Deputi I tercatat 4,84 lebih rendah dibandingkan dengan Deputi II dan Deputi III (4,93) dan berada pada kategori sangat baik.
10.	a. Nilai Pembangunan ZI Deputi 1 b. Nilai Pembangunan ZI Deputi 2 c. Nilai Pembangunan ZI Deputi 3	90,90	90,154	91,36	86,14	Deputi I mencatat realisasi 90,90, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penguatan tata kelola dan integritas. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Deputi IV (86,14) dan relatif setara dengan Deputi II dan III (91,36), Hasil tersebut mencerminkan konsistensi Deputi I dalam mendorong budaya kerja berintegritas di lingkungan BPOM.
11.	a. Nilai AKIP Deputi 1 b. Nilai AKIP Deputi 2 c. Nilai AKIP Deputi 3	78,23	79,26	79,61	74,92	Deputi I mencatat 78,23, lebih rendah dibandingkan Deputi II (79,26) dan Deputi III (79,61), namun tetap berada pada kategori baik.

No.	IKSP	Realisasi (%)				Analisis
		Deputi I	Deputi II	Deputi III	Deputi IV	
12.	a. Nilai Kinerja Anggaran Deputi 1 b. Nilai Kinerja Anggaran Deputi c. Nilai Kinerja Anggaran Deputi 3 d. Nilai Kinerja Anggaran Deputi 4	5	5	5	3	Deputi I tercatat mencapai nilai 5, setara dengan Deputi II dan II serta lebih tinggi dibandingkan Deputi IV (3).
13.	a. Indeks Manajemen Risiko Deputi 1 b. Indeks Manajemen Risiko Deputi 2 c. Indeks Manajemen Risiko Deputi 3 d. Indeks Manajemen Risiko Deputi 4	2,938	2,938	3.375	2,906	Indeks Manajemen Risiko Deputi I tercatat 2,938, relatif setara dengan Deputi II dan IV (2,906) dan masih berada di bawah Deputi II (3,375), yang menunjukkan perlunya penguatan penerapan manajemen risiko secara lebih terintegrasi.

Berdasarkan hasil benchmark kinerja antar Deputi di lingkungan BPOM, Deputi I menunjukkan capaian kinerja yang kompetitif dan unggul pada beberapa indikator utama, khususnya yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan obat.

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Deputi I memiliki keunggulan pada indikator outcome pengawasan dan dampak kepada masyarakat, khususnya pada aspek kepatuhan iklan dan kesadaran publik, sementara terdapat peluang peningkatan pada aspek distribusi, pengenalan bahan baru, serta penguatan tata kelola internal melalui peningkatan AKIP dan manajemen risiko.

C. Pembahasan dan analisis Capaian Kinerja 2025 (Penyebab keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan kinerja, upaya perbaikan, penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, serta analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja)

Dalam proses pencapaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi capaiannya. Penyebab keberhasilan/kegagalan /peningkatan/penurunan kinerja dijelaskan melalui pembahasan Sasaran Program dan IKSP. Selain itu, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA juga telah melakukan pengkajian terkait

langkah strategis yang perlu ditempuh sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk masing-masing Sasaran Program (SP) dan IKSP kinerja dijabarkan menggunakan pagu anggaran riil termasuk pemblokiran/pemotongan anggaran, data lengkap terkait pagu anggaran awal dan pemotongan disampaikan pada poin Realisasi anggaran.

SP 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran program “**Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**” memiliki capaian kinerja sebesar 115,83% termasuk dalam kategori **Tidak dapat disimpulkan**, program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran program dengan baik (>100%).

Capaian SP1 disusun atas komponen 9 IKSP dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian IKSP pada SP1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

SP1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Persentase obat yang aman dan bermutu	90%	96,18%	106,87	Sangat Baik
2.	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat	82,9	93,25	112,48	Tidak Dapat Disimpulkan
3.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	30%	N/A	N/A	N/A
4.	Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77%	78,85%	102,40	Sangat Baik
5.	Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	78,5%	65,42%	83,34	Cukup
6.	Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan	79%	91,37%	115,66	Tidak Dapat Disimpulkan
7.	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	75%	79,91%	106,55	Sangat Baik

SP1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
8.	Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	4,9%	9,69%	197,76	Tidak Dapat Disimpulkan
9.	Persentase sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan	80%	81,25%	101,56	Sangat Baik
Capaian SP 1				115.83	Tidak dapat disimpulkan

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP tersebut:

1) Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

Persentase obat yang aman dan bermutu adalah proporsi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berlaku. Kriteria Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu mencakup memiliki NIE yang sah dan berlaku, tidak kadaluarsa, tidak rusak, memenuhi ketentuan penandaan, serta memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Tujuan pengukuran indikator persentase obat dan bermutu ini adalah untuk memastikan bahwa obat yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang dipersyaratkan. Dari sisi internal BPOM, indikator tersebut berperan dalam rangka menilai efektivitas pengawasan di bidang sediaan farmasi.

Realisasi persentase obat aman dan bermutu pada tahun 2025 adalah sebesar 96,18% dengan capaian 106,87%, dimana tahun 2025 ini adalah merupakan tahun pertama implementasi pengukuran indikator persentase obat aman dan bermutu, mengacu pada proses sampling berbasis risiko sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi kriteria aman dan bermutu dengan total sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling yang berlaku.

Tabel 3. 6 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

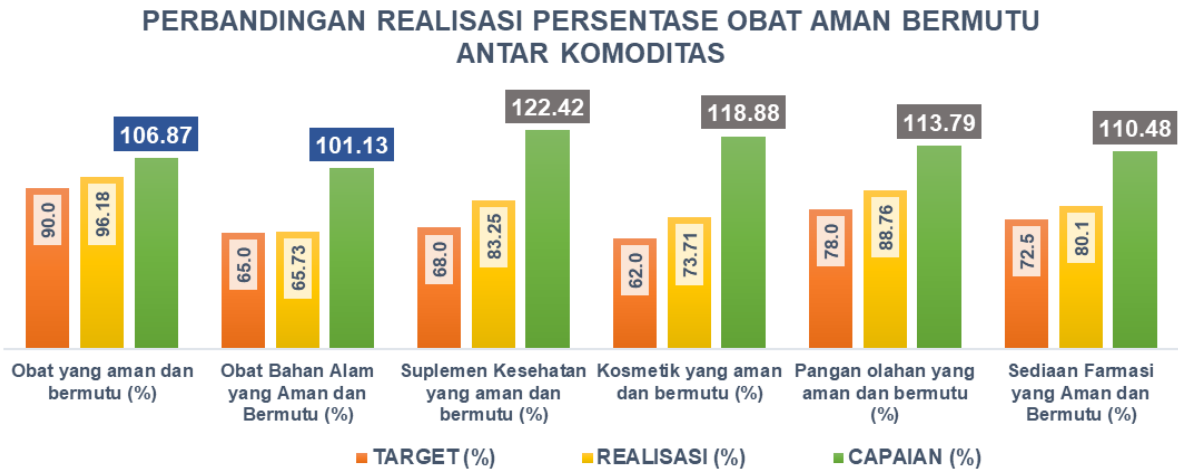
IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase obat yang aman dan bermutu	107,17%	107,73%	107,55%	106,87%	-	102,32 % (Tercapai/ Melampaui)

Perbandingan realisasi persentase produk aman dan bermutu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi persentase obat aman bermutu antar komoditas

No	Indikator sejenis pada komoditi lain	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu	90,0%	96,18%	106,87
2	Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu	65,0%	65.73%	101.13
3	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,0%	83.25%	122.42
4	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,0%	73.71%	118.88
5	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78,0%	88,76%	113,79
6	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	72,5%	80,10%	110,48

Dalam visualisasi bentuk grafik, perbandingan realisasi antar komoditas adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3. 2 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Obat Aman Bermutu antar Komoditas

Berdasarkan tabel maupun grafik tersebut terlihat bahwa capaian indikator Persentase Obat Aman dan Bermutu relatif lebih bagus apabila dibandingkan dengan komoditi lain pada indikator sejenis, dimana pada 3 (tiga) komoditi lain yaitu Suplemen Kesehatan, Kosmetik, maupun Pangan Olahan capaian termasuk pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi baik secara online maupun onsite yang berfokus pada outcome bukan hanya output sampling sehingga mendorong perbaikan strategi pengawasan. Monev berkala membantu UPT melakukan koreksi strategi sampling secara cepat dan terarah.
- b. Mekanisme tindak lanjut temuan melalui intensifikasi yang berimbas pada pengurangan risiko berlanjutnya peredaran obat tidak memenuhi mutu sehingga angka temuan turun secara signifikan.
- c. Kolaborasi bersama lintas sektor maupun pemangku kepentingan terkait lainnya sehingga memperluas cakupan pengawasan serta memperkuat efektivitas penyampaian rekomendasi tindak lanjut.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, dilaksanakan optimalisasi strategi serta implementasi pengawasan mutu obat beredar berbasis risiko sesuai ketentuan Pedoman Sampling yang berlaku dengan memperkuat kemampuan teknis pengawas pada tingkat UPT dan Pusat agar lebih efektif dalam mendeteksi obat yang berisiko tidak memenuhi syarat di peredaran.

Tabel 3.8 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Obat Aman Bermutu	1. Implementasi sampling berbasis risiko yang belum	Optimalisasi strategi serta implementasi pengawasan mutu	Memperkuat kemampuan teknis pengawas pada	TW IV 2026	Y	SDM-2	Pelaksanaan sampling oleh petugas UPT BPOM tidak

		sepenuhnya dilaksanakan oleh UPT BPOM dengan prioritas sampling obat high-risk serta kapasitas pengujian yang belum menjangkau sebagian besar produk yang beredar. 2. Variabilitas kompetensi teknis petugas sampling berkaitan dengan perbedaan pengalaman sampling, penanganan sampel, dan pengetahuan antar petugas	obat beredar berbasis risiko sesuai ketentuan Pedoman Sampling	tingkat UPT dan Pusat agar lebih efektif dalam mendeteksi obat yang berisiko tidak memenuhi syarat di peredaran.				sesuai ketentuan Pedoman Sampling
--	--	--	---	---	--	--	--	-----------------------------------

2) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diukur untuk menilai kualitas proses perumusan, penetapan, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh organisasi. Pengukuran ini berfokus pada kualitas tata kelola kebijakan, termasuk kejelasan permasalahan dan tujuan kebijakan, penggunaan data dan analisis yang memadai, keterlibatan pemangku kepentingan, serta keselarasan kebijakan dengan arah strategis dan kerangka regulasi yang berlaku.

Selain itu, IKK bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP) secara konsisten, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat proporsional, dapat dilaksanakan, akuntabel dan berdampak bagi masyarakat. Hasil pengukuran IKK dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam siklus kebijakan, guna meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan obat dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pada Tahun 2025, IKK ditetapkan dengan target sebesar 82,9 dan berhasil direalisasikan sebesar 93,25. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 112,5%, yang menunjukkan kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Deputi I dalam meningkatkan kualitas proses

perumusan, penetapan, dan evaluasi kebijakan pengawasan obat secara konsisten dan berkelanjutan.

Tabel 3. 9 Capaian IKSP Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tahun 2025

SP1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	82,9	93,25	112,48 %	Tidak Dapat Disimpulkan	

Tabel 3. 10 Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase obat yang aman dan bermutu	-	-	-	112,48%	100,00%	111,94 % (Tercapai/ Melampaui)

Tingginya capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat tidak terlepas dari penguatan penerapan prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP), peningkatan kualitas analisis kebijakan melalui *Regulatory Impact Assessment* (RIA), serta koordinasi lintas unit dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan obat.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan Kedeputian lain di BPOM, berikut hasil realisasi dan capaian IKK Kedeputian 1 .

Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian IKK Kedeputian 1 dibandingkan Kedeputian Lain di BPOM tahun 2025

No.	IKSP	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3	Kategori
1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	93,25	97,75	95,19	Predikat Unggul

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi IKK di semua Kedeputian 1, 2 dan 3 berhasil memperoleh predikat “Unggul”. Keberhasilan BPOM dalam mencapai nilai Indeks Kualitas Kebijakan yang melampaui target didukung oleh penguatan tata kelola kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi. Proses perumusan

kebijakan dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, berbasis analisis, serta selaras dengan prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP). Setiap kebijakan dirancang dengan kejelasan permasalahan dan tujuan, didukung oleh data dan informasi yang relevan, serta diselaraskan dengan kerangka regulasi nasional dan arah strategis organisasi. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa faktor penunjang diantaranya:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kompetensi perumus kebijakan dan penguatan koordinasi lintas unit kerja;
- b. dukungan pimpinan, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas;
- c. pelibatan pemangku kepentingan dilakukan secara proporsional untuk memperoleh masukan yang relevan, sementara hasil evaluasi kebijakan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;
- d. tersedianya *database* dan sistem informasi penyusunan regulasi obat yang telah terdokumentasi dengan baik;
- e. melakukan kajian terhadap pemilihan perUU yang akan disurvei;
- f. koordinasi yang baik antar lintas unit di kedeputan 1 sehingga proses pengumpulan data dukung dapat terselesaikan dengan baik;
- g. adanya koordinasi intensif bersama tim Pusakom dalam kegiatan pembahasan persiapan penilaian IKK;

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- a. Pelatihan teknis mengenai IKK
- b. Rapat pembahasan intensif bersama dengan tim LAN
- c. Rapat internal untuk perencanaan dan persiapan data dukung

Berdasarkan hasil kinerja dan analisa program penunjang pencapaian kinerja, ke depan perlu dilakukan training berkesinambungan terkait IKK, pelaksanaan kegiatan monitoring dan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang obat baik melalui kegiatan *Focus Group Discussion* ataupun dengan survei implementasi kebijakan dan perlu dilaksanakan rapat intensif untuk persiapan data dukung baik di lingkup internal maupun eksternal BPOM. Hasil pengukuran indeks IKK yang telah memenuhi target ini dapat dijadikan dasar untuk peningkatan target di masa yang akan datang.

3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor adalah total rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibandingkan dengan rekomendasi yang diterbitkan pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56 Tahun 2025 Tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 seluruh Kementerian/Lembaga diminta untuk review anggaran masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran, hal ini berdampak pada:

- a. Rincian Output (RO) Kajian Isu Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang dilakukan pemblokiran sehingga sesuai dengan nota dinas No PR.04.02.34.01.26.77 tanggal 14 Januari 2026, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan *exclude* pada indikator tersebut.
- b. Indikator tersebut berdampak pada Indikator Kinerja Program (IKP) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yaitu "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor" yang berpengaruh terhadap perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk indikator ini tidak dapat diukur, sehingga untuk perlu dilakukan pengecualian (*exclude*) atas Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor" dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 mengingat anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator kinerja dimaksud mengalami pemblokiran seluruhnya hingga akhir Tahun Anggaran 2025 sehingga kegiatan persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun unit kerja terkait telah melakukan upaya perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan.

4) Persentase Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Pada Tahun 2025, indikator Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan ditetapkan dengan target sebesar 77%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian mencapai 78,85%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 102,40% dan berada pada kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana produksi obat telah menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Capaian indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan inspeksi sarana produksi yang konsisten serta efektivitas mekanisme tindak lanjut hasil inspeksi berupa perintah perbaikan maupun sanksi peringatan. Selain itu, peningkatan kepatuhan sarana produksi dalam menyelesaikan tindak lanjut inspeksi turut berkontribusi terhadap tercapainya kinerja yang melampaui target. Pendekatan pengawasan berbasis risiko dan penguatan pembinaan pasca inspeksi juga berperan dalam mendorong pemenuhan ketentuan oleh sarana produksi.

Jika dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah sebesar 85%, capaian indikator pada Tahun 2025 mencapai 92,76% dan berada pada kategori akan tercapai. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengawasan sarana produksi obat telah berada pada jalur yang tepat untuk mendukung pencapaian target Renstra. Kondisi ini mencerminkan adanya konsistensi pelaksanaan pengawasan dan efektivitas tindak lanjut hasil inspeksi, sehingga pemenuhan ketentuan oleh sarana produksi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 3. 12 Capaian Persentase Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

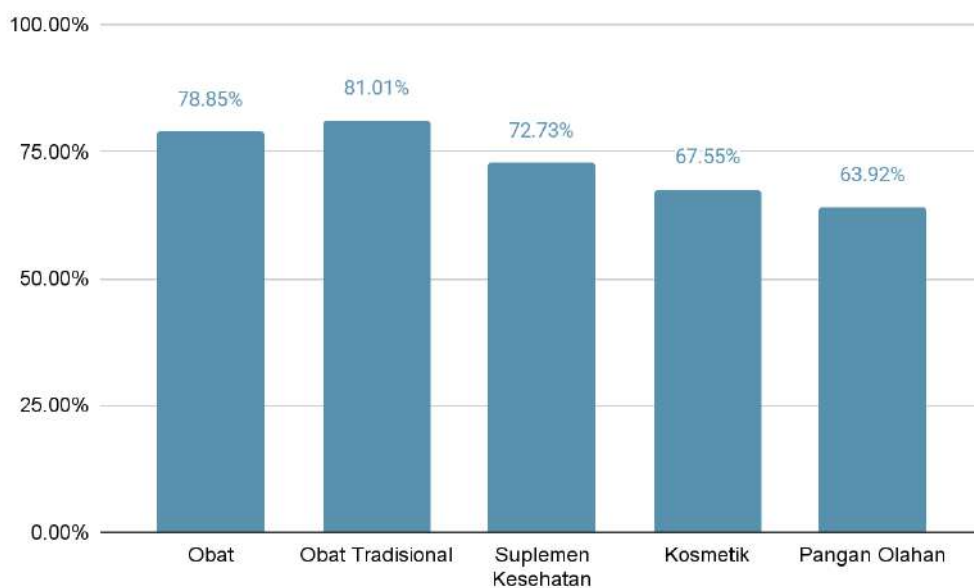
IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	23,86%	105,66%	96,10%	102,40%	-	92,76 % (Akan Tercapai)

Jika dibandingkan dengan capaian pada komoditi lain sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini, komoditi obat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dengan capaian sebesar 102,40%, melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan masing-masing mencatat capaian di bawah 100%, dengan variasi capaian yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kepatuhan sarana, kompleksitas proses produksi, serta karakteristik risiko produk.

Tabel 3. 13 Perbandingan realisasi Persentase Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan antar Komoditas di BPOM

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Obat	77%	78,85%	102,40%
2	Obat Bahan Alam	86%	81.01%	94.20%
3	Suplemen Kesehatan	85%	72.73%	85.56%
4	Kosmetik	81%	67.55%	83.39%
5	Pangan Olahan	73%	63,92%	87,56%

Capaian yang lebih tinggi pada komoditi Obat mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut hasil inspeksi pada sarana produksi obat telah berjalan lebih optimal, didukung oleh kesiapan fasilitas dan penerapan sistem mutu yang lebih mapan dibandingkan komoditi lainnya. Meskipun demikian, capaian pada seluruh komoditi secara umum menunjukkan tren positif dan mendukung pencapaian kinerja pengawasan di tingkat nasional.



Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Persentase Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan antar Komoditas di BPOM

Pada periode awal pelaksanaan, capaian indikator belum sepenuhnya optimal seiring dengan terbatasnya intensitas inspeksi lanjutan yang dapat dilaksanakan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai dampak dari proses blokir anggaran, sehingga diperlukan pengaturan ulang pelaksanaan perjalanan dinas dan inspeksi *on-site*. Setelah dukungan anggaran dalam buka blokir tersedia, pelaksanaan inspeksi dapat ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko yang didukung oleh ketersediaan data hasil inspeksi dan koordinasi antar pelaksana pengawasan. Optimalisasi tersebut mendorong percepatan realisasi indikator, yang tercermin dari meningkatnya jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan CPOB hingga capaian indikator dapat tercapai secara optimal.

5) Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Di Tahun 2025 Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan ditetapkan target sebesar 78,5%, berdasarkan kondisi akhir pada TW 4 adalah realisasi 65,42 % dengan capaian 83,34%. Dengan kategori Cukup, hambatan atau kendala pada indikator ini adalah:

- a. Penetapan target sarana yang diperiksa oleh UPT sudah berbasis risiko, sehingga sarana yang diperiksa kemungkinan adalah sarana yang berisiko dan adanya potensi tidak kepatuhannya.
- b. Adanya Kegiatan intensifikasi pengawasan OOT dan Psikotropika yg berpotensi menemukan penyimpangan distribusi, sehingga banyak tindak lanjut berupa Peringatan Keras (PK) dan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) yang diberikan kepada sarana.
- c. Adanya shifting indikator kinerja UPT yang tidak lagi mengukur MK sarana sebagai target capaian, sehingga UPT BPOM lebih yakin memberikan sanksi administratif yang berat (PK atau PSK).

Jika dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah sebesar 80,5%, capaian indikator pada akhir periode Renstra mencapai 81,27 % dan berada pada kategori akan tercapai.

Tabel 3. 14 Capaian Fasilitas Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	92,28%	84,68%	82,72%	83,34%	-	81,27 % (Akan Tercapai)

Capaian indikator *Persentase Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan antar Komoditas* menunjukkan bahwa capaian pada komoditas obat relatif lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kompleksitas dan standar yang lebih ketat dalam pengelolaan sarana distribusi obat, dan masih terdapat sarana distribusi obat, khususnya skala kecil dan menengah, yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan SDM sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Sementara pada komoditas lain, karakteristik distribusi relatif lebih sederhana sehingga pemenuhan ketentuan lebih mudah dicapai.

Ke depan, diperlukan penguatan pembinaan, pendampingan teknis, dan pengawasan berbasis risiko untuk meningkatkan capaian pada komoditas obat agar lebih sejalan dengan komoditas lainnya. Meskipun demikian, capaian pada seluruh komoditi secara umum menunjukkan tren positif dan mendukung pencapaian kinerja pengawasan di tingkat nasional.

Tabel 3. 15 Perbandingan realisasi Persentase Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan antar Komoditas di BPOM

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Obat	78,5%	65,42%	83,34
2	Obat Bahan Alam	70%	78,08%	111,55
3	Suplemen Kesehatan	89%	94,94%	106,67
4	Kosmetik	78%	68,13%	87,34
5	Pangan Olahan	83%	78,03%	94,01

Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Fasilitas distribusi belum sepenuhnya memenuhi standar CDOB	Penguatan pembinaan dan pendampingan teknis berbasis risiko, serta optimalisasi pengawasan dengan prioritas pada sarana berisiko tinggi. Selain itu, perlu dilakukan penegasan komitmen perbaikan melalui mekanisme tindak lanjut hasil inspeksi yang terukur dan berbatas waktu.	peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi,	TW IV 2026	T	-	-

6) Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan

Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan merupakan indikator untuk mendapatkan gambaran persentase iklan obat beredar yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan iklan obat yang dilakukan oleh UPT Badan POM di seluruh Indonesia. Kriteria obat yang memenuhi ketentuan adalah objektif, lengkap dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan persetujuan iklan obat yang diterbitkan Badan POM.

Pengawasan iklan obat yang dilakukan oleh Badan POM bertujuan untuk melindungi masyarakat dari iklan yang tidak memenuhi ketentuan serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi terkait obat yang diperlukan dalam penggunaan obat yang rasional.

Capaian nilai persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar **91,37%** dengan capaian **115,66%** dibandingkan target 2025 sebesar **79%**

dan kategori capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**. Nilai ini diperoleh dari berdasarkan Jumlah Laporan Pengawasan Iklan ONPP yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan jumlah laporan pengawasan iklan ONPP yang diterima. Laporan pengawasan iklan ONPP ini merupakan laporan pengawasan iklan yang dikirimkan oleh UPT Badan POM melalui aplikasi SIPT.

Tabel 3. 17 Capaian Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan	114,88%	113,76%	115,19%	115,66%	-	110,09% (Tercapai/ Melampaui)

Tabel 3. 18 Perbandingan realisasi Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan antar komoditas

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian
1	Obat	79,0%	91,37%	115,66%
2	Obat Bahan Alam	78,0%	69.18%	88.69%
3	Suplemen Kesehatan	87,0%	82.77%	95.14%
4	Kosmetik	71,0%	60.52%	85.24%
5	Pangan Olahan	71,0%	77,08%	108,56%

Berdasarkan pencapaian Indikator Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana tertera dalam tabel di atas, capaian pada tahun 2025 termasuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan dan akan tercapai/melampaui target jangka menengah.

Dengan melihat nilai capaian kinerja terkait pengawasan iklan obat yang memenuhi ketentuan yang sudah melampaui target, dapat diinformasikan faktor penunjang maupun kendala yang dihadapi selama tahun 2025. Untuk kendala yang dihadapi selama tahun 2025 dapat disampaikan adalah meningkatnya penggunaan media sosial

sebagai sarana publikasi iklan obat oleh Industri Farmasi yang menjadi tantangan dalam pengawasan iklan obat.

Berikut ini merupakan analisis program/kegiatan yang menunjang tingginya capaian tahun 2025 :

- a. Intensifikasi pengawasan melalui jemput bola baik melalui kegiatan desk konsultasi pengajuan persetujuan iklan obat, pemanggilan industri farmasi terkait temuan iklan tidak memenuhi ketentuan yang sekaligus pemberian bimbingan teknis ketentuan iklan obat, maupun desk pemenuhan CAPA iklan obat tidak memenuhi ketentuan.
- b. Penyediaan kanal konsultasi yang responsif untuk menjawab pertanyaan seputar implementasi publikasi iklan obat ke masyarakat oleh industri farmasi pemilik izin edar.



Gambar 3. 4 Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat tahun 2025

Pada awal penetapan target renstra, masih mempertimbangkan tren maraknya temuan iklan obat di media sosial sehingga penetapan target sebagai baseline tidak terlalu tinggi. Sebagai upaya perbaikan ke depan diperlukan pemantauan capaian indikator pada TW 1 Tahun 2026 untuk menentukan perlu tidaknya penyesuaian indikator yang telah ditetapkan berdasarkan tren hasil pengawasan di tahun 2025 dan tahun berjalan.

Tabel 3. 19 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Iklan Obat yang memenuhi ketentuan	Meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi iklan obat oleh Industri Farmasi yang menjadi tantangan dalam pengawasan iklan obat	1. Melakukan Intensifikasi pelayanan publik pengawasan pre dan post market iklan/penandaan obat melalui desk konsultasi dan pemanggilan 2. Sosialisasi/Bimtek Peningkatan Kepatuhan Industri Farmasi terhadap Ketentuan Iklan dan Penandaan obat dalam kegiatan asistensi regulatori, forum komunikasi ataupun bentuk kegiatan lainnya	1. Melakukan Intensifikasi pelayanan publik pengawasan pre dan post market iklan/penandaan obat melalui desk konsultasi dan pemanggilan 2. Sosialisasi/Bimtek Peningkatan Kepatuhan Industri Farmasi terhadap Ketentuan Iklan dan Penandaan obat dalam kegiatan asistensi regulatori, forum komunikasi ataupun bentuk kegiatan lainnya.	TW IV 2026	Y	S-6	Adanya pelanggaran ketentuan di bidang pengawasan iklan dan label obat beredar oleh pelaku usaha

7) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan adalah indikator yang menggambarkan pencantuman peringatan kesehatan termasuk informasi pada kemasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait pengawasan produk tembakau dan rokok

elektronik. Pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik oleh Badan POM pada tahun 2025 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, meskipun sudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun untuk implementasi sesuai Peraturan Pemerintah tersebut terdapat masa transisi selama 2 (dua) tahun dan wajib diimplementasikan secara penuh pada tanggal 27 Juli 2026.

Tujuan pengukuran indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan adalah untuk memastikan bahwa label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar di masyarakat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesesuaian label tersebut diharapkan dapat menjamin tersampainya informasi yang benar, jelas, dan lengkap sebagai bentuk peringatan kesehatan kepada masyarakat, sehingga mendukung upaya pengendalian produk tembakau dan/atau rokok elektronik serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan penurunan prevalensi merokok.

Indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 75%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian sebesar 79,91%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 106,55% dan berada pada kategori sangat baik. Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi pengukuran indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara Jumlah “Label Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Label Kemasan” dan “Sampel Produk Tembakau yang diperiksa yang memenuhi ketentuan” terhadap keseluruhan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang disampling dan Sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah sebesar 83%, capaian indikator pada Tahun 2025 sebesar 96,28% dan berada pada kategori akan tercapai. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah berjalan dengan baik sesuai arah

kebijakan. Kinerja ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian target Renstra yang telah ditetapkan. Untuk indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik tidak memiliki indikator pembandingan dengan komoditi lain, sehingga capaian penilaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan indikator komoditi lain.

Tabel 3. 20 Capaian Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	106,27%	105,33%	106,48%	106,55%	-	96,28% (Akan Tercapai)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- Pelaksanaan kegiatan perkuatan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik untuk UPT BPOM yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas pengawas UPT BPOM terkait kebijakan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik oleh Badan POM, serta menyamakan persepsi antara petugas pusat dengan petugas UPT BPOM dalam hal ketentuan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik yang akan berdampak pada pengawasan yang dilakukan lebih konsisten dan terstandar.
- Pelaksanaan kegiatan intensifikasi pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik bersama UPT BPOM yang dilakukan dalam rangka percepatan perkuatan kapasitas petugas UPT BPOM melalui bimbingan teknis secara intensif pendampingan langsung pelaksanaan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik di lapangan, serta melibatkan lintas sektor terkait guna mendukung efektivitas pengawasan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala atas hasil pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik dilakukan untuk mengidentifikasi tren pengawasan

serta menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pengawasan agar lebih efektif.

Sebagai upaya perbaikan ke depan dalam pemenuhan indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan melalui program/kegiatan:

- a. Pelaksanaan sosialisasi peraturan terbaru kepada industri/importir produk tembakau dan rokok elektronik secara lebih masif mengenai ketentuan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi lainnya pada label kemasan produk tembakau dan rokok elektronik untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan industri/importir produk tembakau dan rokok elektronik.
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas UPT BPOM secara berkelanjutan melalui kegiatan bimbingan teknis pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik.
- c. Penyempurnaan kebijakan pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Tembakau sebagai upaya ketersediaan petunjuk yang lebih jelas dan aplikatif sesuai dengan regulasi terbaru yang dapat digunakan oleh petugas pengawas UPT BPOM untuk dapat melakukan pengawasan yang lebih konsisten dan terstandar.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik yang dilakukan oleh UPT BPOM secara berkala agar kualitas dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik dapat meningkat.
- e. Penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan Badan POM dalam pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien, terpadu, dan tepat sasaran sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha yang mendukung ketercapaian indikator.

Tabel 3. 21 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	- Masih adanya variasi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan, - Luasnya cakupan distribusi produk yang memerlukan prioritas pengawasan berbasis risiko, - Kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika perubahan regulasi pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik - Serta petugas pengawasan produk tembakau di UPT sering berganti sehingga perlu pelatihan yang menyeluruh mengenai penerapan regulasi pelabelan produk tembakau dan/atau rokok elektronik dan harmonisasi metode pemeriksaan	- Sosialisasi peraturan terbaru kepada industri/impor tir produk tembakau dan rokok elektronik secara lebih masif mengenai ketentuan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi lainnya pada label kemasan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. - Bimbingan teknis pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik kepada petugas UPT BPOM mengenai peraturan terbaru. - Penyusunan draft revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Tembakau. - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan rokok	- Sosialisasi peraturan terbaru kepada industri/impor tir produk tembakau dan rokok elektronik secara lebih masif mengenai ketentuan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi lainnya pada label kemasan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. - Bimbingan teknis pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik kepada petugas UPT BPOM mengenai peraturan terbaru. - Penyusunan draft revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Tembakau. - Melakukan monitoring dan	TW IV 2026	Y	0-3	Tidak terlaporkannya contoh kemasan dan hasil pengujian nikotin dan/tar produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar kepada Badan POM

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			elektronik yang dilakukan oleh UPT BPOM agar mengirimkan laporan secara lengkap dan tepat waktu. 5. Komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif dengan Pusdatin terkait pengembangan aplikasi SIPT untuk pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik.	evaluasi terhadap pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik yang dilakukan oleh UPT BPOM agar mengirimkan laporan secara lengkap dan tepat waktu. 5. Komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif dengan Pusdatin terkait pengembangan aplikasi SIPT untuk pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik.				

8) Persentase Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Indikator ini mendukung Sasaran Program yakni “Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT”. Target tahunan untuk indikator ini adalah:

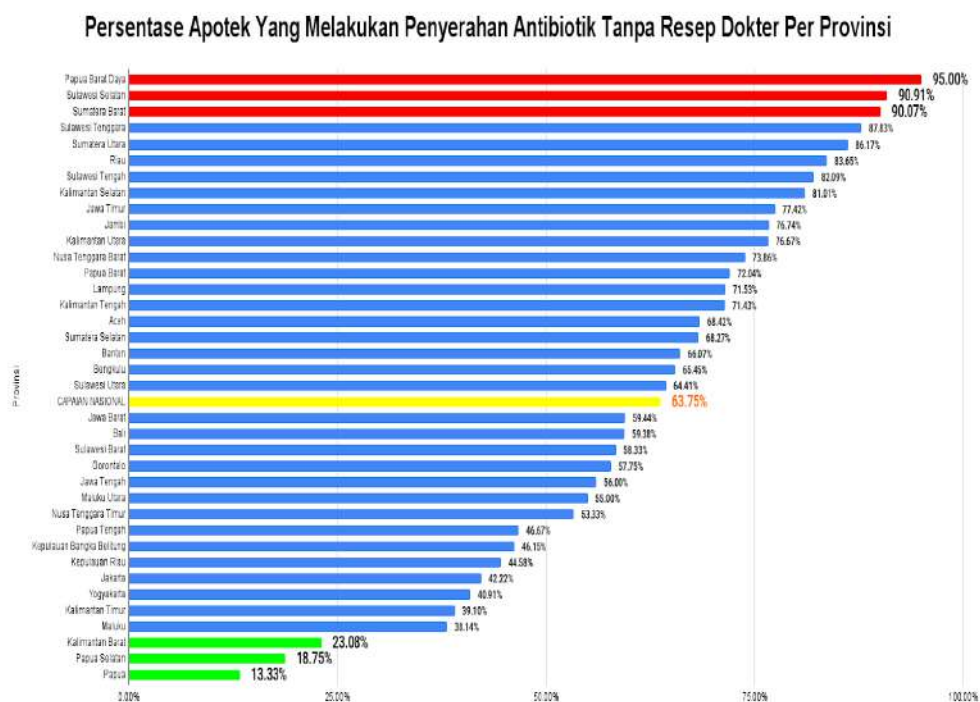
Tabel 3. 22 Target Tahunan Indikator Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter tahun 2025-2029

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Target Penurunan	4,9%	5,1%	7,7%	8,3%	9,1%
Persentase Jumlah Apotek Menyerahkan tanpa Resep Dokter	68,5%	65,0%	60,0%	55,0%	50,0%

Target tersebut dihitung berdasarkan baseline data senilai 72%. Angka tersebut adalah target tahun 2024 yang tertuang dalam Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian AMR di Lingkungan Badan POM Tahun 2020–2024.

Berkaitan dengan perhitungan capaian Persentase Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter, beberapa data yang terkait antara lain:

- Jumlah Apotek yang diperiksa dengan tools pemeriksaan antibiotik Tahun 2025 sebanyak 3.041 Apotek.
- Persentase apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter tahun 2025 dari seluruh provinsi di Indonesia adalah:



Gambar 3. 5 Persentase Apotek Yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Per Provinsi

- c. Persentase apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter dihitung dari perbandingan jumlah apotek yang teridentifikasi menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter dibandingkan dengan jumlah apotek yang diperiksa menggunakan *tools* pemeriksaan antibiotik.
- d. Persentase tersebut pada tahun 2025 secara nasional adalah sebesar 63.75%, sedangkan persentase tahun 2024 adalah 70.59%.
- e. Perhitungan realisasi Penurunan Persentase Penurunan Apotek Yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter adalah:

$$\frac{\{70.59 - 63.75\}}{70.59} \times 100\% = 9.69\%$$

Tercapai melebihi target 2025, yakni 9.69%

- f. Capaian Penurunan Persentase Penurunan Apotek Yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter adalah $(9.69\%/4.9\%) \times 100\% = 197,76\%$ (Tidak Dapat Disimpulkan)

Tabel 3. 23 Capaian Persentase Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	-	-	-	197,76%	-	106,48% (Tercapai/ Melampaui)

Berdasarkan analisis terhadap penyusunan hingga proses realisasi terhadap IKU tersebut, tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Karakteristik IKU AMR sebagai indikator baru yang belum memiliki baseline yang stabil.
- b. Penurunan IKU pengendalian AMR sebagai IKU turunan di level UPT mendorong seluruh UPT untuk melaksanakan secara intensif kegiatan yang menjadi komponen

penilaian IKU, sehingga intervensi pengendalian AMR dilakukan secara masif, serentak, dan terkoordinasi, serta berdampak signifikan terhadap penurunan penyerahan antibiotika tanpa resep dokter dalam waktu relatif singkat.

- c. Intervensi tidak hanya dilakukan di internal BPOM namun juga terhadap pihak eksternal. Terdapat dua komponen yang merupakan intervensi kepada pihak eksternal dalam IKU program pengendalian AMR di level UPT yakni:
1. Advokasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan program pengendalian AMR. Sampai dengan tahun 2024, surat edaran pengendalian AMR dari Pemda sebanyak 13 (tiga belas). Jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2025, bertambah 94 (sembilan puluh empat) surat edaran yang diterbitkan Pemda.
 2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dengan memperluas jangkauan bimbingan teknis kepada apoteker, tenaga kesehatan maupun pelaku usaha, sehingga semakin banyak yang terpapar edukasi pengendalian AMR dan terdorong untuk menerapkan praktik penyerahan antibiotik yang lebih sesuai ketentuan.

Perubahan kebijakan dan intensifikasi intervensi tersebut memicu peningkatan kepatuhan secara cepat (*compliance shock*), yang tercermin dari perubahan perilaku sarana pelayanan kefarmasian dalam praktik penyerahan antibiotika.

Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas intervensi pengendalian AMR, namun sekaligus menyebabkan capaian IKU yang sangat tinggi dan belum sepenuhnya mencerminkan pola peningkatan kinerja yang stabil dan berkelanjutan. Indikator pengendalian AMR telah diimplementasi pada semester 2 tahun 2025 dan telah didapatkan gambaran capaian dari setiap IKU yang dapat menjadi baseline dan bahan pertimbangan dalam mengusulkan perubahan target IKU pengendalian AMR.

9) Persentase Sentra Uji Klinik dan Bioekivalensi yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan adalah indikator untuk melihat efektifitas pengawasan terhadap sentra uji klinik dan bioekivalensi sehingga pelaksanaan uji klinik dan sentra untuk pelaksanaan uji bioekivalensi sesuai ketentuan. Indikator ini dihitung dari jumlah sentra uji klinik dan uji bioekivalensi yang di inspeksi yang memenuhi ketentuan / tidak diberikan sanksi

dibandingkan dengan jumlah sentra uji klinik dan bioekivalensi yang diinspeksi. Tujuan dari pengawasan melalui inspeksi Sentra uji klinik dan bioekivalensi adalah agar pelaksanaan uji klinik dan uji bioekivalensi di sentra memenuhi pedoman Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB)

Capaian pada tahun 2025 ini sebesar 101, 56%, angka ini didapatkan dari realisasi sebesar 81,25% dari target 80%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2025-2029 maka potensinya adalah akan tercapai karena pada tahun 2025 sudah mencapai 96,73%

Tabel 3. 24 Pencapaian Capaian Persentase Sentra Uji Klinik dan Bioekivalensi yang Memenuhi Ketentuan per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan	-	-	96,15%	101,56%	-	96,73% (Akan Tercapai)

Tercapainya target pada 2025 ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- Dengan adanya asistensi regulatori mengenai Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dan pemenuhan pelaksanaan uji bioekivalensi terjadi peningkatan kepatuhan sentra uji klinik dan Bioekivalensi.
- Kecepatan evaluasi terhadap hasil inspeksi berdampak pada pemenuhan timeline penyampaian hasil inspeksi kepada sentra uji klinik dan uji bioekivalensi.
- Respon dan ketepatan sentra uji klinik dan uji bioekivalensi dalam menyampaikan CAPA /hasil perbaikan terhadap hasil inspeksi

Dengan terlampauinya target pada tahun 2025, diperlukan upaya-upaya untuk menjaga implementasi penerapan pedoman CUKB di sarana uji klinik dan uji bioekivalensi ke depan antara lain:

- Penguatan kegiatan asistensi regulatori;
- Forum komunikasi dengan sentra uji klinik, sentra bioekivalensi dan peneliti; dan
- Mapping dan recognisi sentra uji klinik dan sentra uji bioekivalensi.

SP 2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Sasaran program “SP 2 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu” memiliki capaian kinerja sebesar 99.43% termasuk dalam kategori Baik, program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik.

Tabel 3. 25 Capaian IKSP pada SP2 Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

SP2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu							
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian	Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
1.	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90,6	90,08	99,43	Baik	103,36%	98,99% (Akan Tercapai)

10) Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat yang Aman dan Bermutu

BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Kesadaran masyarakat ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kadaluarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep service quality yang mengacu pada

proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM.

Survey indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Pengukuran indeks kesadaran masyarakat dibentuk melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PUSAKOM.

Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu tahun 2025 adalah sebesar 90,08 dengan capaian 99,43% dibandingkan target 2025 dan kategori capaian **BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran program dengan baik.

Tabel 3. 26 Pencapaian Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	-	-	-	99,43%	103,36%	98,99% (Akan Tercapai)

Berikut ini perbandingan nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu di Bidang Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II), dan Nilai Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Makanan (Deputi III) menunjukkan bahwa nilai Indeks kesadaran masyarakat dibidang obat menempati urutan tertinggi. Perbandingan ketiga komoditi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Nilai Indeks antar Deputi

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Obat	90,60	90,08	99,43
2	Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,87	88,89	102,33

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Pangan Olahan	86,87	87,69	98.86
4	Nasional	88,20	89,00	100,91

Jika dilihat dari capaian kinerja indeks kesadaran masyarakat di bidang Obat dapat disampaikan beberapa kendala/hambatan yang dihadapi IKSP, sebagai berikut:

- Pengetahuan terhadap produk obat sangat baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran masyarakat terkait adanya Nomor Izin Edar (NIE).
- Mayoritas masyarakat menganggap penting adanya informasi nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa yang terdapat pada produk obat, namun sebagian masyarakat masih menganggap kondisi kemasan dan membaca informasi pada label (efek samping, petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan) tidak penting dan biasa saja.
- Perilaku masyarakat yang perlu menjadi perhatian adalah dalam membaca informasi pada label. Mayoritas masyarakat beranggapan jika sudah terdapat informasi kedaluwarsa maka produk aman.

Adapun program/kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka tindak lanjut kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Melaksanakan optimalisasi dan efektivitas program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan merumuskan strategi yang adaptif, dan mengubah pendekatan dengan model yang terdiferensiasi dan terfokus.
- Pelaksanaan intensifikasi kepada masyarakat dalam hal peningkatan cek NIE melalui penggunaan BPOM Mobile, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembacaan label dan pengecekan kemasan produk Obat.
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat.

Rekomendasi untuk meningkatkan Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 28 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	01-Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	Kendala yang dihadapi : 1) Pengetahuan terhadap produk obat sangat baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran masyarakat terkait adanya Nomor Izin Edar (NIE). 2) Mayoritas masyarakat menganggap penting adanya informasi nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa yang terdapat pada produk obat, namun sebagian masyarakat masih menganggap kondisi kemasan dan membaca informasi pada label (efek samping, petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan) tidak penting dan biasa saja. 3) Perilaku masyarakat yang perlu menjadi perhatian adalah dalam membaca informasi pada label. Mayoritas masyarakat beranggapan jika sudah terdapat informasi kedaluwarsa	1) Melaksanakan optimalisasi dan efektivitas program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan merumuskan strategi yang adaptif, dan mengubah pendekatan dengan model yang terdiferensiasi dan terfokus. 2) Pelaksanaan intensifikasi kepada masyarakat dalam hal peningkatan cek NIE melalui penggunaan BPOM Mobile, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembacaan label dan pengecekan kemasan produk Obat. 3) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat.	1) Meningkatkan fokus KIE dari peningkatan pengetahuan menuju perubahan perilaku masyarakat , 2) Meningkatkan persentase masyarakat yang melakukan pengecekan Nomor Izin Edar (NIE) melalui integrasi edukasi penggunaa n BPOM Mobile dalam setiap kegiatan KIE dan kampanye digital.	Sepanjang 2026	Y	S-5	Pelaksanaan penyusunan dan publikasi materi KIE tidak sesuai dengan jadwal kegiatan dalam perencanaan

	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		maka produk aman.						

SP3. Meningkatnya Efektifitas *Regulatory Assistance* dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Capaian SP-3 disusun atas komponen 2 IKSP: (1) Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar; (2) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya. Sehingga nilai capaian SP-3 akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian masing-masing IKSP penyusun tersebut.

Sasaran program “Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan” memiliki capaian kinerja sebesar 103,80% termasuk dalam kategori Sangat Baik, Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran program dengan baik (>100%).

Tabel 3. 29 Capaian IKSP pada SP3. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

SP3. Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
1	Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75%	74,57%	99,42	Baik	
2	Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52%	56,25%	108,17	Sangat Baik	
Capaian SP 5				103,80	Sangat Baik	

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun **SP3**.

11) Persentase Pengawasan Hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai Standar

Banyak inovasi gagal karena tidak selaras dengan persyaratan regulasi sejak awal. Pendekatan *regulatory strengthening* dan *early engagement* antara peneliti, industri, dan regulator membantu memastikan desain penelitian, data klinik, serta dokumentasi mutu telah sesuai standar, sehingga menghindari pemborosan sumber daya dan waktu.

Hilirisasi Obat Pengembangan Baru perlu dikawal secara ketat dan terintegrasi karena proses ini bukan sekadar memindahkan hasil riset ke tahap produksi, tetapi memastikan bahwa inovasi benar-benar menjadi produk yang aman, berkhasiat, bermutu, dan dapat diakses masyarakat, serta berdaya saing secara global. Hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian farmasi, ketahanan kesehatan nasional, dan daya saing global.

Pada Tahun 2025, indikator **Persentase Pengawasan Hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai Standar** ditetapkan dengan target sebesar **75%**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator mencapai **74,57%**, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar **99,42%** dan berada pada kategori **baik**. Capaian indikator ini mengawal proses hilirisasi obat pengembangan baru mulai dari kesiapan fasilitas produksi hingga tahapan perolehan izin edar. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi dan berbasis risiko telah mendorong keterlaksanaan sebagian besar tahapan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah sebesar 87%, capaian indikator ini telah mencapai 85,71%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengawasan hilirisasi obat pengembangan baru telah mendekati target Renstra dan berada pada jalur yang selaras dengan sasaran jangka menengah, meskipun masih diperlukan penguatan pada keterlaksanaan pengawasan seluruh tahapan pengembangan produk

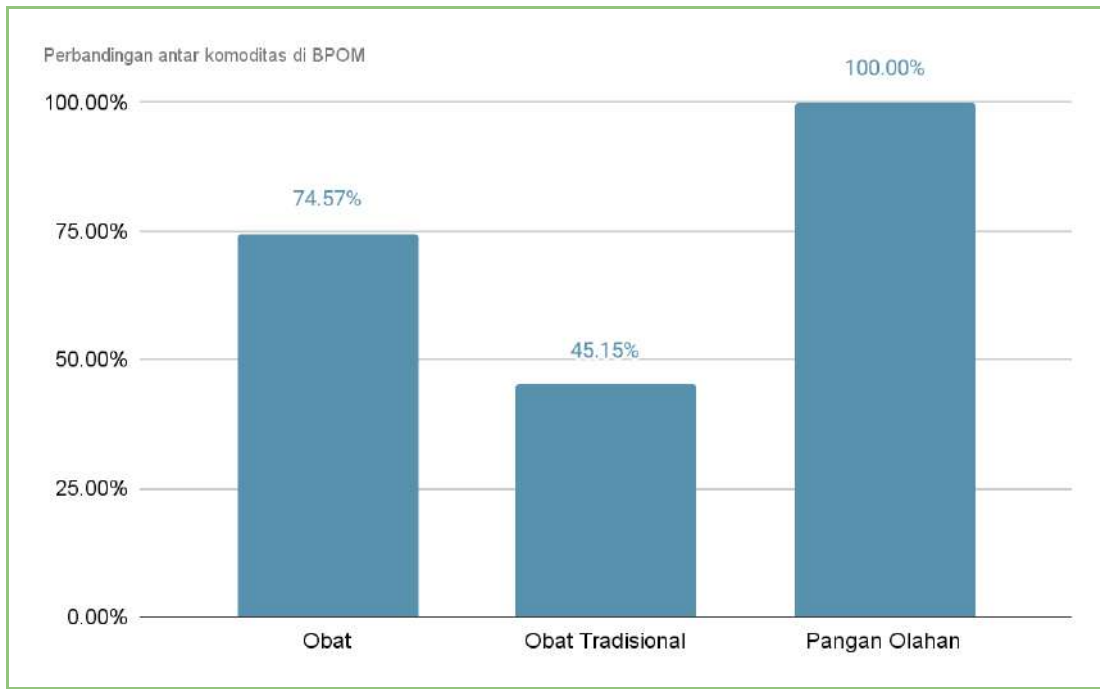
Tabel 3. 30 Capaian Kinerja Persentase Pengawasan Hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai Standar per TW Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase Pengawasan Hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai Standar	102,35%	90,56%	87,89%	99,42%	-	85,71% (Akan Tercapai)

Dalam perbandingan capaian antar komoditas, komoditas obat mencatat realisasi sebesar 74,57% dengan capaian 99,42%, yang menunjukkan keterlaksanaan pengawasan hilirisasi obat pengembangan baru hampir sepenuhnya sesuai standar. Sementara itu, komoditas Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang dikelola sebagai satu indikator menunjukkan capaian sebesar 106,38%, yang mencerminkan keterlaksanaan pengawasan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada komoditas Pangan Olahan, pengawasan hilirisasi telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai standar dengan capaian 100%. Adapun untuk komoditas Kosmetik, indikator pengawasan hilirisasi obat pengembangan baru tidak diterapkan sehingga tidak terdapat realisasi capaian. Secara keseluruhan, perbedaan capaian antar komoditas dipengaruhi oleh karakteristik produk, kompleksitas tahapan pengembangan, serta keterlaksanaan kegiatan pengawasan pada masing-masing komoditas. Perbandingan capaian antar komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 31 Perbandingan antar Komoditas di BPOM

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Obat	75%	74,57%	99,42%
2	Obat Tradisional	41,50%	45.15%	108.80%
3	Suplemen Kesehatan	N/A	N/A	N/A
4	Kosmetik	N/A	N/A	N/A
5	Pangan Olahan	100%	100%	100%



Gambar 3. 6 Grafik Perbandingan antar Komoditas di BPOM

Dalam upaya pencapaian indikator, secara umum tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, capaian indikator pada tahap awal pelaksanaan belum sepenuhnya optimal karena jumlah penyebut indikator yang masih relatif terbatas, seiring dengan tahapan pengembangan obat yang masih berjalan. Selain itu, ruang lingkup intervensi indikator yang mencakup tahapan tertentu hingga penerbitan persetujuan pelaksanaan uji klinik turut mempengaruhi tingkat capaian indikator, mengingat masih terdapat pengajuan obat pengembangan baru yang dalam proses pemenuhan tambahan data dan dokumen pendukung.

Kondisi tersebut memerlukan penguatan asistensi regulatori kepada peneliti dan pengembang obat agar pemenuhan data, hasil pengembangan, serta pelaksanaan uji klinik dapat berjalan sesuai dengan kaidah riset dan ketentuan regulasi yang berlaku. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peningkatan koordinasi, pendampingan teknis yang lebih terarah, serta pemantauan tahapan pengembangan obat secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan pengawalan hilirisasi dapat berlangsung secara lebih optimal.

Tabel 3.32 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	02-Persentase Pengawasan Hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang Dikawal Sesuai Standar	Indikator ini target dari unit kerja Direktorat Registrasi Obat diturunkan dari 70% menjadi 50% karena tahapan yang bisa diintervensi adalah sampai penerbitan persetujuan pelaksanaan uji klinik (50% dr tahapan obat pengembangan baru).	1. Melanjutkan kegiatan pendampingan seperti asistensi regulatori, onsite, desk pra sertifikasi, dan melakukan inspeksi sertifikasi CPOB. 2. Pendampingan dan asistensi regulatori kepada peneliti untuk pemenuhan data dan hasil pengembangan/penelitian sesuai kaidah riset dan uji klinik masih diperlukan pembahasan dengan tim ahli dalam mereviu progres pengembangan	1. pelaksanaan asistensi regulatori, onsite, desk pra sertifikasi, dan melakukan inspeksi sertifikasi CPOB. 2. Pendampingan dan asistensi regulatori kepada peneliti untuk pemenuhan data dan hasil pengembangan/penelitian sesuai kaidah riset dan uji klinik	TW IV 2025	Y	S-3	Kolaborasi Sinergisme perkuatan Pelayanan Publik dalam rangka percepatan akses obat inovasi di Indonesia tidak terlaksana

12) Persentase Industri Farmasi yang Meningkatkan Level Maturitasnya

Pada Tahun 2025, indikator **Persentase Industri Farmasi yang Meningkatkan Level Maturitasnya** ditetapkan dengan target sebesar **52%**. Berdasarkan hasil penilaian maturitas industri farmasi, realisasi indikator sebesar **56,25%**, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar **106,25%** dan berada pada kategori **sangat baik**. Berdasarkan sumber data, dari 16 industri farmasi produk jadi yang telah memiliki sertifikat CPOB dan diverifikasi pada tahun berjalan, terdapat 9 industri yang mengalami peningkatan level maturitas minimal satu tingkat dibandingkan hasil penilaian sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar industri

farmasi yang dinilai telah mampu meningkatkan tingkat kematangan sistem mutu dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Capaian indikator ini didukung oleh meningkatnya pemahaman dan komitmen industri farmasi dalam menerapkan CPOB secara lebih komprehensif, termasuk penerapan manajemen risiko mutu, pelaksanaan CAPA yang lebih sistematis, serta inisiatif industri dalam melakukan penilaian mandiri (self assessment) dan perbaikan berkelanjutan. Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan turut mendorong industri farmasi untuk bertransformasi dari pendekatan reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif dalam pemenuhan ketentuan regulasi.

Jika dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah sebesar 60%, capaian indikator Persentase Industri Farmasi yang Meningkatkan Level Maturitasnya mencapai 93,75% dan berada pada kategori Akan Tercapai. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan level maturitas industri farmasi telah berada pada jalur yang selaras dengan sasaran Renstra serta mencerminkan efektivitas upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan.

Tabel 3. 33 Capaian Persentase Industri Farmasi yang Meningkatkan Level Maturitasnya Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Persentase Industri Farmasi yang Meningkatkan Level Maturitasnya	-	-	-	108,17%	-	93,75% (Akan Tercapai)

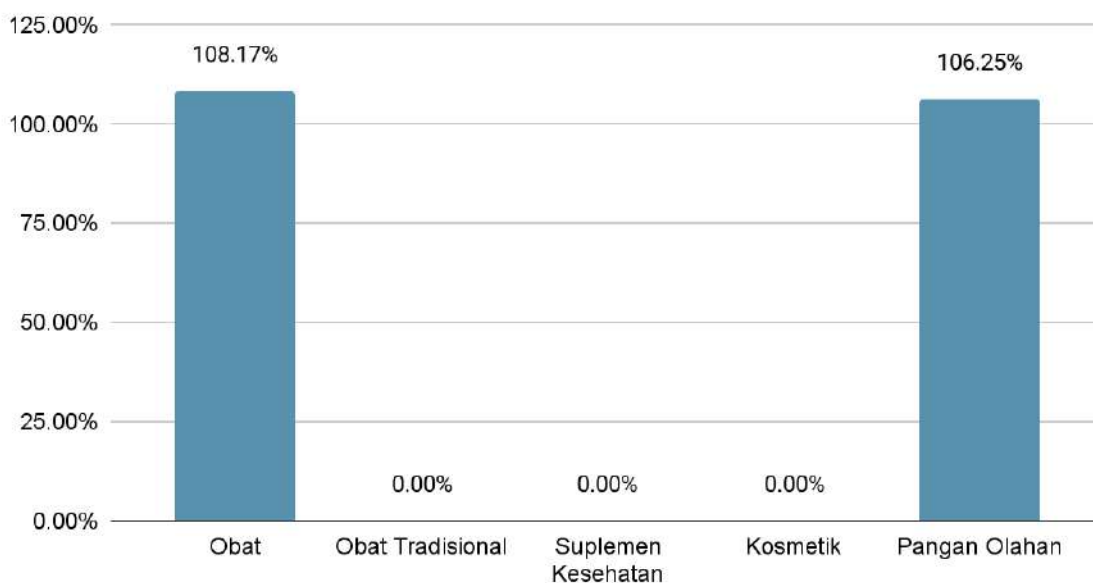
Berdasarkan perbandingan capaian antar komoditi, obat mencatat realisasi sebesar 56,25% dengan capaian 108,17%, sedangkan komoditi Pangan Olahan mencapai realisasi 20,19% dengan capaian 106,25%, yang menunjukkan kinerja positif pada komoditi yang kegiatannya dapat dilaksanakan. Sementara itu, untuk komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, tergabung dalam 1 (satu) dengan target 34%, namun pada Tahun 2025 belum terdapat realisasi capaian. Kondisi

tersebut disebabkan oleh anggaran kegiatan yang mengalami blokir secara penuh, sehingga pelaksanaan penilaian dan pendampingan peningkatan level maturitas pada komoditi dimaksud belum dapat dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, perbandingan capaian antar komoditi menunjukkan bahwa variasi capaian lebih dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan anggaran dan keterlaksanaan kegiatan, bukan oleh perbedaan kinerja implementasi di tingkat industri. Perbandingan capaian indikator berdasarkan komoditi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 34 Perbandingan realisasi antar komoditas di BPOM

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian
1	Obat	52%	56,25%	108,17%
2	Obat Tradisional	34%	N/A	N/A
3	Suplemen Kesehatan	34%	N/A	N/A
4	Kosmetik	34%	N/A	N/A
5	Pangan Olahan	19%	20,19%	106,25%

Grafik Perbandingan Capaian Persentase Industri Farmasi yang Meningkatkan Level Maturitasnya di BPOM



Gambar 3. 7 Grafik Perbandingan Capaian antar Komoditas di BPOM

Keberhasilan pencapaian target Persentase Industri Farmasi yang Meningkatkan Level Maturitasnya dipengaruhi oleh sejumlah kendala pada tahap awal pelaksanaan, terutama terkait ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan on-site antara tim penilaian maturitas dan industri farmasi, serta perlunya penyesuaian ketersediaan

jadwal narasumber atau tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan pendampingan dan asistensi teknis. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya intensitas pendampingan pada sebagian industri pada periode awal pelaksanaan.

Di sisi lain, upaya dalam mendorong peningkatan kinerja indikator ini akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pendampingan dan asistensi teknis yang dilakukan secara terstruktur oleh tim penilaian maturitas, penguatan koordinasi dengan manajemen industri farmasi yang diintervensi, serta pemanfaatan tools penilaian maturitas industri farmasi sebagai instrumen untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan.

SP 04 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal” disusun atas komponen 5 IKSP, yaitu: (1) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat; (2) Nilai Pembangunan ZI Deputy 1; (3) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA; (4) Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1 dan (5) Indeks Manajemen Risiko Deputy 1. Capaian SP4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Optimal tahun 2025 sebesar **99,24%** termasuk dalam kategori **BAIK**.

Tabel 3. 35 Capaian IKSP pada Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA yang Optimal

SP 04 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal				
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,68	4,84	103,42
2.	Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	92,9	90,90	97,85
3.	Nilai AKIP Deputy 1	81,47	78,23	96,02
4.	Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1	5	5	100,00
5.	Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	2,97	2,938	98,92
Capaian SP 04				99,24

13) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat

Penilaian IPP terhadap Unit Kerja dilakukan secara internal oleh Biro Hukor BPOM dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil penilaian IPP di lingkungan kedeputan 1 dilakukan terhadap 4 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dengan hasil sebagai Berikut:

Tabel 3. 36 Indeks Pelayanan Publik Unit Teknis Kedeputan 1

Unit	Nilai IPP
Dit. Registrasi Obat	4.79
Dit. Pengawasan KMEI ONPPZA	4,88
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4.9
Dit. Pengawasan Produksi ONPP	4,78
Deputi 1	4,84

Nilai realisasi sebesar 4.84 (capaian 103,42 %) ini telah dapat melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan yaitu target 4,68 dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3. 37 Capaian Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

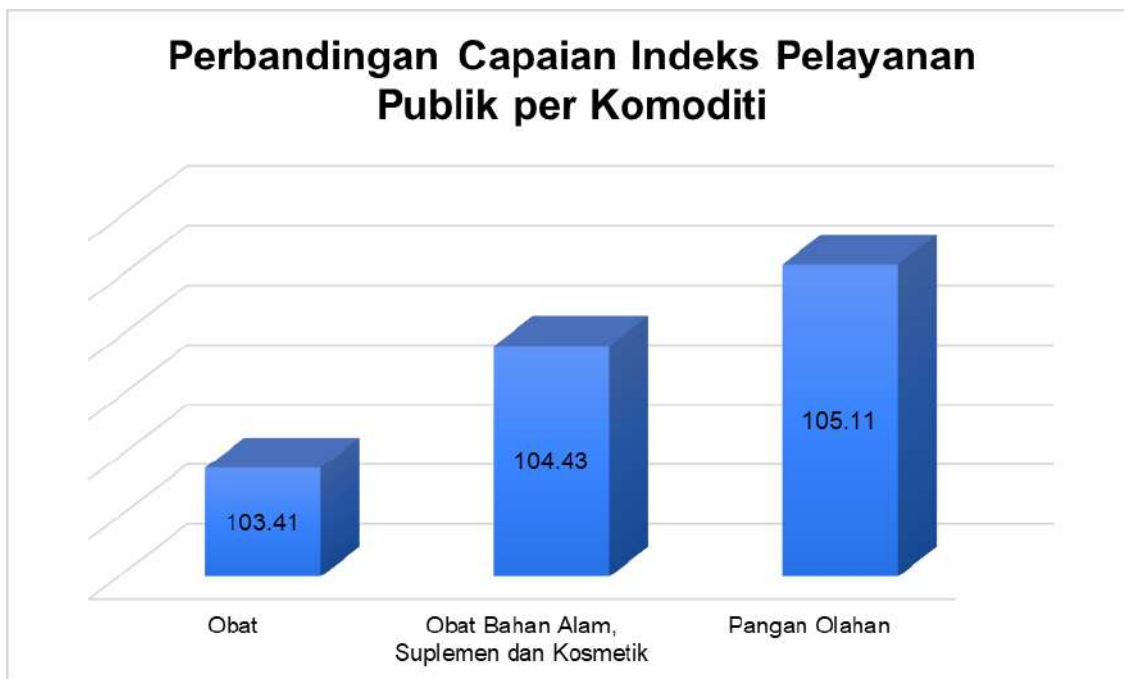
IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	-	-	-	103,42%	103,57%	99,18 % (Akan Tercapai)

Jika dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah sebesar 4,88, capaian indikator Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat mencapai 99,18% dan berada pada kategori Akan Tercapai. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dengan berbagai kegiatan pendukung selaras dengan pencapaian target Renstra.

Tabel 3. 38 Perbandingan realisasi antar komoditas di BPOM

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Obat	4,68	4,84	103,41
2	Obat Bahan Alam, Suplemen	4.70	4,90	104,43

	dan Kosmetik			
3	Pangan Olahan	4.69	4,93	105,11



Gambar 3. 8 Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Obat Dibandingkan dengan Komoditi Lain.

Dari grafik yang dibandingkan dengan komoditi lain, capaian indeks pelayanan publik komoditi obat paling rendah meskipun telah mencapai target, hal ini dipengaruhi oleh nilai realisasi dari unit-unit yang memiliki layanan publik.

Keberhasilan tercapainya IKSP Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat didukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu:

- Adanya pemutakhiran standar pelayanan untuk semua jenis layanan
- Publikasi layanan publik di semua media (media daring dan cetak)
- Kemudahan akses konsultasi baik secara tatap muka maupun online melalui live chat, whatsapp, email dan kanal layanan konsultasi lainnya
- Peningkatan sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan publik dengan pengembangan sistem yang lebih mempermudah pelaku usaha misalnya pengembangan pada aplikasi new-aero (registrasi obat), e-bpom (layanan ekspor impor), e-sertifikasi, dan Siapik
- Pelatihan kepada petugas layanan publik agar memiliki kompetensi khususnya dalam penanganan keluhan pelanggan, service of excellent dan peningkatan kompetensi lain yang relevan

1) Forum Konsultasi Standar Pelayanan Publik



3) Pelatihan pelayanan publik bagi petugas



4) Asistensi Regulatori Obat Terpadu



5) Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Obat dan NPPZA melalui kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dengan telah dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Jakarta tanggal 9 Desember 2025.



Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Ditwasprod ONPP untuk menghadirkan layanan yang semakin adil, inklusif, cepat, dan profesional.

Dalam kegiatan ini, turut mengundang berbagai pemangku kepentingan—pelaku usaha, asosiasi, media, organisasi masyarakat, hingga instansi terkait—untuk membahas:

1. Pelayanan publik inklusif bagi kelompok rentan
2. Peningkatan kualitas layanan Ditwasprod ONPP
3. Rancangan standar pelayanan publik dan pengumpulan masukan

Output dialog yang produktif pada kesempatan kali ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang pentingnya pelayanan publik, tapi juga menegaskan komitmen kolektif Ditwasprod ONPP dalam menciptakan ekosistem kesehatan nasional yang tangguh dan berdaya saing.

6) Tanggal 28 Mei 2025 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, dan Prekursor menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait layanan Sertifikasi DCOB dengan mengundang instansi terkait, asosiasi, akademisi, media massa, PBF, dan Perwakilam Masyarakat.

FKP merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan dengan menjaring masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Sertifikat CDOB. Selain itu, FKP juga berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk mempublikasikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 beserta tindak lanjutnya.



Gambar 3. 9 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat

14) Nilai Pembangunan ZI Deputy 1

Pengukuran Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dilakukan sebagai instrumen objektif untuk menilai efektivitas penerapan reformasi birokrasi, penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta internalisasi budaya integritas dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat, NPPZA yang memiliki tingkat risiko tinggi. Pengukuran ini tidak hanya mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM dan peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga

berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas kinerja dalam kerangka SAKIP dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), sekaligus menjaga kredibilitas kelembagaan dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, Nilai capaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA tercatat sebesar 97,85%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam implementasi reformasi birokrasi, penguatan pengendalian internal, serta internalisasi budaya integritas di lingkungan kerja. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi tahun 2025 telah mencapai 93,63% dan berada dalam kategori akan tercapai, yang mengindikasikan bahwa strategi penguatan integritas dan pembangunan Zona Integritas berjalan konsisten dan berada pada jalur yang tepat. Capaian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Deputi dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.

Tabel 3. 39 Capaian Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA	-	-	-	97,85%	-	93,63 % (Akan Tercapai)

Dari hasil evaluasi LKE pembangunan ZI yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI), pada tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA berhasil mencapai Indeks pembangunan ZI sebesar 90,90 (capaian 97,85%). Nilai tersebut berasal dari rata-rata atas nilai realisasi unit-unit kerja di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 40 Nilai Realisasi IKSP Indeks ZI Unit Teknis di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025

Unit	Realisasi Indeks RB 2025
Direktorat Standardisasi Obat NPPZA	92.34

Direktorat Registrasi Obat	88.07
Direktorat Pengawasan KMEI Obat NPPZA	90,84
Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP	92,96
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	90,30
Rata-Rata Nilai Unit di Kedeputan 1 = Indeks RB Deputy 1	90.90

Tabel 3. 41 Pencapaian Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dibandingkan dengan target tahun Tahun 2025

SP.4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal				
IKSP	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	92.9	90.90	97.85	Sangat Baik
Capaian SP 4				

Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menunjukkan capaian yang baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 92,9, realisasi yang diperoleh mencapai 90,90 dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,85% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Hasil ini mencerminkan bahwa implementasi reformasi birokrasi, penguatan pengendalian internal, serta internalisasi budaya integritas di lingkungan Deputy telah berjalan efektif dan konsisten dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Selanjutnya, untuk melihat performa kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dibandingkan dengan satker sejenis, berikut ini ditampilkan grafik perbandingan realisasi, masing-masing Kedeputan.

Tabel 3. 42 Perbandingan realisasi antar komoditas di BPOM

No.	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Obat	92,90	90,90	97,85

2	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	89,96	90,154	100,22
3	Pangan Olahan	9151	91,36	99,84

Berikut ini merupakan analisis penyebab kegagalan terhadap capaian indikator Nilai Pembangunan ZI di Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA dan upaya perbaikan/penyempurnaan yang akan dilakukan kedepan:

Adanya Komponen Penilaian Hasil yang masih belum MS atau belum lebih baik dari periode sebelumnya, hal ini dikarenakan :

- Pada tahun 2025, terdapat perbedaan mekanisme perhitungan persentase capaian indikator yang dihitung lebih baik dari persentase capaian indikator tahun sebelumnya.
- Peningkatan ini semakin terlihat karena target tahun 2024 disusun lebih tinggi dari realisasi tahun 2023, namun realisasi yang diraih pada tahun 2025 tetap menunjukkan nilai yang lebih baik dari tahun 2024.

Beberapa hal yang dapat disarankan sebagai upaya perbaikan/penyempurnaan kedepannya, diantaranya:

- Penguatan perencanaan berbasis target, menyusun target kinerja yang jelas, terukur, dan realistis.
- Penguatan komitmen dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran pegawai terhadap target dan tanggung jawab kinerja, dan penguatan budaya kerja berbasis hasil (*outcome-oriented*).
- pemanfaatan teknologi informasi dan penyederhanaan proses bisnis guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- Peningkatan kompetensi SDM, baik kapasitas teknis dan manajerial pegawai, serta pembelajaran berbasis kebutuhan tugas dan fungsi sehingga mampu bekerja dengan baik.

Tabel 3. 43 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1.	01-Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	Pada tahun 2025, terdapat perbedaan mekanisme perhitungan persentase capaian indikator yang dihitung lebih baik dari persentase capaian indikator tahun sebelumnya.	Peningkatan kompetensi SDM, baik kapasitas teknis dan manajerial pegawai, serta pembelajaran berbasis kebutuhan tugas dan fungsi sehingga mampu bekerja dengan baik.	Peningkatan kompetensi SDM	TW 4 tahun 2026	T	-	-
----	----------------------------------	---	--	----------------------------	-----------------	---	---	---

15) Nilai AKIP Deputy 1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu diukur sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), bukan sekadar kepatuhan administratif. Secara lebih rinci, pengukuran SAKIP penting untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara, mendorong orientasi kinerja dan hasil (*performance & outcome oriented*), sebagai alat evaluasi efektivitas kebijakan dan program, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, dan sesuai dengan reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik.

Tabel 3. 44 Pencapaian Capaian IKSP Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Deputy Bidang Pengawasan Obat				
No.	Komponen	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	20.16	20.16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18.48	18.48
3.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16.80	16.80
4.	Capaian Kinerja	20	15.56	12.71
Nilai Hasil Evaluasi		100	81.08	78.23
Predikat			A	BB

Tabel 3. 45 Capaian IKSP Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025

IKSP	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Deputy 1	81.47	78.23	98.95	Baik

Tabel 3. 46 Capaian Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025, Tahun Sebelumnya, dan Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

IKSP	Capaian Tahun 2025				Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
	TW 1	TW2	TW 3	TW 4		
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	-	-	-	97,85%	98,95%	94,22 % (Akan Tercapai)

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP pada Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2025, diperoleh Nilai Hasil Evaluasi sebesar 78,23 dengan predikat BB. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 2,85 poin dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 81,08 dengan predikat A.

Penurunan nilai SAKIP pada Tahun 2025 terutama disebabkan oleh penurunan pada komponen Capaian Kinerja, yang turun dari 15,56 pada Tahun 2024 menjadi 12,71 pada Tahun 2025 atau berkurang sebesar 2,85 poin. Sementara itu, empat komponen lainnya, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, menunjukkan nilai yang tetap dan konsisten dibandingkan tahun sebelumnya, tanpa mengalami kenaikan maupun penurunan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum sistem dan proses manajemen kinerja telah berjalan stabil, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek capaian kinerja, khususnya dalam memastikan ketercapaian target kinerja yang berorientasi pada hasil dan dampak, agar kinerja Deputy dapat kembali mencapai predikat A pada periode evaluasi berikutnya.

Apabila dibandingkan dengan Kedeputian lain di BPOM, berikut hasil realisasi dan capaian SAKIP Kedeputian 1 bila dibandingkan sesama kedeputian lain di BPOM:

Tabel 3. 47 Perbandingan capaian SAKIP Kedeputian 1 dibandingkan Kedeputian Lain di BPOM tahun 2025

No.	IKSP	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3	Deputi 4
1.	Nilai AKIP	78.23	79,26	79.61	74,92

Berikut rekomendasi perbaikan kinerja ke depan yang fokus, realistis, dan selaras dengan kerangka SAKIP, dengan penekanan utama pada pemulihan komponen Capaian Kinerja agar predikat dapat kembali meningkat:

a. Penguatan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala.

Pemantauan kinerja perlu dilakukan secara periodik dan berbasis data, tidak hanya pada akhir tahun. Hasil monitoring digunakan sebagai early warning system untuk mengidentifikasi deviasi capaian sejak dini dan melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan.

b. Penguatan peran pimpinan dalam manajemen kinerja.

Pimpinan unit kerja diharapkan semakin aktif dalam mengawal pencapaian target kinerja, memastikan konsistensi pelaksanaan program dengan rencana kinerja, serta mendorong budaya kerja yang berorientasi hasil. Kepemimpinan yang kuat menjadi faktor kunci dalam peningkatan capaian kinerja.

c. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Perlu ditingkatkan konsistensi antara perencanaan kinerja dan pengalokasian anggaran, sehingga sumber daya yang tersedia benar-benar mendukung pencapaian target prioritas dan berdampak signifikan terhadap kinerja Deputi.

d. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kinerja.

Penguatan kompetensi SDM dalam penyusunan indikator, analisis kinerja, dan pemanfaatan data perlu terus dilakukan, agar seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang seragam dan mampu mengelola kinerja secara profesional dan akuntabel.

Tabel 3. 48 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	02-Nilai AKIP Deputi 1	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan	Penguatan perencanaan kinerja dan pengalokasian anggaran, sehingga sumber daya yang tersedia benar-benar mendukung pencapaian target prioritas dan berdampak signifikan terhadap kinerja Deputi.	Penguatan perencanaan kinerja dan pengalokasian anggaran	TW IV 2026	Y	K-03	Tidak terlaksananya pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor ONPPZA dengan optimal

16) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 26 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus Berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)

Dalam pengukuran IKPA 2025 terdapat 3 aspek pengukuran yaitu 3 Aspek: 1) Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran (25%). 2) Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran (50%). 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%), dan nilai IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 IKSP, indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang nilai IKPA, sebagaimana tabel Berikut:

Tabel 3. 49 Tabel Ukuran Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	IKSP	2025	
		Bobot	Nilai Akhir
	Aspek kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10	10
2	Deviasi Hal III DIPA	15	11,10
	Aspek kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan anggaran	20	20
4	Belanja Kontraktual	10	10
5	Penyelesaian Tagihan	10	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	8,71
	Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
7	Capaian output	25	24.13
	Nilai Total	100	93,94
8	Pagu minus	0	0
	Nilai Akhir IKPA	100	93,94

Nilai Indeks Pelaksanaan Anggaran akhir tahun 2025 mendapatkan Nilai total sebesar 93,94%, IKSP pembentuk IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). antara lain:

1. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran. yang terdiri dari:

- a. Revisi DIPA mendapatkan nilai 100 dengan bobot 10% maka memperoleh nilai akhir sebesar 10. Selama tahun 2025 telah dilakukan 41 kali revisi yang terdiri dari:
 - Revisi DIPA sebanyak 11 kali;
 - Revisi POK sebanyak 30 kali
- b. Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai sebesar 11,10 dari bobot penilaian 15 dengan perhitungan sebagai berikut:

MAK	Target	Penyerapan	Deviasi Tertimbang	% Deviasi	Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
a	b	c	d	e (d/v *100)	f	
52	18.062.749.000	18.053.011.552	25.52	28.85	25,98	74.02
53	1.569.776.000	1.569.623.366	3,33			

Perhitungan hasil penilaian = (74,02/100) x 15 = 11,10

maka memperoleh nilai akhir sebesar 11,11 dari target 15, bahwa Satker cukup optimal melakukan perubahan hal III (RPD) sehingga deviasi sampai dengan akhir tahun mendekati nilai target. Hal ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk dapat mencapai target di tahun 2026.

2. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran. yang terdiri dari:

a. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran Satker Deputi I sebesar 99,98% merupakan pencapaian yang optimal dari target Badan POM yang ditetapkan sebesar 99%. Untuk target nasional adalah 95% pencapaian Satker telah melampaui target nasional. Hasil Perhitungan sebagai berikut:

Pagu alokasi untuk Belanja Barang (MAK 52) = Rp. 52.337.449.000 dan MAK 53 = Rp. 2.128.332.000 setelah dikurangi blokir sebesar Rp. 3.612.654.000, Pagu Netto MAK 52 = Rp. 48.724.795.000 dan MAK 53 = 2.128.332.000

	Pagu Netto	Target penyerapan	Realisasi	NKPA Tertimbang	Nilai IKPA
				g	

52	18.062.749.000	80%	14.450.199.200	18.053.011.552	100	100
53	1.569.776.000	70%	1.098.3843.200	1.569.623.366	100	

Perhitungan hasil penilaian = (100/100) x 20 = 20

Rincian Realisasi Anggaran sampai dengan TW 4 sesuai Pagu Netto yang telah dikurangi nilai Pagu Blokir, sebagai berikut:

Tabel 3. 50 Target dan Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2025 (Pagu setelah dikurangi blokir)

Unit Kerja	Total Pagu	Realisasi	Presentase	Target	Capaian	Target Efisiensi Akhir Periode Renstra
Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	2.795.098.000	2.795.029.271	100	99,99	100	100
Direktorat Pengawasan KMEI	4.278.965.000	4.270.218.928	99.80	99,99	99.80	
Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP	3.648.006.000.	3.647.745.791	99.99	99,99	100	
Direktorat Registrasi Obat	4.044.223.000.	3.884.426.498	99.99	99,99	100	
Direktorat Standardisasi Obat NPPZA	4.866.233.000	4.155.240.568	99.99	99,99	100	
Satker	19.632.525.000	19.622.634.918	99,95	99,99	99.96	

- b. Belanja Kontraktual: Nilai dalam IKPA mencapai 100 dengan bobot yang ditetapkan sebesar 10% capaian nilai akhir sebesar 10; dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan mekanisme kontrak tidak ada yang mengalami keterlambatan penyelesaian pembayarannya.

Hasil Perhitungan

Nilai Belanja Kontraktual mendapatkan nilai akhir 10 (target 10) tidak terdapat data kontrak yang terlambat didaftarkan dan tagihan melewati batas waktu penyelesaian pada (LLAT).

- c. Pengelolaan UP dan TUP capaian pada IKPA sebesar **8.71 dari target nilai 10**

Selama tahun 2025 revolving pengajuan SPM UP dan TUP sebanyak 61 waktu penyelesaian dari pengajuan tepat waktu. Penyelesain GUP Nihil akhir tahun semua unit melakukan tepat waktu. Jumlah TUP (RM) dimintakan sebesar Rp. 1.836.842.260, dengan setoran pengembalian sebesar Rp. 223.975.610, hal ini disebabkan dana yang diminta dengan mekanisme TUP dilakukan juga dengan mekanisme LS sehingga dana TUP harus dikembalikan ke kas negara.

Nilai Komponen UP/TUP sebesar 87.12. Target GUP KKP sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi Rp. 896.044.737 menghasilkan nilai GUP KKP = 110.

Nilai Pengelolaan UP dan TUP mendapatkan nilai akhir **8.71 (target 10)**

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Konfirmasi capaian Output

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan bagi Satker pengguna Aplikasi SAKTI **paling lambat 10 hari kerja pada bulan Berikutnya.**

Tahun 2025 terdapat 22 output, 2 output dana terblokir semuanya dan 1 output hanya sebagian kecil 0,010% yang tersedia sehingga tidak cukup untuk menghasilkan output.

Perolehan nilai dari 19 output yang tersedia anggaran mendapatkan nilai 100, dan 1 output yang hanya sedikit dananya tidak mendapatkan nilai (nol), maka perolehan **nilai IKPA 24,13 dari target 25.**

Tabel 3. 51 Capaian Realisasi Output Unit di Kedeputian 1 Tahun 2025

Unit Kerja	Jumlah Output	Jumlah Output terkonfirmasi	Realisasi (%)	Capaian (%)
Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	100
Dit. Registrasi Obat	3	2	100	
Dit. Standardisasi Obat NPPZA	5	5	100	
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	4	4	75	75
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	3	2	100	

Unit Kerja	Jumlah Output	Jumlah Output terkonfirmasi	Realisasi (%)	Capaian (%)
Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	6	6	100	
DEPUTI I	22	20		

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala antara lain adanya kegiatan yang dilakukan secara mendadak, sehingga dalam pencairan anggaran harus menunggu revisi POK/DIPA. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan terus berupaya melakukan perbaikan dan konsistensi dalam pelaksanaan anggaran dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 26 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus Berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)

Tabel 3. 52 Kategori Nilai Kinerja Anggaran

No	NKA	Kategori
1	> 90	Sangat Baik
2	> 80 < 90	Baik
3	> 60 < 80	Cukup
4	> 50 < 60	Kurang
5	= 50	Sangat Kurang

Gambar 3. 10 Nilai SMART Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025 dari Aplikasi SMART DJA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman ke DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	003	445155	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Nilai	100.00	74.62	100.00	100.00	100.00	87.12	96.50	93.94	100%	0.00	93.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.10	20.00	10.00	10.00	8.71	24.13				
					Nilai Aspek	87.01		96.72			96.50					

Gambar 3. 11 Nilai IKPA Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2025 dari Aplikasi Omspan

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

$$\text{Nilai NKA} = (96,25 \times 50\%) + (93.94 \times 50\%)$$

$$= 48,125 + 46,97$$

$$= 95,095 \text{ (Sangat Baik)}$$

Dispensasi SPM: selama tahun 2025 tidak terdapat SPM yang diajukan dengan dispensasi.

Adapun penyebab belum maksimalnya capaian untuk IKSP ini, yaitu:

- Deviasi Hal III DIPA berkaitan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang belum optimal, penyesuaian setiap Triwulanan (akselerasi) terhadap pelaksanaan dengan RPD belum dimanfaatkan secara optimal.

- b. Pada bulan November terdapat persetujuan pembukaan blokir sehingga semua pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan kembali mengingat sudah hampir akhir tahun anggaran.
- c. Terdapat capaian Output belum yang belum maksimal karena hanya sebagian kecil anggaran yang disetujui sehingga tidak mencukupi dalam pencapaian output.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- a. Untuk indikator dalam IKPA yang sudah mendapatkan nilai 100 agar dipertahankan dan dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya.
- b. Beberapa indikator yang belum dapat nilai sesuai target dapat perbaiki kesalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target.
- c. Untuk pengelolaan TUP harus dicermati nilai yang dimintakan agar dapat digunakan secara maksimal dan meminimalkan pengembalian dana TUP.

Tabel 3. 53 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	03-Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1	Pengelolaan TUP belum optimal	meminimalkan pengembalian dana TUP	meminimalkan pengembalian dana TUP	TW IV tahun 2026	Y	K-4	Pengelolaan UP tidak optimal

17) Indeks Manajemen Risiko Deputy 1

Indeks Manajemen Risiko diukur untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko dalam organisasi dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan efektif, serta dapat mendukung pencapaian tujuan strategis, kinerja, dan tata kelola yang baik. Pengukuran indeks ini memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kematangan (maturity) penerapan manajemen risiko, sehingga organisasi tidak hanya mengidentifikasi risiko secara formal, tetapi juga mampu mengelolanya secara nyata dan berkelanjutan.

Pengukuran Indeks Manajemen Risiko membantu memastikan bahwa risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja telah diidentifikasi, dianalisis, dan

dikendalikan. Dengan demikian, organisasi dapat meminimalkan kegagalan program, inefisiensi anggaran, serta risiko operasional dan reputasi.

Tabel 3. 54 Pencapaian Capaian IKSP Nilai Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025

Nilai Manajemen Resiko pada Deputy Bidang Pengawasan Obat		
Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025
Jumlah Nilai	47.00	47.00
Nilai Maturitas	2.938	2.938
Tingkat maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Aware</i>

Berdasarkan hasil penilaian Maturitas Manajemen Risiko pada Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2025, diperoleh Jumlah Nilai sebesar 47,00 dengan Nilai Maturitas 2,938. Hasil tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2024, baik dari sisi jumlah nilai maupun nilai maturitas.

Apabila dibandingkan dengan Kedeputian lain di BPOM, berikut hasil realisasi dan capaian maturitas manajemen risiko Kedeputian 1 bila dibandingkan sesama kedeputian lain di BPOM.

Tabel 3. 55 Perbandingan capaian manajemen resiko Kedeputian 1 dibandingkan Kedeputian Lain di BPOM tahun 2025

No.	IKSP	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3	Deputi 4
1.	Nilai Manajemen Resiko	2,938	2,938	3.375	2,906

Tingkat maturitas manajemen risiko pada Tahun 2025 berada pada level Risk Aware, yang menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya manajemen risiko telah terbangun dan proses identifikasi serta pengelolaan risiko telah diterapkan. Namun demikian, penerapan manajemen risiko tersebut masih memerlukan penguatan agar lebih konsisten, terintegrasi, dan berorientasi pada pengambilan keputusan strategis.

Tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode evaluasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti perbedaan pemahaman, kompetensi, atau beban kerja SDM dalam pengelolaan

kinerja dan manajemen risiko berpotensi menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal dan berdampak pada capaian IKU, kesadaran risiko telah terbentuk (*level Risk Aware*), integrasi manajemen risiko dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja belum optimal.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, direkomendasikan perbaikan berikut:

- a. Pelaksanaan integrasi manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja dengan menguatkan penerapan manajemen risiko dengan menetapkan rencana mitigasi yang jelas dan terukur, serta memanfaatkan hasil penilaian maturitas risiko sebagai dasar perbaikan pengendalian kinerja.
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kinerja dan risik. Melakukan penguatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis, asistensi, dan pembelajaran internal.

Tabel 3. 56 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	04-Indeks Manajemen Risiko Deputi 1	Identifikasi gap dan koordinasi dengan unit kerja untuk perbaikan	Identifikasi gap dan koordinasi dengan unit kerja untuk perbaikan pengelolaan manajemen resiko	Identifikasi gap dan koordinasi dengan unit kerja untuk perbaikan pengelolaan manajemen resiko	TW IV Tahun 2026	T	-	-

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berikut ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 3. 57 Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV Tahun 2025

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu	Target telah tercapai dengan faktor pendukung: UPT BPOM menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perubahan kebijakan sampling dan pengujian berbasis risiko. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan utama dalam memastikan sistem pengawasan mutu obat beredar dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara unit pusat dan UPT dalam pelaksanaan pengawasan obat, guna memastikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, terarah, dan berbasis risiko. 2. Mengoptimalkan efektivitas pengawasan mutu obat melalui penguatan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan,	1. Penyelenggaraa n Forum Komunikasi Pusat dan UPT BPOM dalam Manajemen Sampling Obat. Forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kapasitas petugas dalam perencanaan serta pelaksanaan sampling obat secara tepat sasaran dan berbasis risiko. Melalui forum ini, diharapkan	selesai	-	TW IV Tahun 2025	Y	SDM-2	Pelaksanaan sampling oleh petugas UPT BPOM tidak sesuai ketentuan Pedoman Sampling

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			evaluasi terhadap potensi permasalahan mutu, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.	dapat terwujud keseragaman prosedur, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta peningkatan kualitas data hasil pengawasan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. 2. Memperkuat efektivitas pengawasan mutu obat serta mencegah terulangnya kasus TMS pada produk yang beredar melalui kegiatan intensifikasi tindak lanjut pengawasan mutu obat beredar dalam bentuk desk klarifikasi terhadap hasil pengawasan,						

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				menggali akar permasalahan ketidaksesuaian mutu produk, serta mendorong komitmen industri dalam melaksanakan tindakan perbaikan dan peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku.						
2	02 - IKK Pengawasan Obat	Pengukuran IKU dilaksanakan pada akhir tahun. Capaian lebih dari target yang ditetapkan sehingga Perlu dilakukan review terhadap target tahun 2026 berdasarkan evaluasi tahun pertama periode renstra.	1. Pelaksanaan self assessment terhadap ketepatan data dukung IKK. 2. Pelaksanaan monev implementasi peraturan.	Pelaksanaan self assessment terhadap ketepatan data dukung IKK	selesai	Pelaksanaan monev implementasi peraturan.	TW 3 tahun 2026	T	-	-
3	03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator kinerja dimaksud mengalami pemblokiran hingga akhir Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut merupakan	Diusulkan pengecualian (<i>exclude</i> tidak dihitung sebagai NKO)	Diusulkan pengecualian (<i>exclude</i> tidak dihitung sebagai NKO)	selesai	-	-	T	-	-

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dampak dari kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025								
4	04 - Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	TW III/2025 tidak mencapai target 1) Hambatan: Sampai dengan TW 3, dilakukan inspeksi rutin terhadap 150 sarana, dengan hasil terdapat 111 sarana yang memenuhi ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). 2) Blokir anggaran berdampak pada berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan inspeksi secara onsite, sehingga	1) Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil inspeksi rutin baik oleh UPT maupun inspeksi terpadu (UPT bersama Pusat). 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 3) Optimalisasi perencanaan kegiatan dan anggaran termasuk mengajukan buka blokir anggaran	1) Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil inspeksi rutin baik oleh UPT maupun inspeksi terpadu (UPT bersama Pusat). 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 3) Optimalisasi perencanaan kegiatan dan anggaran termasuk mengajukan buka blokir anggaran	selesai	-	-	Y	S-1	Adanya keluhan mutu obat yang diproduksi sarana produksi dan beredar di masyarakat

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sesuai rencana awal.								
5	05 - Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	TW III/2025 tidak mencapai target Hambatan: 1. Pemeriksaan sarana oleh UPT berbasis risiko, sehingga banyak ditemukan ketidakpatuhan. 2. Kegiatan intensifikasi pengawasan OOT dan Psikotropika menambah temuan penyimpangan distribusi yang berujung pada sanksi PK dan PSK. 3. Adanya pergeseran indikator kinerja yang tidak lagi menilai tingkat kepatuhan (MK) membuat UPT lebih fokus pada penegakan sanksi	Pendampingan dan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Peaksanaan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	selesai	-	-	T	-	-

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		administratif yang berat (PK atau PSK).								
6	06 - Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	TW III/2025 tercapai target Faktor Pendukung: Telah dilaksanakannya sosialisasi/bimtek Peningkatan Kepatuhan Industri Farmasi terhadap Ketentuan Iklan dan Penandaan obat baik dalam kegiatan asistensi regulatori, forum komunikasi, desk konsultasi ataupun bentuk kegiatan lainnya Hambatan: Kendala yang dihadapi adalah dengan adanya peningkatan penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi iklan obat oleh industri farmasi	1) Melakukan Intensifikasi pelayanan publik pengawasan pre dan post market iklan/penandaan obat melalui desk konsultasi dan pemanggilan. 2) Sosialisasi/Bimtek Peningkatan Kepatuhan Industri Farmasi terhadap Ketentuan Iklan dan Penandaan obat dalam kegiatan asistensi regulatori, forum komunikasi ataupun bentuk kegiatan lainnya.	1) Melakukan Intensifikasi pelayanan publik pengawasan pre dan post market iklan/penandaan obat melalui desk konsultasi dan pemanggilan. 2) Sosialisasi/Bimtek Peningkatan Kepatuhan Industri Farmasi terhadap Ketentuan Iklan dan Penandaan obat dalam kegiatan asistensi regulatori, forum komunikasi	selesai	-	-	Y	S-6	Adanya pelanggaran ketentuan di bidang pengawasan iklan dan label obat beredar oleh pelaku usaha

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		yang menjadi tantangan dalam pengawasan iklan obat.		ataupun bentuk kegiatan lainnya.						
7	07 - Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	TW III/2025 tercapai target Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: 1) Bimtek di BBPOM di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2025 sekaligus sosialisasi Peraturan Badan POM nomor 18 dan 19 tahun 2025 kepada pelaku usaha rokok elektronik. 2) Rapat Revisi SKP Kepala UPT termasuk IKU UPT sebagai dampak Penyesuaian PK dan RAPK Tahun 2025 tanggal 8 September 2025.	Monitoring terhadap Capaian IKU UPT	Monitoring terhadap Capaian IKU UPT	selesai	-	-	T	-	-

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	08 - Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	Target capaian sudah jauh melampaui target yang ditetapkan, sehingga diusulkan revisi target IKU pada PK Tahun 2026.	Justifikasi : 1) Indikator kinerja utama (IKU) AMR di level Deputi ini merupakan indikator baru, penetapan target belum berdasarkan baseline data yang memadai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target	Pengusulan penyesuaian target	Belum selesai	Dalam proses pengusulan kepada roren	TW 1 2026	T	-	-
9	09-Persentase sentra uji klinik dan BE yang memenuhi ketentuan	TW III/2025 tidak tercapai target Hambatan: pada akhir bulan Juli 2025 dilaksanakan kegiatan mock-up inspeksi dalam rangka persiapan Observed Audit WLA oleh WHO yang dimulai pada minggu pertama bulan Agustus 2025. Adanya keterbatasan waktu antara penyelesaian kegiatan mock-up inspeksi dan kegiatan Observed Audit oleh	Rekomendasi TW III/ 2025 yaitu Monitoring timeline yg lebih ketat Rekomendasi TW IV/ 2025 yaitu Reviu terhadap target indikator berdasarkan trend dan kemampuan anggaran	1. Monitoring timeline 2. Reviu terhadap target indikator	selesai	-	-	T	-	-

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		WHO menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan hasil inspeksi (>20HK) dan berdampak pada capaian target inspeksi pada triwulan tersebut. TW IV/2025 tercapai target Keberhasilan ini didukung oleh: 1) Dengan adanya asistensi regulatori mengenai Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dan pemenuhan pelaksanaan uji bioekivalensi terjadi peningkatan kepatuhan sentra uji klinik dan Bioekivalensi. 2) Kecepatan evaluasi terhadap hasil inspeksi berdampak pada pemenuhan timeline penyampaian hasil inspeksi kepada sentra uji klinik								

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dan uji bioekivalensi. 3) Respon dan ketepatan sentra uji klinik dan uji bioekivalensi dalam menyampaikan CAPA /hasil perbaikan terhadap hasil inspeksi								
10	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	Kendala yang dihadapi : 1) Pengetahuan terhadap produk obat sangat baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran masyarakat terkait adanya Nomor Izin Edar (NIE). 2) Mayoritas masyarakat menganggap penting adanya informasi nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa yang terdapat pada produk obat, namun sebagian masyarakat masih menganggap	1) Melaksanakan optimalisasi dan efektivitas program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan merumuskan strategi yang adaptif, dan mengubah pendekatan dengan model yang terdiferensiasi dan terfokus. 2) Pelaksanaan intensifikasi kepada masyarakat dalam hal peningkatan cek NIE melalui penggunaan BPOM	1. Melaksanakan optimalisasi dan efektivitas program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 2. Pelaksanaan intensifikasi kepada masyarakat dalam hal peningkatan cek NIE 3. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor	selesai	-	-	Y	S-5	Pelaksanaan penyusunan dan publikasi materi KIE tidak sesuai dengan jadwal kegiatan dalam perencanaan

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		kondisi kemasan dan membaca informasi pada label (efek samping, petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan) tidak penting dan biasa saja. 3) Perilaku masyarakat yang perlu menjadi perhatian adalah dalam membaca informasi pada label. Mayoritas masyarakat beranggapan jika sudah terdapat informasi kedaluwarsa maka produk aman.	Mobile, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembacaan label dan pengecekan kemasan produk Obat. 3) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat.							
11	01 - Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	Terdapat perubahan definisi operasional dalam menghitung capaian indikator obat pengembangan baru di Direktorat Registrasi Obat.	1) Melanjutkan kegiatan pendampingan seperti asistensi regulatori onsite, desk pra sertifikasi, dan melakukan inspeksi sertifikasi CPOB. 2) Melakukan	3) Melanjutkan kegiatan pendampingan seperti asistensi regulatori onsite, desk pra sertifikasi, dan melakukan	selesai	-	-	T	-	-

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			identifikasi dan monitoring terhadap tindak lanjut pengawasan dan progres perbaikan sarana produksi.	inspeksi sertifikasi CPOB. 4) Melakukan identifikasi dan monitoring terhadap tindak lanjut pengawasan dan progres perbaikan sarana produksi						
12	02 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	Dari 16 Industri Farmasi yang diintervensi, sebanyak 9 Industri Farmasi atau sebesar 56% mengalami peningkatan level maturitas. Kondisi ini dipengaruhi oleh kendala pada tahap awal pelaksanaan, khususnya ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan <i>on-site</i> antara tim maturitas dengan industri, serta perlunya penyesuaian jadwal narasumber/tenaga ahli yang terlibat. Faktor Pendukung:	Melanjutkan pendampingan maturitas IF di tahun 2026	Melanjutkan pendampingan maturitas IF di tahun 2026	selesai	-	-	T	-	-

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1) Pendampingan dan asistensi teknis oleh tim maturitas. 2) Komitmen manajemen Industri Farmasi yang diintervensi. 3) Efektivitas tools penilaian maturitas Industri Farmasi								
13	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	Faktor pendukung capaian indeks pelayanan publik antara lain: 1) Optimalisasi penggunaan sistem informasi/digitalisasi pelayanan publik. 2) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagai persyaratan pelayanan publik yang prima. 3) Intensifikasi pelayanan publik melalui forum komunikasi, asistensi regulatori, coaching, Bimtek, Sosialisasi yang berdampak pada awareness pelaku usaha. 4) Komitmen untuk pemenuhan timeline sesuai standar	Pengembangan dan perbaikan sistem informasi pelayanan publik antara lain pengembangan new aero, e-bpom, siapik dan sisobat	Pengembangan dan perbaikan sistem informasi pelayanan publik antara lain pengembangan new aero, e-bpom, siapik dan sisobat	selesai	-	-	Y	IT-1	Media untuk pengaduan pelayanan dan konsultasi kurang memadai

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		layanan								
14	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi 1	Faktor yang menjadi kendala tercapainya indikator ini sbb: 1) Belum terdapat monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan di tiap pokja RB. 2) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi secara pemanfaatan sistem informasi. 3) Belum masifnya campaign gratifikasi dan benturan kepentingan ke seluruh stakeholder	1) Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh tim kerja dalam pembangunan ZI dan implementasi RB. 2) Mendokumentasika n seluruh kegiatan dan melakukan evaluasi secara berkala. 3) Peningkatan capaian kinerja dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif	4) Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh tim kerja dalam pembangunan ZI dan implementasi RB. 5) Mendokument asikan seluruh kegiatan dan melakukan evaluasi secara berkala. 6) Peningkatan capaian kinerja dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif	Belum selesai	Peningkatan capaian kinerja dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif	TW IV 2026	T	-	-
15	02 - Nlai AKIP Deputi 1	Pelaksanaan pengukuran SAKIP dilaksanakan akhir tahun	Pelaksanaan <i>self</i> <i>assessment</i> Identifikasi gap dan koordinasi dengan unit kerja untuk perbaikan	Pelaksanaan <i>self</i> <i>assessment</i> Identifikasi gap dan koordinasi dengan unit kerja untuk perbaikan	Belum selesai	Identifikasi gap dan koordinasi dengan unit kerja untuk perbaikan	TW IV 2026	T	-	-
16	03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi 1	Masih kurang optimal nya realisasi anggaran karena adanya kendala koordinasi pada proses	Meningkatkan koordinasi pada proses mekanisme pencairan anggaran di Kedeputan	Meningkatkan koordinasi pada proses mekanisme	selesai	-	-	Y	K-4	Pengelolaan UP tidak optimal

No.	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomenda si	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		mekanisme pencairan anggaran	1	pencairan anggaran di Kedeputian 1						
17	04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi 1	Pelaksanaan pengukuran dilaksanakan akhir tahun	Pelaksanaan <i>self</i> <i>assesment</i> Identifikasi gap dan koordinasi dengan unit kerja untuk perbaikan	Pelaksanaan <i>self</i> <i>assesment</i> Identifikasi gap dan koordinasi dengan unit kerja untuk perbaikan	Belum selesai	Identifikasi gap dan koordinasi dengan unit kerja untuk perbaikan	TW IV 2026	T	-	-

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Sebagai bentuk pemanfaatan informasi pada laporan kinerja, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA senantiasa melakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja untuk tahun berikutnya. Namun, sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tentunya berdampak pada anggaran di BPOM, maka terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan yaitu:

3.3.1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Secara umum, penyesuaian aktivitas untuk mencapai target kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran program. Penyesuaian ini perlu dilakukan agar dapat mencapai target di tahun berikutnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan perencanaan dan penajaman Output sehingga terukur (*measurable*), relevan, dan berorientasi pada dampak (*outcome-based*).
- b. Mendorong mekanisme *early engagement* antara regulator, peneliti, dan industri untuk memastikan kesesuaian standar sejak tahap pengembangan.
- c. Melakukan percepatan penyusunan dan finalisasi regulasi prioritas berbasis kebutuhan strategis dan risiko tinggi.
- d. Melaksanakan Forum Koordinasi Pusat dan UPT BPOM dalam rangka manajemen sampling obat yang melibatkan UPT BPOM seluruh Indonesia.

3.3.2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada anggaran di BPOM, maka dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran sebagai berikut:

3.3.3 Penyesuaian Perencanaan Kinerja untuk Periode Berikutnya

Menindaklanjuti hasil capaian pada tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap target IKSP tahun 2026 maupun dalam tahun renstra 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3. 58 Penyesuaian Kinerja Sesuai Hasil Evaluasi Kinerja

No.	Indikator Sasaran Program	Baseline	Realisasi	Perencanaan Penyesuaian Target			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu	-	96,18%	95,30%	-	-	-
2	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	93,79	93,25	93,5	93,9	94,4	94,8
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91,63	N/A	35%	40%	45%	50%
4	Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	-	78,85%	79%	81%	83%	85%
5	Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	-	65,42%	67%	68%	69%	70%
6	Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	-	91,37%	80%	81%	82%	83%
7	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi	-	79,91%	77%	79%	81%	83%
8	Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	-	9,69%	9,7%	9,8%	9,9%	10%
9	Persentase sentra uji klinik dan BE yang memenuhi ketentuan	-	81,25%	81,5%	82%	83%	84%
10	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90,44	90,08	90,31	90,54	90,77	91
11	Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	-	74,57%	71,5%	-	-	-

No.	Indikator Sasaran Program	Baseline	Realisasi	Perencanaan Penyesuaian Target			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
12	Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	-	56,25%	56,50%	-	-	-
13	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,87	4,84	4,85	-	-	-
14	Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	-	90,90	91,58	-	-	-
15	Nlai AKIP Deputy 1	81,08	78,23	80,0	-	-	-
16	Nilai Kinerja Anggaran Deputy1	96,61	5	5	5	5	5
17	Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	2,938	2,938	2,97	-	-	-

3.4 Realisasi Anggaran

Pagu awal tahun 2025 sebesar Rp. 50.358.861.000,- dengan sumber dana RM sebesar Rp. 36.752.204.000,- dan PNBPN sebesar Rp. 13.606.657.000,- , jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp. 25.837.021.000,- dengan rincian Belanja Barang Rp. 25.442.021.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 395.000.000,-.

Adanya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 13.995.319.000,-. Total pemotongan anggaran sebesar Rp. 36.386.367.000,- dengan rincian Belanja Barang Rp. 36.363.542.000,- dan belanja modal Rp. 22.825.000,-.

Pada bulan Agustus 2025 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan WLA dan pada bulan September 2025 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP. Pada bulan November terdapat pembukaan blokir, dan mengintegrasikan dana Hibah WHO sebesar Rp. 111.133.000,- yang diperoleh serta telah selesai dilaksanakan, sehingga secara keseluruhan anggaran Satker Pagu Netto semula Rp. 14.473.108.00,- menjadi Rp. 19.632.525.000,- dengan rincian per unit kerja sebagai berikut :

Unit Kerja	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	2.250.350.000	2.795.098.000
Direktorat Pengawasan KMEI	2.903.165.000	4.278.965.000
Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP	2.545.943.000	3.648.006.000
Direktorat Registrasi Obat	3.075.405.000	4.044.223.000
Direktorat Standardisasi Obat NPPZA	3.698.245.000	4.866.233.00
Satker	14.473.108.000	19.632.525.000

Rincian Realisasi Anggaran sampai dengan TW 4 sesuai Pagu Netto yang telah dikurangi nilai Pagu Blokir, sebagai berikut :

Realisasi per jenis Belanja

No	MAK	Pagu Netto (Rp)	Target Penyerapan TW 4 (%)		Realisasi Penyerapan (Rp)	Presentase	Deviasi
1	52	18.062.749.000	99%	18.053.011.552	18.053.011.552	100.00	0,01
2	53	1.569.776.000	99%	1.569.623.366	1.569.623.306	100.00	0,01
		19.632.525.000		19.622.634.918	9.783.233.584	100	

Realisasi per Kode Kegiatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblek/ Direvisi	Dana Tersedia
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3.372.685.000	2.226.518.347	66.02%	0	1.137.805.000	8.361.653
2	4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6.749.931.000	2.659.051.146	39.39%	0	4.090.817.000	62.854
3	4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	11.233.674.000	3.533.802.941	31.46%	0	7.699.414.000	457.159
4	4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	9.310.689.000	3.163.595.518	33.98%	0	6.146.836.000	257.482
5	4127 Registrasi Obat	12.654.921.000	3.894.428.498	30.69%	0	8.770.158.000	336.502
6	4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	7.648.708.000	4.155.240.568	54.33%	0	3.493.053.000	414.432
	Jumlah	50.970.608.000	19.622.634.918	38.50%	0	31.338.083.000	9.890.082

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto

Realisasi per Unit Kerja

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	Presentase
Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	2.795.098.000	2.795.029.271	100%
Direktorat Pengawasan KMEI	4.278.965.000	4.270.218.928	99,80%
Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP	3.648.006.000	3.647.745.791	99,99%
Direktorat Registrasi Obat	4.044.223.000	4.043.847.451	99,99%
Direktorat Standardisasi Obat NPPZA	4.866.233.00	4.865.793.477	99,99%
Satker	19.632.525.000	19.622.634.918	99,95%

3.4.1 Realisasi Anggaran yang Telah Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 11,268,195,000

Dengan adanya anggaran yang mengalami pemblokiran yang berdampak pada perubahan alokasi anggaran di setiap indikator kinerja, adapun perubahan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 59 perubahan anggaran pada setiap indikator kinerja

No	Indikator Kinerja	Alokasi Pagu	Perubahan Alokasi Pagu
1.	Persentase Obat yang aman dan bermutu	11,268,195,000	4.162.367.000
2.	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	4.071.170.000	2.861.444.000
3.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	2.175.000.000	0
4.	Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	4.605.876.000	844.473.00
5.	Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	1.983.071.000	1.255.875.000
6.	Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	157.547.000	89.377.000
7.	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi	833.687.000	523.550.000
8.	Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	325.000.000	89.300.000
9	Persentase sentra uji klinik dan BE yang memenuhi ketentuan	0	0
10.	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	2.500.000.000	290.470.000
11.	Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	3.419.326.000	477.507.000

12.	Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	279.700.000	247.502.00
13.	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	10.417.571.000	4.102.933.000
14.	Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	1.244.008.000	996.957.60
15.	Nlai AKIP Deputy 1	2.380.428.000	1.036.823.600
16.	Nilai Kinerja Anggaran Deputy1	3.930.271.000	2.120.849.000
17.	Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	683.133.000	533.096.800
Total		50.358.861.000	19.632.525.000

Tabel 3. 60 Perbandingan Realisasi Kinerja vs Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja TW 4 Tahun 2025			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu	90%	90%	96,32%	107,03	4.162.367.000	4.162.053.394	99,99
		02 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	82,90 (akhir tahun)	82,90 (akhir tahun)	93,25	112,48	2.861.444.000	2.861.212.096	99,99
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	30% (akhir tahun)	30% (akhir tahun)	-	-	0	0	0
		04 - Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77%	77%	78,85%	102,40	844.473.000	844.464.292	100,00
		05 - Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi	78.5%	78.5%	65,42%	83,34	1.255.875.000	1.255.830.254	100,00

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja TW 4 Tahun 2025			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		ketentuan							
		06 - Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	79%	79%	91,37%	115,6rencana 6	89.377.000	89.370.997	99,99
		07 - Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	75%	75%	79,91%	106,55	523.550.000	523.487.373	99,99
		08 - Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	4,9 % (B09) dalam proses revisi target)	4,9 % (B09) dalam proses revisi target)	9,69%	197,76	89.300.000	89.298.712	100,00
		09 - Persentase sentra uji klinik dan BE yang memenuhi ketentuan AC	80 % (B09)	80 % (B09)	81,25%	101,56	0	0	0
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90,6% (akhir tahun)	90,6% (akhir tahun)	90,08%	99,43	290.470.000	290.470.000	100
3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	10 - Persentase pengawasan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75%	75%	74,57%	99,42	477.507.000	477.473.460	99,99
		11 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52% (akhir tahun)	52% (akhir tahun)	56,25%	108,17	247.502.000	247.430.396	99,97
4	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	12 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4.68 (akhir tahun)	4.68 (akhir tahun)	4,84	103,42	4.102.933.000	4.102.427.977	99,99

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja TW 4 Tahun 2025			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		13 - Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	92.9 (akhir tahun)	92.9 (akhir tahun)	90,90	97,85	996.957.600	995.305.851	99,83
		14 - Nilai AKIP Deputy 1	81.47 (akhir tahun)	81.47 (akhir tahun)	78,23	96,02	1.036.823.600	1.036.685.274	99,99
		15 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1	5 (akhir tahun)	5 (akhir tahun)	-	-	2.120.849.000	2.120.766.689	100,00
		16 - Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	2.97 (akhir tahun)	2.97 (akhir tahun)	2,938	98,92	533.096.800	526.358.154	98,74
	Total						19.632.525.000	19.622.634.918	99,95

3.4.2 Realisasi anggaran per Sasaran Program

Berikut ini merupakan realisasi anggaran per sasaran program

Tabel 3. 61 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran vs Sasaran Program Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	9.826.386.000	9.825.717.118	99,99
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	290.470.000	290.470.000	100,00
3.	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	725.009.000	724.903.856	99,99
4.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	8.790.660.000	8.781.543.944	99,90
Total		19.632.525.000	19.622.634.918	99,95

3.4.3 Evaluasi dan Analisis Anggaran Berisi Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran per Program/ Kegiatan pada Tahun yang Bersangkutan Baik yang Berasal dari DIPA Maupun Hibah dan Analisa Tingkat Pencapaiannya

Pagu awal tahun 2025 sebesar Rp. 50.358.861.000,- dengan sumber dana RM sebesar Rp. 36.752.204.000,- dan PNBPN sebesar Rp. 13.606.657.000,- , jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp. 25.837.021.000,- dengan rincian Belanja Barang Rp. 25.442.021.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 395.000.000,-.

Pagu Netto pada akhir tahun anggaran menjadi sebesar Rp. 19.632.525.000,- dengan 5 kegiatan dari masing-masing unit di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Anggaran sebesar Rp. 19.632.525.000,- untuk membiayai 4 sasaran program dengan 17 indikator kinerja, 22 Rincian Output (22 output, 2 output dana terblokir

semuanya dan 1 output hanya sebagian kecil 0,010% yang tersedia sehingga tidak cukup untuk menghasilkan output.

Efektivitas Penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sangat baik dengan dibuktikan bahwa rata-rata capaian hampir 99,99% bahkan ada yang mencapai 100%. Pemanfaatan penggunaan Standard Biaya Keluaran (Umum) digunakan dengan efisien dan mencapai target output dan dimanfaatkan oleh stake holder. Adapun dana Hibah WHO digunakan secara efisien untuk meningkatkan kompetensi baik internal maupun eksternal.

3.4.4 Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran

Prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk memastikan pengalokasian anggaran dapat menghasilkan output yang direncanakan/ditargetkan dengan mengacu pada ketentuan pelaksanaan anggaran yang berlaku. Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pada tahun 2025 Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, mempunyai 4 Sasaran Program dengan 17 Indikator Kinerja. Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel dibawah ini terdapat 3 sasaran program telah efisien dan 1 sasaran program tidak efisien. Namun demikian secara keseluruhan diperoleh Nilai Efisiensi 0,0559 hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA pada tahun 2025 terhadap capaian indikator dapat dikatakan telah Efisien.

Tabel 3. 62 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian Indikator (%) (a)	Anggaran Capaian (%) (b)	Indeks Efisiensi (IE) (d) IE= a/b	Nilai Efisiensi (TE) TE=(e-1)/1	Capaian TE	Kategori
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	115.83	99,99	1,16	0,16	100 %	Efisien
2	05-Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan	103.36	100,00	1,03	0,03	100 %	Efisien

No	Sasaran Strategis	Capaian Indikator (%) (a)	Anggaran Capaian (%) (b)	Indeks Efisiensi (IE) (d) IE= a/b	Nilai Efisiensi (TE) TE=(e-1)/1	Capaian TE	Kategori
	Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu						
3	06-Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	103.80	99,99	1,04	0,04	100 %	Efisien
4	10-Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99.24	99,90	0,99	-0,01	75 %	Tidaak Efisien
Total		105,56	99,97	1,06	0,0559	100 %	Efisien

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA telah efektif dengan nilai efisiensi 0,0559.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Evaluasi kegagalan/keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dari 4 (empat) Sasaran Program dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA berhasil mencapai nilai sebagai berikut:

- a. Tiga (3) IKU dengan kategori TIDAK DAPAT DISIMPULKAN ($\geq 110\%$)
- b. Tujuh (7) IKU dengan kategori SANGAT BAIK ($100\% < x \leq 110\%$)
- c. Lima (5) IKU dengan kategori BAIK ($90\% < x \leq 100\%$)
- d. Satu (1) IKU dengan kategori CUKUP ($60\% \leq x < 90\%$)
- e. Satu (1) IKU tidak dapat diukur karena terdapat blokir seluruh anggaran hingga akhir tahun

Secara umum, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025 mencapai predikat BAIK (**91,92%**). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025 telah sesuai target yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan target kinerja, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan, adapun pagu anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA tahun 2025 adalah sebesar Rp 19.632.525.000 hingga akhir tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp 19.622.634.918 atau sebesar 99,95% dari total pagu tidak termasuk *Auto Adjustment* sebesar Rp 31.338.083.000.

Berdasarkan analisis efisiensi yang membandingkan antara capaian output dan input dari masing-masing kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA memiliki nilai efisiensi 0,0559 dengan kategori **efisien**.

4.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, perlu melakukan perbaikan antara lain:

- a. Penguatan perencanaan berbasis kinerja dan penetapan target yang realistis, dengan melakukan review dan monitoring evaluasi kinerja.
- b. Peningkatan kapasitas SDM, dengan memberikan pelatihan berkala kepada pegawai agar terjadi peningkatan kompetensi
- c. Optimalisasi penggunaan teknologi, dengan mengembangkan sistem digital untuk monitoring dan pelaporan pengawasan obat NPPZA.

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILLIAM ADI TEJA

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 August 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor,
dan Zat Adiktif

WILLIAM ADI TEJA

Pihak Kedua
Kepala Badan
Pengawas Obat
dan Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu	90 %
		02 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	82.9
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	30 %
		04 - Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77 %
		05 - Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	78.5 %
		06 - Persentase iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	79 %
		07 - Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	75 %

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		08 - Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	4.9 %
		09 - Persentase Sentra Uji Klinik dan Bioekivalensi yang Memenuhi Ketentuan	80 %
2.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90.6
3.	06 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pengawasan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75 %
		02 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52 %
4.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4.68
		02 - Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	92.9
		03 - Nilai AKIP Deputy 1	81.47
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1	5

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		05 - Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	2.97

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 50,802,275,000 (Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3,232,529,000
2.	DR.4131 - Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	7,596,133,000
3.	DR.4122 - Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6,692,731,000
4.	DR.4123 - Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	11,315,272,000
5.	DR.4125 - Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	9,310,689,000
6.	DR.4127 - Registrasi Obat	12,654,921,000

Jakarta, 28 August 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor,
dan Zat Adiktif

Pihak Kedua
Kepala Badan
Pengawas Obat
dan Makanan


WILLIAM ADI TEJA


TARUNA IKRAR

Lampiran 2 - Pengukuran Kinerja

Rincian hasil pengukuran kinerja pada setiap indikator dapat dilihat secara lengkap melalui tautan berikut:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pJAfVZo940N9MM4FuyJ/edit?gid=1400563877>

a. Triwulan I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	JANUARI			FEBRUARI			MARET			Capaian (%) TW 1	Apabila Capaian Tidak 100%, Maka Isi Kendala dan RTL		Pelaksanaan TL dari TW sebelumnya (TW IV Tahun 2024)	Program yang Mendukung Pencapaian Target
						T	R (%)	C (%)	T	R (%)	C (%)	T	R	C (%)		Kendala/ Hambatan	Rencana TL TW Selanjutnya		
1	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 0-1	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu	Deputi 1	KMEI	90	-	-	-	90	97,99	108,88	90	96,45	107,17	107,17				
		02 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Deputi 1	Standar	88.05 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Deputi 1	WasDist	30 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-
		04 - Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	WasProd	77	77	-	-	77	18,37	23,86	77	18,37	23,86	Akumulasi Realisasi: 36/196 = 18,37% Capaian = 100/77 = 23.86%	- Terdapat 4 indikator pada uke II, namun 2 diantaranya baru dilaksanakan pada TW II (sesuai renlak inspeksi 2025). - Realisasi masih akan berprogress hingga TW IV (akumulasi)	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan renlak	Telah dilaksanakan sesuai rencana	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	JANUARI			FEBRUARI			MARET			Capaian (%) TW 1	Apabila Capaian Tidak 100%, Maka Isi Kendala dan RTL		Pelaksanaan TL dari TW sebelumnya (TW IV Tahun 2024)	Program yang Mendukung Pencapaian Target
						T	R (%)	C (%)	T	R (%)	C (%)	T	R	C (%)		Kendala/Hambatan	Rencana TL Selanjutnya		
		05 - Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78,5	78,5	72,44	92,28	78,5	72,44	92,28	78,5	72,44	92,28%	Akumulasi Realisasi: $636/878 = 72,44\%$ Capaian = $72,44/78,5 = 92,28\%$	-	-	-	-
		06 - Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	79	79	60,44	76,51	79	72,09	91,25	79	76,28	96,56	96,56	1. Banyaknya laporan pengawasan iklan yang perlu ditindaklanjuti yang diterima pada akhir bulan maret dan awal bulan april sehingga belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Kendala pada aplikasi sharing folder sehingga perlu waktu dalam memverifikasi penandaan yang dilaporkan 3. Laporan hasil pengawasan label obat memerlukan pembahasan komprehensif bersama dengan unit kerja terkait maupun UPT pelapor untuk menghasilkan keputusan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan	Percepatan tindak lanjut laporan hasil pengawasan iklan dan label ONPP dengan mekanisme jemput bola sehingga penerbitan keputusan sanksi administrasi dapat lebih cepat.		

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	JANUARI			FEBRUARI			MARET			Capaian (%) TW 1	Apabila Capaian Tidak 100%, Maka Isi Kendala dan RTL		Pelaksanaan TL dari TW sebelumnya (TW IV Tahun 2024)	Program yang Mendukung Pencapaian Target
						T	R (%)	C (%)	T	R (%)	C (%)	T	R	C (%)		Kendala/Hambatan	Rencana TL TW Selanjutnya		
		07 - Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	75	75	80.08	106.77	75	79.02	105.36	75	79.7	106.27	106.27	-	-	-	-
		08 - Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,9 (per TW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	usulan perubahan target per TW menjadi akhir Tahun	-	-	-	-
		09 - Persentase sentra uji klinik dan BE yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	Direktorat Registrasi	80% (B09 dan B12)	(B09 dan B12)	-	-	(B09 dan B12)	-	-	(B09 dan B12)	-	-	-	-	-	-	-
2	05 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	90.6 (akhir tahun)	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	JANUARI			FEBRUARI			MARET			Capaian (%) TW 1	Apabila Capaian Tidak 100%, Maka Isi Kendala dan RTL		Pelaksanaan TL dari TW sebelumnya (TW IV Tahun 2024)	Program yang Mendukung Pencapaian Target
						T	R (%)	C (%)	T	R (%)	C (%)	T	R	C (%)		Kendala/Hambatan	Rencana TL TW Selanjutnya		
3	06 -Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	Deputi 1	DITREG DAN WASPROD	75	mulai akhir TW 1	-	-	mulai akhir TW 1	-	-	75	ditreg :80 produksi: 73.53 rata2: 76,765"	102.35%	102.35%	-	-	-	-
		02 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	Deputi 1	WASPROD	52 (akhir tahun)	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-
4	09- Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	Deputi 1	ALL UNIT	4.68 (akhir tahun)	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-
5	10 -Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi 1	Deputi 1	ALL UNIT	92.9 (akhir tahun)	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-
		02 - Nilai AKIP Deputi 1	Deputi 1	ALL UNIT	81.47 (akhir tahun)	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi 1	Deputi 1	ALL UNIT	5 (akhir tahun)	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi 1	Deputi 1	ALL UNIT	2.97 (akhir tahun)	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	(akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-

(T: Target; R: Realisasi; C: Capaian)

b. Triwulan II

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	APRIL			MEI			JUNI			Capaian (%) TW 2	Apabila Capaian Tidak 100%, Maka Isi Kendala dan RTL		Pelaksanaan TL dari TW Sebelumnya (TW 1 Tahun 2025)	Program yang Mendukung Pencapaian Target
						T	R (%)	C (%)	T	R (%)	C (%)	T	R	C (%)		Kendala/Hambatan	Rencana TL TW Selanjutnya		
1	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 0-1	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	90	90	96,18	106,87	90	96,93	107,70	90	96,96	107,73	Akumulasi: Realisasi = 96,96 Capaian = 107,73%	Memenuhi Target	-	Telah dilaksanakan sesuai rencana	1. Asistensi Regulatori Obat Terpadu pada tanggal 19 - 23 Mei 2025, antara lain berupa desk terkait tindak lanjut penarikan dan CAPA obat TMS 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi sampling dan pengujian obat oleh UPT BPOM
		02 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Deputi 1	Standar	88.05 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Deputi 1	WasDist	30 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-
		04 - Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	WasProd	77	77	81,36	105,66	77	81,36	105,66	77	81,36	105,66	Akumulasi Realisasi = 81,36 Capaian = 105,66%	Memenuhi target	-	Telah dilaksanakan sesuai rencana	Inspeksi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	APRIL			MEI			JUNI			Capaian (%) TW 2	Apabila Capaian Tidak 100%, Maka Isi Kendala dan RTL		Pelaksanaan TL dari TW Sebelumnya (TW 1 Tahun 2025)	Program yang Mendukung Pencapaian Target
						T	R (%)	C (%)	T	R (%)	C (%)	T	R	C (%)		Kendala/Hambatan	Rencana TL TW Selanjutnya		
		05 - Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78,5	66,75	66,75	85,03	78,5	69,49	88,52%	78,5	66,47	84,68	Akumulasi Realisasi = 66,47 Capaian = 84,68%	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian ONPP pada tahun 2025 telah mengikuti ketentuan dalam Surat Deputi I No. R-PW.01.06.3.03.2 5.143 tanggal 14 Maret 2025, yang mengatur pembobotan target pemeriksaan berdasarkan parameter risiko sebagai tindak lanjut rekomendasi WLA. Namun, penerapan kebijakan pemeriksaan berbasis risiko yang memprioritaskan sarana dengan bobot risiko tertinggi berdampak pada meningkatnya jumlah sarana yang ditemukan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).	Perlu mengingatkan UPT untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar semakin paham dan mematuhi regulasi yang berlaku	-	-
		06 - Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	79	79	89,19	112,90%	79	66,67	84,39%	79	93,50	118,35%	Akumulasi Realisasi = 93,50 Capaian = 118,35%	Memenuhi Target	-	Telah dilaksanakan sesuai rencana	1) Percepatan tindak lanjut serta komunikasi koordinasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	APRIL			MEI			JUNI			Capaian (%) TW 2	Apabila Capaian Tidak 100%, Maka Isi Kendala dan RTL		Pelaksanaan TL dari TW Sebelumnya (TW 1 Tahun 2025)	Program yang Mendukung Pencapaian Target
						T	R (%)	C (%)	T	R (%)	C (%)	T	R	C (%)		Kendala/Hambatan	Rencana TL TW Selanjutnya		
		07 - Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	75	75	79,34	105,79%	75	79,76	106,35%	75	79	105,33%	Akumulasi Realisasi = 79% Capaian = 105,33%	Memenuhi target	-	-Telah dilaksanakan sesuai rencana	1) Bimtek ke seluruh UPT Badan POM 2) Bimtek dan Intensifikasi UPT Bandung, Bogor dan Tasik (18-19 Juni) 3) Penyampaian tools pelaporan pengemasan label rokok
		08 - Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,9 (per TW)	-	-	-	-	-	-	4,9	- (dalam proses revisi target)	-	-	Untuk pengukuran indikator yang semula ditetapkan per triwulan diubah menjadi per tahun dengan tidak mengubah target pada Perjanjian Kinerja 2025 yang telah disetujui sebelumnya, dengan justifikasi perubahan : 1. Merupakan indikator baru 2. Mengikuti pelaksanaan pengukuran target BPOM pada RANPRA (setiap tahun) 3. Proses pengumpulan data dan validasi data memerlukan waktu 4. Cakupan wilayah pengawasan yang luas 5. Pelaporan hasil pengawasan dari UPT memerlukan waktu 6. Keterbatasan SDM	Follow up revisi target ke Biro Perencanaan	-	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	APRIL			MEI			JUNI			Capaian (%) TW 2	Apabila Capaian Tidak 100%, Maka Isi Kendala dan RTL		Pelaksanaan TL dari TW Sebelumnya (TW 1 Tahun 2025)	Program yang Mendukung Pencapaian Target
						T	R (%)	C (%)	T	R (%)	C (%)	T	R	C (%)		Kendala/Hambatan	Rencana TL TW Selanjutnya		
2	05 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	90.6 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	06 - Meningkatkan efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pengawasan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	Deputi 1	DITREG DAN WASPROD	75	75	Ditreg: 41,60 Wasprod: 59,52 Rata-rata: 50,56	67.41%	75	Ditreg: 41,60 Wasprod: 89,29 Rata-rata: 65,44	87,25	75	Ditreg: 41,60 Wasprod: 94,25 Rata-rata: 67.92	90,56%	Akumulasi Realisasi = 67,92 Capaian = 90, 56%	Pengawasan secara intensif terhadap obat pengembangan baru terkendala oleh alokasi anggaran yang mengalami efisiensi sehingga kegiatan dilaksanakan secara daring/online yang membuat pencapaian tidak optimal	Melakukan identifikasi dan monitoring terhadap tindak lanjut pengawasan dan progres perbaikan sarana produksi	Asistensi regulatory 2) Pendampingan dan pembahasan dengan Tim Ahli ----- Bimtek, Inspeksi, Sertifikasi	Asistensi regulatory 2) Pendampingan dan pembahasan dengan Tim Ahli ----- Bimtek, Inspeksi, Sertifikasi
		02 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	Deputi 1	WASPROD	52 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	09- Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	Deputi 1	ALL UNIT	4.68 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10 -Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi 1	Deputi 1	ALL UNIT	92.9 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	APRIL			MEI			JUNI			Capaian (%) TW 2	Apabila Capaian Tidak 100%, Maka Isi Kendala dan RTL		Pelaksanaan TL dari TW Sebelumnya (TW 1 Tahun 2025)	Program yang Mendukung Pencapaian Target
						T	R (%)	C (%)	T	R (%)	C (%)	T	R	C (%)		Kendala/Hambatan	Rencana TL TW Selanjutnya		
		02 - Nlai AKIP Deputy 1	Deputi 1	ALL UNIT	81.47 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy1	Deputi 1	ALL UNIT	5 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	Deputi 1	ALL UNIT	2.97 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(T: Target; R: Realisasi; C: Capaian)

c. Triwulan III

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					Capaian (%) TW 3	Target B12	Target 2029	Capaian B09 dibanding B12 (Akhir Tahun) (%)	Capaian B09 dibanding 2029 (%)	Kondisi Awal (Faktor Pendukung/ Kendala/ Hambatan)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Timelime	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir		
						T	Pembilang	Penyetut	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyetut	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyetut	R	C (%)									Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum				
																														Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelime			
1	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 0-1	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu	Deputi 1	KMEI	90	90	5.399	5.558	97.14	107.93	90	6.405	6.597	97.09	107.88	90	8.066	8.333	96.80	107.55	107.55	90	94	107.56%	102.98%	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuvl/edit?gid=1400563877				Tercapai Target				
		02 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Deputi 1	Standar	88.05 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-	-					-	-	-		
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Deputi 1	WasDist	30 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-					-	-	-	-	-
		04 - Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	WasProd	77	77	72	86	83.72	108.73	77	91	122	74.59	96.87	77	111	150	74.00	96.10	96.10	77	85	96.10	87.06					Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuvl/edit?gid=1400563877				Tidak mencapai target

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					Capaian (%) TW 3	Target B12	Target 2029	Capaian B09 dibanding B12 (Akhir Tahun) (%)	Capaian B09 dibanding 2029 (%)	Kondisi Awal (Faktor Pendukung/ Kendala/ Hambatan)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Timelime	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						T	Pembilang	Penyebut	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyebut	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyebut	R	C (%)									Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
																														Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelime	
		05 - Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	WasDist	78,5	78,5	3666	5504	66.61	84.85	78,5	4230	6443	65.65	83.63	78,5	4656	7170	64.94	82.72	82.72	78.5	80.5	82.72	80.67	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pJAfVZo940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877				Tidak mencapai target		
		06 - Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	Deputi 1	KMEI	79	79	3753	4151	90.41	114.45	79	4375	4805	91.05	115.25	79	5117	5623	91.00	115.19	115.19	79	83	115.19	109.64	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pJAfVZo940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877				Tercapai target		
		07 - Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	Deputi 1	KMEI	75	75	3683	4626	79.62	106.15	75	4463	5608	79.58	106.11	75	539075	6749	79.86	106.48	106.48	75	83	106.48	96.22	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pJAfVZo940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877				Tercapai target		
		08 - Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	Deputi 1	WasDist	4,9 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-				-		

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					Capaian (%) TW 3	Target B12	Target 2029	Capaian B09 dibanding B12 (Akhir Tahun) (%)	Capaian B09 dibanding 2029 (%)	Kondisi Awal (Faktor Pendukung/ Kendala/ Hambatan)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Tindakan	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						T	Pembilang	Penyetoran	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyetoran	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyetoran	R	C (%)									Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
																														Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelimit	
		09 - Persentase sentra uji klinik dan BE yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	DITREG	80% (B09 dan B12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	10	13	76.92	96.15	96,15	80	84	96.15	80.10	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhOMw3pIAfVZo940N9MM4FuVl/edit?gid=1400563877			Tidak mencapai target				
2	05 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	Deputi 1	KMEI	90.6 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-	-			-				
3	06 -Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pengawasan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	Deputi 1	DITREG DAN WASPROD	75	75	ditreg : produk : 75	ditreg : 6 produk : 50	91.67	ditreg : 33,33% produk : 150% rata2: 87,5	75	ditreg : 2 produk : 68,75	ditreg : 6 produk : 55	78.67	ditreg : 33,33% produk : 125% rata2: 75	75	ditreg : 2 produk : 69,44	ditreg : 6 produk : 65	70.09	ditreg : 33,33% produk : 106,84% rata2: 65,92	93.45	75	87	93,45	75.77	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhOMw3pIAfVZo940N9MM4FuVl/edit?gid=1400563877			Tidak mencapai target			
		02 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	Deputi 1	WASPROD	52 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-	-			-				
4	09- Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	Deputi 1	ALL UNIT	4.68 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-	-			-				

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					Capaian (%) TW 3	Target B12	Target 2029	Capaian B09 dibanding B12 (Akhir Tahun) (%)	Capaian B09 dibanding 2029 (%)	Kondisi Awal (Faktor Pendukung/ Kendala/ Hambatan)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						T	Pembilang	Penyetut	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyetut	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyetut	R	C (%)									Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
																														Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
5	10 -Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputy 1	Deputi 1	ALL UNIT	92.9 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-	-					-		
		02 - Nilai AKIP Deputy 1	Deputi 1	ALL UNIT	81.47 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-	-					-		
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy1	Deputi 1	ALL UNIT	5 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-	-					-		
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	Deputi 1	ALL UNIT	2.97 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	akhir tahun	-	-	-	-	-					-		

(T: Target; R: Realisasi; C: Capaian)

d. Triwulan IV

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER					Capaian (%) TW 4	Target B12	Target 2029	Capaian B09 dibanding B12 (Akhir Tahun) (%)	Capaian B09 dibanding 2029 (%)	Kondisi Awal (Faktor Pendukung/ Kendala/ Hambatan)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Timelime	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						T	Pembilang	Penyebut	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyebut	R (%)	C (%)	T	Pembilang	Penyebut	R	C (%)									Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
																														Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelime	
1	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 0-1	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu	Deputi 1	KMEI	90	90	9594	9905	96.86	107.62	90	10154	10556	96.19	106.88	90	11065	11504	96.18	106.87	90	94	106.87	102.32	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4FuyI/edit?gid=1400563877					Tercapai target		
		02 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Deputi 1	Standar	88.05 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.25	112.48	112.48	82.9	83.3	112.48	111.94							-	Tercapai target
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Deputi 1	WasDist	30 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diusulkan pengecualian (exclude tidak dihitung sebagai NKO)	-	-	-	-	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4FuyI/edit?gid=1400563877					Diusulkan pengecualian (exclude tidak dihitung sebagai NKO)	
		04 - Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	WasProd	77	77	122	164	74.39	96.61	77	150	194	77.32	100.42	77	261	331	78.85	102.40	102.4	77%	85	102.40	92.76%							Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4FuyI/edit?gid=1400563877

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER					Capaian (%) TW 4	Target B12	Target 2029	Capaian B09 dibanding B12 (Akhir Tahun) (%)	Capaian B09 dibanding 2029 (%)	Kondisi Awal (Faktor Pendukung/ Kendala/ Hambatan)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Timelime	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						T	embilang	enyebut	R (%)	C (%)	T	embilang	enyebut	R (%)	C (%)	T	embilang	enyebut	R	C (%)									Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
																														Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelime	
		05 - Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	WasDist	78,5	78,5	613	917	66.85	85.16	78,5	352	536	65.67	83.66	78,5	6292	9618	65.42	83.34	83.34	78.5	80.5	83.34	81.27	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877				Tidak mencapai target		
		06 - Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	79	79	5590	6133	91.15	115.38	79	6064	6635	91.39	115.69	79	7075	7743	91.37	115.66	115.66	79	83	115.66%	110.09	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877					Tercapai target	
		07 - Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	75	75	5995	7507	79.86	106.48	75	6447	8079	79.80	106.40	75	7076	8855	79.91	106.55	106.55	75	83	106.55%	96.28	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877					Tercapai target	
		08 - Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,9 (per TW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.69	197.76	197.76	4.9	9.1	197.76	106.48	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877					Tercapai target	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER					Capaian (%) TW 4	Target B12	Target 2029	Capaian B09 dibanding B12 (Akhir Tahun) (%)	Capaian B09 dibanding 2029 (%)	Kondisi Awal (Faktor Pendukung/ Kendala/ Hambatan)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Tindakan	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						T	embilang	enyebut	R (%)	C (%)	T	embilang	enyebut	R (%)	C (%)	T	embilang	enyebut	R	C (%)									Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
																														Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelimit	
		09 - Persentase sentra uji klinik dan BE yang memenuhi ketentuan	Deputi 1	Direktorat Registrasi	80% (B09 dan B12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	13	16	81.25	101.56	101.56	80	84	101.56	96.73		Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuy1/edit?gid=1400563877				Tercapai target		
2	05 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	Deputi 1	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	90.6 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.6	90.08		90.08	99.43%	99.43	90.6	91	99.43%	98.99%		Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuy1/edit?gid=1400563877				Tidak mencapai target		
3	06 - Meningkatkan efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pengawasan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	Deputi 1	DITREG DAN WASPROD	75	75	-	-	wasprod: 107, 14 ditreg: 40 rata-rata: 78,57	98.09	75	wasprod: 93,75 ditreg: 40 rata-rata: 71.86	75	66.88	95.84	75	Ditreg: 40 Wasprod: 109.13	-	74.57	99.42	99.42	75	87	99.42	85.71		Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuy1/edit?gid=1400563877				Tidak mencapai target	
		02 - Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	Deputi 1	WASPROD	52 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	9	16	56.25	108.17	108.17	52	60	108.17	93.75		Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAfVZo940N9MM4Fuy1/edit?gid=1400563877				Tercapai target	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER					Capaian (%) TW 4	Target B12	Target 2029	Capaian B09 dibanding B12 (Akhir Tahun) (%)	Capaian B09 dibanding 2029 (%)	Kondisi Awal (Faktor Pendukung/ Kendala/ Hambatan)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Timelime	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						T	embilang	enyebut	R (%)	C (%)	T	embilang	enyebut	R (%)	C (%)	T	embilang	enyebut	R	C (%)									Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
																														Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelime	
4	09- Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	Deputi 1	ALL UNIT	4.68 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Std : 4,85 Ditreng : 4,79 KME I : 4,88 Wasdis : 4,90 Wasprod : 4,78 Deputi : 4,84	103.42	103.42	4.68	4.88	103.42	99.18	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAVZo940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877				Tercapai target		
5	10 -Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi 1	Deputi 1	ALL UNIT	92.9 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Std : 92,34 Ditreng : 88,07 KME I : 90,84 Wasdis : 90,30 Wasprod : 92,9	97.85	97.85%	92.9	93.63	97.85	97.08	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAVZo940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877				Tidak mencapai target		

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	PIC	PIC Anggaran	Target di PK	OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER					Capaian (%) TW 4	Target B12	Target 2029	Capaian B09 dibanding B12 (Akhir Tahun) (%)	Capaian B09 dibanding 2029 (%)	Kondisi Awal (Faktor Pendukung/ Kendala/ Hambatan)	Rekomendasi Tindak Lanjut	Tindakan	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						T	embilang	enyebut	R (%)	C (%)	T	embilang	enyebut	R (%)	C (%)	T	embilang	enyebut	R	C (%)									Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
																														Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelining	
																	6 Dep uti : 90,9 0															
		02 - Nilai AKIP Deputy 1	Deputi 1	ALL UNIT	81.47 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			78.23	96.02	96.02	81.47	83.03	96.02%	94.22%	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAVZ0940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877						Tidak mencapai target	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy 1	Deputi 1	ALL UNIT	5 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	100	100	5	5	0.00	0.00	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAVZ0940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877							Tercapai target
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputy 1	Deputi 1	ALL UNIT	2.97 (akhir tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.97	-	-	2.938	98.92	98.92	2.97	3.1	98.92	94.77	Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pIAVZ0940N9MM4Fuyl/edit?gid=1400563877							Tidak mencapai target

(T: Target; R: Realisasi; C: Capaian)

Lampiran 3 - Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan

Rincian hasil pengukuran kinerja program/kinerja dapat dilihat secara lengkap melalui tautan berikut:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7nYbdzkhQMw3pJAfVZo940N9MM4FuyJ/edit?gid=1400563877>

a. Triwulan 1

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Triwulan I					
		Volume			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
*)	DR. 3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				1,831,890,000	460,708,641	25.15
	3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	1	0	0.00	135,984,000	26,804,528	19.71
	3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat NPPZA	1	0	0.00	663,107,000	119,003,533	17.95
	3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Produksi Obat NPP	1	0	0.00	480,440,000	199,195,900	41.46
	3165. BKB Pemantauan produk Registrasi Obat	1	0	0.00	150,000,000	34,633,360	23.09
	3165. BKB Pemantauan produk Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	1	0	0.00	402,359,000	81,071,320	20.15

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Triwulan I					
		Volume			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	DR. 4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor				2,057,166,000	159,425,204	7.75
	4122 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	10	0	0.00	0	0	0.00
	4122 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	167	14	8.38	1,348,358,000	129,795,212	9.63
	4122 QAH Pelayanan Publik Lainnya	490	275	56.12	708,808,000	29,629,992	4.18
2	DR. 4123 Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat NPPZA				2,240,058,000	170,776,079	7.62
	4123 BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 4123.BIB.001 Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	1	1	100.00	86,800,000	0	0.00
	4123 BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.BIA.001 Keputusan hasil pengawasan mutu ONPP yang diselesaikan (laporan)	35	40	114.29	360,430,000	21,000,000	5.83

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Triwulan I					
		Volume			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	4123 BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.BIA.002 Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan ONPP yang diselesaikan (laporan)	340	254	74.71	195,829,000	37,478,248	19.14
	4123 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4123.BAH.001 Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat serta Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor NPP yang Diselesaikan Tepat Waktu (Dokumen)	5652	6142	108.67	243,178,000	40,981,150	16.85
	4123 QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.QIA.001 Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan (Label)	1600	1610	100.63	340,928,000	0	0.00
	4123 QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.QIA.002 Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (Laporan)	3	4	133.33	1,012,893,000	71,316,681	7.04
3	DR. 4125 Pengawasan Produksi Obat NPP				2,064,781,000	431,014,787	20.87

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Triwulan I					
		Volume			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	4125 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 BAH 001 Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan	17	2	11.76	314,196,000	33,984,815	10.82
	4125 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 BAH 002 Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO	5	0	0.00	0	0	0.00
	4125 QAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 QAH 001 Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	84	23	27.38	1,118,284,000	241,876,397	21.63
	4125 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 4125 QIC 001 Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	150	23	15.33	632,301,000	155,153,575	24.54
4	DR. 4127 Registrasi Obat				2,915,945,000	452,592,574	15.52
	4127 ACA Perizinan Produk Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar	3	0	0.00	0	0	#DIV/0!

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Triwulan I					
		Volume			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	4127 BAH Pelayanan Publik Lainnya	3	0	0.00	100,000,000	0	0.00
	4127.PCA Perizinan Produk Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	7500	4598	61.31	2,815,945,000	452,592,574	16.07
5	DR.4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif				2,862,654,000	85,545,950	2.99
	4131 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	50	17	34	232,800,000	12,411,837	5.33
	4131 AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	0	0	1,209,854,000	73,134,113	6.04
	4131 CAB Sarana Bidang Kesehatan	3	0	0	9,000,000	0	0.00
	4131.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55	0	0	1,411,000,000	0	0.00
Total Anggaran Kedeputian 1					13,972,494,000	1,760,063,235	12.60

b. Triwulan II

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Triwulan II					
		Volume			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
*)	DR. 3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				1,831,890,000	952,300,562	51.98
	3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	1	diukur akhir tahun		135,984,000	51,783,943	38.08
	3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat NPPZA	1			663,107,000	312,909,677	47.19
	3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Produksi Obat NPP	1			480,440,000	285,812,509	59.49
	3165. BKB Pemantauan produk Registrasi Obat	1			150,000,000	56,947,389	37.96
	3165. BKB Pemantauan produk Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	1			402,359,000	244,847,044	60.85
1	DR. 4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor				2,057,166,000	674,257,662	32.78
	4122 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	10	0	0.00	0	0	0
	4122 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	167	69	41.32	1,348,358,000	435,921,896	32.33
	4122 QAH Pelayanan Publik Lainnya	490	484	98.78	708,808,000	238,335,766	33.62

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Triwulan II					
		Volume			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2	DR. 4123 Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat NPPZA				2,240,058,000	757,798,945	33.83
	4123 BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 4123.BIB.001 Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	4	4	100.00	86,800,000	0	0.00
	4123 BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.BIA.001 Keputusan hasil pengawasan mutu ONPP yang diselesaikan (laporan)	70	70	100.00	360,430,000	126,441,392	35.08
	4123 BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.BIA.002 Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan ONPP yang diselesaikan (laporan)	680	617	90.74	195,829,000	101,519,525	51.84
	4123 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4123.BAH.001 Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat serta Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor NPP yang Diselesaikan Tepat Waktu (Dokumen)	11316	12353	109.16	243,178,000	105,108,765	43.22
	4123 QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.QIA.001 Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan (Label)	3000	3128	104.27	340,928,000	139,670,112	40.97

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Triwulan II					
		Volume			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	4123 QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.QIA.002 Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (Laporan)	6	6	100.00	1,012,893,000	285,059,151	28.14
3	DR. 4125 Pengawasan Produksi Obat NPP				2,064,781,000	990,593,434	47.98
	4125 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 BAH 001 Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan	17	6	35.29	314,196,000	59,071,534	18.80
	4125 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 BAH 002 Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO	5	0	0.00	0	0	0.00
	4125 QAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 QAH 001 Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	84	42	50.00	1,118,284,000	644,590,458	57.64
	4125 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 4125 QIC 001 Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	150	63	42.00	632,301,000	286,931,442	45.38
4	DR. 4127 Registrasi Obat				2,915,945,000	1,413,834,065	48.49

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Triwulan II					
		Volume			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	4127 ACA Perizinan Produk Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar	3	0	0.00	0	0	0.00
	4127 BAH Pelayanan Publik Lainnya	3	0	0.00	100,000,000	0	0.00
	4127.PCA Perizinan Produk Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	7500	9476	126.35	2,815,945,000	1,413,834,065	50.21
5	DR.4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif				2,862,654,000	812,578,488	28,39
	4131 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	50	25	50	232,800,000	67,762,808	29,11
	4131 AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	0		1,209,854,000	291,735,682	24,11
	4131 CAB Sarana Bidang Kesehatan	3	0		9,000,000	0	0.00
	4131.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55	27	49	1,411,000,000	453,080,000	32,11
Total Anggaran Kedeputan 1					13,972,494,000	5,601,363,156	40.08

c. Triwulan III

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
DR. 3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								2,094,724,000	1,202,173,470	1,295,963,351	1,466,388,798	57.39	61.87	70.00
3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	1	0	0	0	0	0	0	135,984,000	56,788,943	60,468,943	78,960,805	41.76	44.47	106.48
3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat NPPZA	1	0	0	0	0	0	0	663,107,000	371,944,550.00	399,891,655.00	473,522,839	56.09	60.31	71.41
3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Produksi Obat NPP	1	0	0	0	0	0	0	484,153,000	406859309	415510131	430,391,437	84.04	85.82	59,49
3165. BKB Pemantauan produk Registrasi Obat	1	0	0	0	0	0	0	159,460,000	72,734,036.00	113,234,443.00	137,425,856.00	45.61	71.01%	86.18%
3165. BKB Pemantauan produk Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,	1	0	0	0	0	0	0	652,020,000	293,846,632	306,858,179	346,087,861	45.07	47.06%	53.08%

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
Prekursor, dan Zat Adiktif														
DR. 4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor								2,114,366,000	902,028,587	1,150,112,826	1,260,857,207	42.66	54.40%	59.63%
4122 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
4122 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	167	91,51	92,09	92,55	95,32	95,92	96,40	1,405,558,000	604,802,293	788,776,345	870,167,761	43.03	56.12	61.91
4122 QAH Pelayanan Publik Lainnya	960	564	646	727	58.75	67.29	75.73	708,808,000	297,226,294	361,336,481	390,689,446	41.93	50.98	55.12
DR. 4123 Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat NPPZA								2,240,058,000	999,886,281	1,168,474,410	1,476,158,887	44.64	52.16	65.90
4123 BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 4123.BIB.001 Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	7	5	6	7	71.43	85.71	100.00	86,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
4123 BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.BIA.001 Keputusan hasil pengawasan mutu ONPP yang diselesaikan (laporan)	105	75	82	92	71.43	78.10	87.62	360,430,000.00	126,441,392.00	210,932,995.00	226,242,663.00	35.08	58.52	62.77
4123 BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.BIA.002 Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan ONPP yang diselesaikan (laporan)	1020	719	821	1080	70.49	80.49	105.88	195,829,000.00	105,519,525.00	115,122,525.00	129,491,724.00	53.88	58.79	66.12
4123 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4123.BAH.001 Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat serta Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor NPP yang Diselesaikan Tepat Waktu (Dokumen)	17547	14870	16973	19250	84.74	96.73	109.71	243,178,000.00	145,999,365.00	171,534,605.00	192,061,835.00	60.04	70.54	78.98
4123 QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.QIA.001 Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan (Label)	4600	4463	4463	5390	97.02	97.02	117.17	340,928,000.00	180,365,092.00	199,283,378.00	215,550,618.00	52.90	58.45	63.22

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
4123 QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.QIA.002 Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (Laporan)	9	9	9	9	100.0 0	100.0 0	100.00	1,012,893,000.0 0	441,560,907.00	471,600,907.00	712,812,047.00	43.59	46.56	70.37
DR. 4125 Pengawasan Produksi Obat NPP								2,061,790,000	1,120,673,863	1,325,380,470	1,564,588,119	46.87	56.83	67.78
4125 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 BAH 001 Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan	17	7	8	9	41.18	47.06	52.94	233,810,000	60,918,734	73,731,344	87,622,444	26.05	31.53	37.48
4125 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 BAH 002 Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO	5	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
4125 QAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 QAH 001 Keputusan Penilaian Faslitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	84	49	69	76	58.33	82.14	90.48	1,195,679,000	711,712,302	791,837,152	908,712,452	59.52	66.22	76.00
4125 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 4125 QIC 001 Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	150	78	103	111	52.00	68.67	74.00	632,301,000	348,042,827	459,811,974	568,253,223	55.04	72.72	89.87
DR. 4127 Registrasi Obat								2,915,945,000	1,608,209,855	1,748,319,783	2,007,050,670	55.15	59.96	68.83
4127 ACA Perizinan Produk Pengawalan obat pengembangan baru yang sesuai standar	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
4127 BAH Pelayanan Publik Lainnya	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	100,000,000	0	0	0	0	0	0

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B07	B08	B09	B07	B08	B09		B07	B08	B09	B07	B08	B09
4127.PCA Perizinan Produk Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	13000	11655	13353	15197	89.65	102.7 2	116.90	2,815,945,000	1,608,209,855	1,748,319,783	2,007,050,670	57.11	62.09	71.27
DR.4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif								3,046,225,000	1,377,002,030	1,770,372,031	1,990,728,173	45.20	58.12	65.35
4131 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	50	28	32	36	56	64	72	194,800,000	81,056,656	85,918,656	96,015,160	41.61	44.11	49.29
4131 AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	1	1	1	13	13	13	1,440,885,000	363,238,012	493,590,012	668,699,650	25.21	34.26	46.41
4131 CAB Sarana Bidang Kesehatan	3	0	2	3	0	67	100	9,000,000	4,971,360	4,971,360	8,971,360	55.24	55.24	99.68
4131.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55	38	51	53	69	93	96	1,401,540,000	927,736,002	1,185,892,003	1,217,042,003	66.19	84.61	86.84
4131. BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total								14,473,108,000	7,209,974,086	8,458,622,871	9,765,771,854	49.82	58.44	67.48

e. Triwulan IV

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
DR. 3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								2,234,880,000	1,600,299,654	1,739,727,778	2,226,518,347	77.17	84.41	99.77
3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	1	-	-	1	-	-	100	135,984,000	107,076,925	130,952,425	135,978,125	78.74	96.30	100.00
3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat NPPZA	1	-	-	1	-	-	100	744,705,000	497,894,059	537,757,163	736,416,087	66.86	72.21	98.89
3165. BKB Pemantauan produk Pengawasan Produksi Obat NPP	1	-	-	1	-	-	100	484,153,000	445,773,164	462,454,752	484,150,273	92.07	95.52	100.00
3165. BKB Pemantauan produk Registrasi Obat	1	-	-	1	-	-	100	159,460,000	145,681,466	148,794,165	159,420,953	91.36	93.31	99.98
3165. BKB Pemantauan produk Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan	1	-	-	1	-	-	100	710,578,000	403,874,040	459,769,273	710,552,909	56.84	64.70	100.00

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
Zat Adiktif														
DR. 4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor								2,659,114,000	1,428,453,291	1,797,678,665	2,659,051,146	53.72	67.60	100.00
4122 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	10	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
4122 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	167	166	175	177	99.40	104.79	105.99	1,893,034,000	972,234,184	1,256,498,348	1,892,988,210	51.36	66.37	100.00
4122 QAH Pelayanan Publik Lainnya	960	799	856	971	83.23	89.17	101.15	766,080,000	456,219,107	541,180,317	766,062,936	59.55	70.64	100.00
DR. 4123 Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat NPPZA								3,534,260,000	1,622,195,711	2,335,415,153	3,533,802,841	45.90	66.08	99.99
4123 BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 4123.BIB.001 Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	10	8	9	10	80.00	90.00	100.00	290,470,000	-	59,014,700	290,470,000	0.00	20.32	100.00

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
4123 BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.BIA.001 Keputusan hasil pengawasan mutu ONPP yang diselesaikan (laporan)	140	99	105	145	70.71	75.00	103.57	765,644,000	260,038,487	370,995,317	765,504,012	33.96	48.46	99.98
4123 BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.BIA.002 Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan ONPP yang diselesaikan (laporan)	1360	1171	1251	1434	86.10	91.99	105.44	437,377,000	132,574,734	358,743,449	437,369,481	30.31	82.02	100.00
4123 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4123.BAH.001 Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat serta Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor NPP yang Diselesaikan Tepat Waktu (Dokumen)	24000	21513	23541	25562	89.64	98.09	106.51	427,676,000	216,374,585	317,775,615	427,433,017	50.59	74.30	99.94
4123 QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.QIA.001 Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan (Label)	6000	5995	6447	7076	99.92	107.45	117.93	600,200,000	228,019,218	356,085,734	600,137,373	37.99	59.33	99.99

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
4123 QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 4123.QIA.002 Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (Laporan)	12	9	10	12	75.00	83.33	100	1,012,893,000	785,188,687	872,800,338	1,012,888,958	77.52%	86.17%	100.00%
DR. 4125 Pengawasan Produksi Obat NPP								3,163,853,000	1,763,763,660	2,167,289,712	3,163,595,518	41.26	55.39	99.99
4125 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 BAH 001 Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan	17	12	14	18	70.59	82.35	105.88	477,507,000	165,666,133	297,591,279	477,473,460	34.69	62.32	99.99
4125 BAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 BAH 002 Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO	5	0	0	0	0.00	0.00	2.45	53,500,000	-	4,482,000	53,499,128	0.00	8.38	100.00
4125 QAH Pelayanan Publik Lainnya 4125 QAH 001 Keputusan Penilaian Faslitas produksi BBO, obat, dan produk biologi,	84	83	90	92	9.88	107.14	109.52	1,841,873,000	994,191,304	1,177,638,907	1,841,657,766	53.98	63.94	99.99

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu														
4125 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 4125 QIC 001 Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	150	121	153	165	80.67	102.00	110	790,973,000	603,906,223	687,577,526	790,965,164	76.35%	86.93%	100.00%
DR. 4127 Registrasi Obat								3,884,763,000	2,193,307,018	2,382,329,264	3,884,426,498	56.46	61.32	99.99
4127 ACA Perizinan Produk Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4127 BAH Pelayanan Publik Lainnya	1	0	0	1	0	0	1	100,000,000	0.00	31,051,100	99,963,200	0.00	31.05	99.96
4127.PCA Perizinan Produk Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	13000	17064	18412	20481	131.26	141.63	157.55	3,784,763,000	2,193,307,018	2,351,278,164	3,784,463,298	57.95	62.12	99.99
DR.4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif								4,155,655,000	2,303,578,983	2,759,125,141	4,155,240,568	51.37	62.45	99.99

Program/ Kegiatan/ Output	TARGET	KINERJA (KUMULATIF)						ANGGARAN (KUMULATIF)						
		Realisasi			Capaian (%)			PAGU	Realisasi			Capaian (%)		
		B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
4131 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	50	40	42	50	80.00	84.00	100.00	196,826,000	103,540,660	180,445,540	196,729,057	52.61	91.68	99.95
4131 AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	1	2	8	12.50	25.00	100.00	2,522,003,000	834,024,956	1,172,096,235	2,521,778,145	33.07	46.47	99.99
4131 CAB Sarana Bidang Kesehatan	3	3	3	3	100.00	100.0	100.00	12,108,000	8,971,360	8,971,360	12,071,360	74.09	74.09	99.70
4131.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55	54	55	55	98.18	100.00	100.00	1,397,668,000	1,357,042,007	1,397,612,006	1,397,612,006	97.09	100.00	100.00
4131. BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	100	0	0	100	0.00	0.00	100.00	27,050,000	0	0	27,050,000	0.00	0.00	100.00
Total								19,632,525,000	10,911,598,317	13,181,565,713	19,622,634,918	55.58	67.14	99.95

Lampiran 4 - Pengukuran Efisiensi Anggaran Kegiatan

No.	Indikator	Output	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE (%)
		Capaian %	T	R	C%			
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	115,83	9.826.386.000	9.825.717.118	99,99	1,16	0,16	100
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	103,36	290.470.000	290.470.000	100,00	1,03	0,03	100
3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	103,8	725.009.000	724.903.856	99,99	1,04	0,04	100
4	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,24	8.790.660.000	8.781.543.944	99,90	0,99	-0,01	75
TOTAL		105,56	3.391.935.000	3.391.561.161	99,97	1,06	0,0559	100

Lampiran 5 - Capaian Kinerja Unit Eselon 2 Tahun 2025

a. Direktorat Standardisasi Obat NPPZA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1,	Tersusunnya Standar Obat, NPPZA yang efektif	Persentase Standar Obat, NPPZA yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100	100	100	100	Tidak ada permasalahan	1. Realisasi progres penyusunan standar di bidang obat dimonitor setiap bulannya agar dapat mencapai target bulanan yang telah ditetapkan dalam RAPK, 2. Standar Obat sebagai inisiator dalam penyusunan standar di bidang obat harus dapat <i>me-lead</i> dalam proses pembahasan standar
2,	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4,6	4,85	105,43	101	Tidak ada permasalahan	Penguatan komitmen perbaikan layanan dilakukan secara berkelanjutan melalui penerapan budaya pelayanan prima, peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten sebagai instrumen pengendalian mutu layanan,
3,	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit, Standardisasi Obat, NPPZA	92,38	92,34	99,96	97,82		1. Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dan melakukan pemantauan secara berkelanjutan 2. Melaksanakan <i>continuous improvement</i> dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, 3. Meningkatkan capaian kinerja demi mencapai kriteria kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit, Standardisasi Obat, NPPZA sesuai standar	100	100	100	100	Tidak ada permasalahan	Untuk dipertahankan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen SAKIP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	100	100	100	Tidak ada permasalahan	Untuk dapat dilaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun, agar seluruh anggaran yang telah direncanakan untuk kegiatan tersebut terserap optimal,
		Indeks Manajemen Risiko Dit, Standardisasi Obat, NPPZA	3,43	3,469	101,14	86,73	Tidak ada permasalahan	1. Identifikasi risiko selama ini dilakukan bottom up, untuk tahun 2026 akan ditambahkan identifikasi risiko instruksi dari pimpinan, 2. Akan dilakukan review terhadap kriteria penentuan level risiko baik level kemungkinan maupun dampak

b. Direktorat Registrasi Obat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai ketentuan	75%	97,65%	130,20%	123,60% Terlampui	Perlu melakukan reviu target indikator	Dilakukan reviu dan perubahan target pada 2026
		Persentase obat yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	75%	98,06%	130,75%	124,12% Terlampui	Perlu melakukan reviu target indikator	Dilakukan reviu dan perubahan target pada 2026
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat	Indeks Pelayanan publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	4,7	4,79	101,91%	97,75% Akan Tercapai	Tidak ada permasalahan	Terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pendukung layanan dan reviu standar layanan agar nilai meningkat
3	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase pengawalan hilirisasi obat pengembangan baru melalui registrasi yang dikawal sesuai standar	50%	40%	80,00%	57,14% Akan Tercapai	Perlu melakukan reviu pada definisi operasional dan cara perhitungan pada manual IKU	Dilakukan revisi definisi operasional, cara perhitungan pada manual IKU
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan sentra uji klinik dan bioekivalensi	Persentase inspeksi sentra uji klinik dan bioekivalensi yang ditindaklanjuti memenuhi timeline	80%	81,25%	101,56%	96,73 % Akan Tercapai	Tidak ada permasalahan	Penguatan melalui forum komunikasi dan asistensi regulatori kepada sentra uji klinik dan uji bioekivalensi
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di lingkup Direktorat Registrasi Obat	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Registrasi Obat	91,5	88,07	96,25%	95,83% Akan Tercapat	Tidak ada permasalahan	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pada rencana kerja setiap pokja 2. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap perencanaan 3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan implementasinya 4. Mengupayakan pencapaian kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
								indikator sesuai target yang ditetapkan
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat sesuai standar	100%	100%	100,00%	100 Tercapai	Tidak ada permasalahan	Untuk dipertahankan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen SAKIP
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	100%	100%	100,00%	100 Tercapai	Tidak ada permasalahan	Untuk dapat dilaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun, agar seluruh anggaran yang telah direncanakan untuk kegiatan tersebut terserap optimal,
		Indeks manajemen risiko Direktorat Registrasi Obat	3	2,938	97,93%	91,81% Akan Tercapai	Tidak ada permasalahan	1. mempertimbangkan isu eksternal dan internal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melakukan identifikasi risiko 2. Mengidentifikasi risiko pada program/kegiatan/inisiatif baru 3. melakukan penilaian efektivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level ≥ 16

c. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar	96%	94,67%	98,61%	97,6%	Tidak ada permasalahan	Untuk meningkatkan capaian indikator, diperlukan penguatan pengendalian dan pemantauan penyelesaian keputusan hasil pengawasan , peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan sumber daya, serta optimalisasi koordinasi dan sistem informasi pengawasan agar seluruh keputusan dapat diselesaikan sesuai standar secara konsisten,
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	84%	89,71%	106,79%	104,3%	Tidak ada permasalahan	Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan berbasis risiko , optimalisasi pemantauan tindak lanjut keputusan hasil pengawasan, serta peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha guna memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu dan berkelanjutan
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	88%	96,80%	110%	107,5%	Tidak ada permasalahan	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, diperlukan penguatan standarisasi dan pengendalian mutu

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
								keputusan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM UPT, serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi internal guna memastikan seluruh keputusan ditetapkan sesuai ketentuan secara konsisten dan berkelanjutan,
		Persentase kesesuaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR	80%	104,75%	130,94%	116,3%	Penetapan isu pengendalian AMR sebagai IKU turunan di level UPT mendorong pelaksanaan intervensi secara sangat intensif dan masif yang melampaui proyeksi awal saat penetapan target. Akselerasi dalam waktu relatif singkat tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan rencana aksi pengendalian AMR oleh UPT. Sebagai contoh, pada komponen advokasi, terjadi peningkatan signifikan jumlah Surat Edaran Pemerintah Daerah terkait pengendalian AMR, dari 13 hingga pada Tahun 2024 menjadi tambahan 94 pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan respons yang sangat positif serta efektivitas intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi.	Tindak lanjut penyesuaian target IKU "Persentase Kesesuaian UPT dalam melaksanakan Rencana Aksi Pengendalian AMR" untuk periode Perianjian Kinerja tahun 2026, guna memperkuat kesinambungan cascading kinerja serta meningkatkan kualitas pengukuran kinerja pengendalian AMR di lingkungan Badan POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
							Namun demikian, percepatan capaian tersebut menyebabkan realisasi IKU meningkat sangat tinggi dalam satu periode, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan pola peningkatan kinerja yang gradual dan stabil. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan dinamika capaian Tahun 2025, diperlukan penyesuaian target pada Tahun 2026 agar lebih merefleksikan tingkat kematangan implementasi dan keberlanjutan kinerja pengendalian AMR oleh UPT.	
		Jumlah Kajian Isu Distribusi Obat dan Bahan Obat antar Lembaga dan/atau Stakeholder yang diselesaikan	10 Laporan	N/A	N/A	N/A	Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No, 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No, 56 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 seluruh Kementerian/Lembaga diminta untuk mereview anggaran masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran, Salah satunya	Untuk memastikan pencapaian <i>Jumlah Kajian Isu Distribusi Obat dan Bahan Obat antar Lembaga dan/atau Stakeholder</i> di tahun 2025, diperlukan penyusunan rencana alternatif dan prioritas kajian yang tetap sesuai dengan Inpres No, 1 Tahun 2025 dan PMK No, 56 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, Selain itu, perlu optimalisasi koordinasi antarunit dan pemangku kepentingan serta pemanfaatan data dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
							adalah Rincian Output Kajian Isu Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang dilakukan pemblokiran sehingga berdampak pada Indikator Kinerja Program (IKP) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tidak tercapai,	kajian terdahulu untuk meminimalkan dampak pemblokiran anggaran, sehingga Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pengawasan tetap dapat tercapai meskipun terdapat keterbatasan anggaran,
	Meningkatnya efektivitas Pelayanan Publik di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	96,5%	96,8%	100,31%	98,2%	Tidak ada permasalahan	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, diperlukan penguatan pengendalian waktu proses penilaian , peningkatan kualitas perencanaan dan distribusi beban kerja, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi penilaian guna memastikan seluruh keputusan dapat diselesaikan tepat waktu secara konsisten dan berkelanjutan,
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,7	4,9	104,25%	100	Tidak ada permasalahan	Untuk mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, diperlukan penguatan standar pelayanan , peningkatan kompetensi petugas layanan, serta optimalisasi mekanisme evaluasi dan umpan balik pengguna layanan guna memastikan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
								mutu pelayanan tetap konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Ditwas Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	Nilai Pembangunan ZI di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	93,37%	90,30%	96,71%	95,9%	Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP tidak dapat diusulkan WBBM karena ada 2 poin penilaian yang masih kurang	Untuk meningkatkan <i>Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)</i> Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP serta mendukung pencapaian proyeksi target akhir periode Renstra sebesar 95,9% , diperlukan penguatan dan percepatan pemenuhan seluruh komponen penilaian ZI , khususnya pada dua poin penilaian yang masih belum terpenuhi , Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan rencana aksi yang lebih terfokus, penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, serta peningkatan kualitas implementasi program reformasi birokrasi secara berkelanjutan, sehingga pada periode selanjutnya Direktorat dapat memenuhi persyaratan untuk diusulkan menuju WBBM ,
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	100%	100%	100%	100%	Tidak ada permasalahan	Untuk mempertahankan capaian kinerja, diperlukan penguatan pengendalian mutu dan review berkala dokumen SAKIP , peningkatan pemahaman

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
								SDM terhadap kebijakan SAKIP terkini, serta peningkatan integrasi data kinerja guna mendukung akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	100%	100%	100%	100%	Tidak ada permasalahan	Untuk mempertahankan capaian kinerja, diperlukan pemantauan dan pengendalian anggaran secara berkelanjutan , peningkatan kapasitas perencanaan anggaran, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran agar efisiensi tetap optimal di periode mendatang,
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	3,6	3,688	102,44%	99,6%	Tidak ada permasalahan	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian, diperlukan penguatan mekanisme pemantauan risiko secara rutin , peningkatan kapasitas SDM terkait manajemen risiko, serta peningkatan integrasi manajemen risiko dengan perencanaan dan pengendalian kinerja agar risiko dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan,

d. Direktorat Pengawasan Produksi dan Pelayanan Obat NPP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi Obat berbasis risiko	IKK 1, Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	78%	78,85%	100%	85%	Tidak ada kendala	Melaksanakan tindak lanjut terhadap sarana yang belum memenuhi ketentuan CPOB untuk menjaga tren capaian yang baik
		IKK 2, Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	85%	85,71%	99,99%	100 %		Menyesuaikan kegiatan dan target pada periode berikutnya
		IKK 3, Persentase Penilaian Hasil Pengawasan Kemandirian UPT Baru	75%	N/A	99,97%	100 %	1. Pada Triwulan IV, blokir anggaran telah dibuka namun hanya sekitar 2%, sehingga belum memadai untuk mendukung pelaksanaan penilaian kemandirian UPT baru,	Melaksanakan forum Inspeksi CPOB Tahun 2026 dan melanjutkan kegiatan pengawasan oleh UPT sesuai dengan perencanaan
		IKK 4, Persentase Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	82%	90,16%	99,99%	86%	Tidak ada kendala	Melaksanakan Forum Inspeksi CPOB Tahun 2026 dan melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan perencanaan
2	Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat	IKK 5, Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	84%	91,67%	99,99%	94%	Tidak ada kendala	Melanjutkan kegiatan pendampingan seperti asistensi regulatori onsite, desk prasertifikasi, dan melakukan inspeksi sertifikasi CPOB serta melakukan identifikasi dan monitoring terhadap tindak lanjut pengawasan dan progres perbaikan sarana produksi

3	Meningkatnya kualitas evaluasi industri farmasi dalam rangka peningkatan level maturitas	IKK 6, Persentase industri farmasi yang dievaluasi sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan level maturitas	60%	64,00%	99,99%	60/80%?	1. Anggaran yang sempit ada blokir pada TW I-III menyebabkan tim maturitas IF belum dapat melaksanakan verifikasi on-site sesuai target tahunan 2. Ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan aktivitas operasional industri farmasi, sehingga beberapa rencana kunjungan atau intervensi tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, 3. Keterbatasan dan penyesuaian jadwal narasumber/tenaga ahli yang akan melakukan intervensi teknis, yang berdampak pada penundaan atau penjadwalan ulang kegiatan,	
4	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat	IKK 7, Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86%	86,79%	100%	90%	Tidak ada kendala	Menjalankan sistem pelayanan publik di Ditwasprod ONPP secara prima
		IKK 8, Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,7	4,78	100%	4,9	Tidak ada kendala	Melaksanakan pelayanan publik secara prima dan mengadakan inovasi dalam pelayanan publik di lingkungan Ditwasprod ONPP
5	Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	IKK 9, Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	93,45	92,96	100%	93,77%	Nilai pembangunan Zona Integritas belum mencapai target akibat belum meratanya implementasi	Tindak lanjut dilakukan melalui penguatan rencana aksi pembangunan ZI, peningkatan kualitas pemenuhan eviden, serta monitoring dan evaluasi

							budaya kerja berintegritas serta pemenuhan eviden sesuai standar penilaian,	secara berkala
		IKK 10, Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100	100	100%	100%	Tidak ada kendala	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Renlak 2026
		IKK 11, Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100%	100%	99,99%	100%	Tidak ada kendala	Melengkapi dokumen SAKIP sesuai target pada tahun 2026
		IKK 12, Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	3,52	3,594	99,97%	3,72	Tidak ada kendala	Mempertimbangkan isu eksternal, internal, dan capaian kinerja periode berikutnya

e. Direktorat KMEI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan mutu obat beredar dan produk tembakau, serta tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	Persentase hasil pengawasan mutu ONPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	83,25	94,77	113,84	112,49%	1. Terdapat penurunan jumlah laporan hasil pengawasan mutu obat dan NPP secara signifikan yang diterima dari UPT BPOM dimana hal tersebut berdampak pada peningkatan persentase capaian, sehingga kategori capaian masuk termasuk pada "Tidak Dapat Disimpulkan", 2. Kompleksitas kasus mutu obat tertentu yang memerlukan analisis lanjutan dan waktu penyelesaian lebih panjang, 3. Terdapat gap pemenuhan beban kerja tindak lanjut obat TMS dengan banyaknya penugasan lain dalam rangka menunjang system pengawasan obat beredar,	Realisasi IKU TW 4 TA 2025 telah mencapai target,
2		Persentase hasil pengawasan keamanan, mutu, dan informasi Obat dan NAPPZA oleh UPT BPOM yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	85,00	92,94	109,34	104,43%	Iklan dan Penandaan Obat : 1. Kendala pada aplikasi Pre Market - Post Market Integration sehingga perlu waktu dalam memverifikasi	Iklan dan Penandaan Obat : 1. Pemanfaatan fitur entri baru pada pengawasan iklan oleh Pusat yang mulai bisa digunakan per 1 Januari 2026 sehingga dapat menambah jumlah output dokumen yang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
							penandaan yang dilaporkan, 2. Laporan hasil pengawasan label obat memerlukan pembahasan komprehensif bersama dengan unit kerja terkait maupun UPT pelapor untuk menghasilkan keputusan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan, Mutu : Masih terdapat implementasi sampling dan pengujian obat oleh petugas UPT BPOM yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Sampling yang berlaku karena adanya dinamika rotasi petugas pengawas UPT BPOM belum mempertimbangkan kompetensi	ditindaklanjuti dari sistem SIPT, 2. Melaksanakan kegiatan penunjang realisasi diantaranya sebagai berikut: a. Monitoring dan supervisi secara luring ke beberapa UPT BPOM sesuai kajian risiko, b. Intensifikasi pengawasan iklan dan penandaan obat melalui jemput bola sebagai bentuk percepatan tindak lanjut laporan hasil pengawasan iklan dan label ONPP sehingga keputusan sanksi administrasi dapat lebih cepat diterbitkan, c. Menjaga komunikasi dan koordinasi secara intensif bersama Direktorat Registrasi Obat dan Pusdatin terkait kendala aplikasi Pre Market - Post Market Integration, Mutu : Diseminasi untuk petugas UPT yang baru ditugaskan pada bagian sampling obat,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
3		Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	89,40	96,70	108,16	105,70%	1. Kendala pada aplikasi Pre Market - Post Market Integration sehingga perlu waktu dalam memverifikasi penandaan yang dilaporkan, 2. Laporan hasil pengawasan label obat memerlukan pembahasan komprehensif bersama dengan unit kerja terkait maupun UPT pelapor untuk menghasilkan keputusan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan,	1. Pengembangan fitur entri pusat pada pengawasan iklan estimasi akan go live di Januari 2026 sehingga dapat menambah jumlah output dokumen yang ditindaklanjuti dari sistem SIPT, 2. Melaksanakan kegiatan penunjang realisasi diantaranya sebagai berikut: a. Monitoring dan supervisi secara luring ke beberapa UPT BPOM sesuai kajian risiko, b. Intensifikasi pengawasan iklan dan penandaan obat melalui jemput bola sebagai bentuk percepatan tindak lanjut laporan hasil pengawasan iklan dan label ONPP sehingga keputusan sanksi administrasi dapat lebih cepat diterbitkan, c. Menjaga komunikasi dan koordinasi secara intensif bersama Direktorat Registrasi Obat dan Pusdatin terkait kendala aplikasi Pre Market - Post Market Integration,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
4		Persentase pelaku usaha produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang melaporkan informasi produk sesuai ketentuan	57,00	58,68	102,95	90,28%	Tidak ada hambatan	Meskipun capaian IKU tahun 2025 sudah melebihi target yang ditetapkan, pada Juli 2026 adanya implementasi penuh peraturan terbaru terkait pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik (PP 28/2024) berpotensi menyebabkan capaian IKU tahun 2026 menurun,
5		Persentase laporan pengawasan produk tembakau yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	85,00	88,10	103,65	94,73%	Tidak ada hambatan	Sebagai upaya mempertahankan konsistensi pencapaian target IKU di tahun 2026, akan dilakukan: 1. Sosialisasi peraturan terbaru kepada industri/importir produk tembakau dan rokok elektronik secara lebih masif mengenai ketentuan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi lainnya pada label kemasan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan, 2. Bimbingan teknis pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik kepada petugas UPT BPOM mengenai peraturan terbaru, 3. Penyusunan draft revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Tembakau,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
								4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik yang dilakukan oleh UPT BPOM agar mengirimkan laporan secara lengkap dan tepat waktu, 5. Komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif dengan Pusdatin terkait pengembangan aplikasi SIPT untuk pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik, 6. Sosialisasi aplikasi pelaporan contoh kemasan dan hasil pengujian kandungan nikotin dan/atau tar produk tembakau dan/atau rokok elektronik (BPOM-WATCH) terbaru,
6		Jumlah tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	12	100,00	100,00	500,00%	Kendala yang dihadapi : 1. Tingkat kesulitan permasalahan isu keamanan dapat berbeda dan kajian risiko implikasi terhadap akses obat dan pelayanan kesehatan harus menjadi salah satu poin kajian yang	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada periode berikutnya, yaitu komitmen dan mengoptimalkan konsistensi dalam melakukan pengkajian laporan farmakovigilans sehingga jumlah tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar dapat tepat waktu dikomunikasikan,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
							harus dilakukan dan berpengaruh dalam strategi komunikasi yang diperlukan, 2. Tidak seluruh kajian keamanan berujung pada tindak lanjut regulatori, Hal ini disebabkan karena sebagian isu keamanan yang dikaji belum memenuhi kriteria untuk dilakukan tindak lanjut regulatori, baik dari sisi kekuatan bukti ilmiah, konsistensi data, tingkat keparahan risiko, maupun relevansi terhadap populasi di Indonesia,	
7	Meningkatnya ketersediaan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat melalui penyusunan dan publikasi materi sesuai ketentuan	Persentase materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan sesuai rencana aksi	100,00	100,00	100,00	100,00%	Penyusunan materi KIE yang telah dilaksanakan di kedeputan bidang pengawasan obat dan NAPPZA, bertujuan untuk untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar turut serta mendukung dan berkomitmen dalam pemberantasan penyalahgunaan obat di Indonesia, Agar pesan dapat tersampaikan dan tepat sasaran kepada Masyarakat secara menyeluruh, maka materi ini juga disusun dengan	1. Penyusunan dan diseminasi materi KIE akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai kanal utama komunikasi kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala di tahun 2026, 2. Diperlukan peningkatan kompetensi tim pengelola media sosial dan diseminasi KIE untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, serta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
							bahasa yang mudah dipahami dan disampaikan melalui beberapa media baik media cetak maupun elektronik, Dengan begitu, masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari risiko produk yang tidak terjamin keamanannya,	mentransformasikan materi KIE agar lebih persuasif, informatif dan edukatif sesuai dengan karakteristik masyarakat yang menjadi target KIE,
8	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor Obat dan NPP	Persentase Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat; Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) yang Diselesaikan Tepat Waktu	94,00	96,23	102,37	100,24%	Tidak ada hambatan	Sebagai upaya mempetahankan jumlah rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu, dilakukan upaya sebagai berikut: 1, Mengadakan rapat dengan internal BPOM dan pemangku kepentingan terkait (LNSW/Bea Cukai) guna membahas kasus ekspor-impor yang memengaruhi penerbitan SKI, AHP, atau CPP, 2, Mengidentifikasi dokumen yang menjadi kendala dalam pemenuhan persyaratan perizinan, yang berdampak pada keterlambatan karena permintaan data tambahan, Forum komunikasi, resosialisasi, dan desk service dengan pelaku usaha rutin dilakukan Ditwas KMEIONAPPZA untuk

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
								mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan solusi atas kendala tersebut, 3, Penguatan kapasitas internal dengan sharing knowledge untuk menyamakan persepsi terkait evaluasi persyaratan layanan, 4, Komunikasi dan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk mengatasi kendala sistem, antara lain kelambatan sistem, sistem yang tidak dapat diakses, maupun kegagalan penerbitan billing,
9		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	78,00	89,59	114,86	109,26%	1. Adanya peningkatan jumlah pengajuan persetujuan iklan obat sehubungan dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi iklan obat oleh industri farmasi pemilik izin edar dan tindak lanjut hasil pengawasan iklan obat, 2. Masih banyaknya pengajuan persetujuan iklan yang harus	1. Penyelenggaraan sosialisasi, asistensi regulatori maupun bimbingan teknis dan desk konsultasi guna meningkatkan pemahaman ketentuan dan persyaratan layanan publik persetujuan iklan obat, 2. Refreshment dan penyamaan persepsi antar-evaluator iklan obat sehingga dapat mempercepat proses

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
							diterbitkan tambahan data secara berulang sehingga menambah waktu evaluasi,	evaluasi permohonan persetujuan iklan obat,
10		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	4,70	4,88	103,83	99,59%	Tidak ada hambatan	Realisasi IKU TW 4 TA 2025 telah mencapai target
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	93,80	90,84	96,84	96,64%	Adanya Komponen Penilaian Hasil masih belum MS atau belum lebih baik dari periode sebelumnya, hal ini dikarenakan : a,) Pada tahun 2024, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat serta NPPZA telah menunjukkan tren peningkatan kinerja, dimana 11 dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai >100%, dengan rincian 10 IKU kategori "Sangat Baik" dan 1 IKU kategori "Baik", Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang hanya 10 IKU dengan capaian >100%, b,) Peningkatan ini semakin terlihat karena target tahun 2024 disusun lebih tinggi dari realisasi tahun 2023, namun capaian yang diraih pada tahun 2024 tetap menunjukkan nilai yang lebih baik	1, Capaian kinerja lebih baik dilakukan pengukuran untuk memastikan bahwa unit kerja berkomitmen pada ketercapaian kinerja terhadap kinerja yang telah tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, 2, Dalam rangka mencapai nilai A pada Komponen Hasil atas Capaian Kinerja, maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut : a, Terdapat >50% dari total Indikator Kinerja Utama (IKU) di Ditwas KMEI ONPPZA dengan kondisi perolehan Persentase Capaian Kinerja terhadap target adalah >100%; b, Jumlah IKU dengan Capaian Kinerja sesuai kondisi pada penjelasan poin satu (1), pada tahun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
								pelaporan lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan C, Dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan IKU sejenis pada unit kerja lain,
12		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	100,00	100,00	100,00	100,00%	Tidak ada hambatan	Realisasi IKU TW 4 TA 2025 telah mencapai target
13		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	100,00	100,00	100,00	100,00%	Meningkatkan koordinasi pada proses mekanisme pencairan anggaran di Ditwas KMEI ONPPZA	Optimalisasi pengelolaan penggunaan anggaran,
14		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	3,83	3,69	96,29	87,19%	Jika dibandingkan dengan penilaian tahun 2024, penilaian manajemen risiko Ditwas KMEI ONPPZA TA 2025 mengalami peningkatan, dari 3,625 menjadi 3,688 (atau meningkat sebesar 0,063), Namun jika dibandingkan dengan target 2025, masih belum tercapai	Akan dilakukan revaluasi kembali terkait penetapan target di tahun 2026

Lampiran 6 - Capaian RO Unit Eselon 2

a. Direktorat Standardisasi Obat NPPZA

No.	Rincian output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	DR, 3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	710,578,000	710,552,909	100,00%	1	1	100%	
1	3165, BKB Pemantauan produk Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	710,578,000	710,552,909	100,00%	1	1	100%	Telah terselesaikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025
	DR,4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4,155,655,000	4,155,240,568	99,99%				
2	4131 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	196,826,000	196,729,057	99,95%	50 Rekomendasi kebijakan	50	100,00%	Telah terselesaikan seluruh rekomendasi kebijakan yang direncanakan disusun pada tahun 2025
3	4131 AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2,522,003,000	2,521,778,145	99,99%	8 NSPK	8	100,00%	Telah terselesaikan seluruh NSPK yang direncanakan disusun pada tahun 2025
4	4131 CAB Sarana Bidang Kesehatan	12,108,0000	12,071,360	99,70%	3 Paket/unit	3	100,00%	Telah terselesaikan pengadaan sarana prasarana untuk lingkungan Kedeputan 1 pada tahun 2025
5	4131,CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,397,668,000	1,397,612,006	100,00%	55 Unit	55	100,00%	Telah terselesaikan pengadaan alat pengolahan data untuk lingkungan Kedeputan 1 pada tahun 2025
6	4131, BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	27,050,000	27,050,000	100,00%	100 Orang	100	100,00%	Telah terselesaikan kegiatan sosialisasi yang direncanakan sesuai dengan jumlah peserta yang ditargetkan

b. Direktorat Registrasi Obat

No.	Rincian output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	4127, Registrasi Obat							
1	4127,ACA, Perizinan Produk Pengawasan Obat Pengembangan Baru yang sesuai standar	0	0	0				
2	4127,BAH, Pelayanan Publik Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima	100,000,000	99,963,200	99,96%	1 layanan	1	100%	Anggaran dari pagu efektif
3	4127,PCA, Perizinan Produk Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan sesuai ketentuan	3,784,763,000	3,784,463,298	99,99%	13,000 keputusan	20,481	157,55%	Anggaran dari pagu efektif dan realisasi output melampaui target, Akan dilakuakn penyesuaian target output pada 2026

c. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP

No.	Rincian output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	4122 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	0	0	0	10	0	0	Anggaran diblokir hingga akhir Tahun Anggaran 2025
2	4122 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1,893,034,000	1,892,988,210	100%	167	177	105,99%	
3	4122 QAH Pelayanan Publik Lainnya	766,080,000	766,062,936	100%	960	971	1001,15%	

d. Direktorat Pengawasan Produksi dan Pelayanan Obat NPP

No.	Rincian output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan	477,507	477,403	99,99%	17	18	105,88%	
2	Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO	53,500	53,499	100%	5	0	2,25%	
3	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	1,841,873	1,841,657	99,99%	84	92	109,52%	
4	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	790,973	790,965	100%	150	165	110%	

e. Direktorat KMEI

No.	Rincian output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	4123,BIB,001 Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	290,470,000	290,470,000	100,0000	10	10	100,00	Hambatan yang dialami : 1) Karakteristik pada beberapa kasus hasil pengawasan mutu obat yang kompleks memerlukan tahapan analisis mendalam, sehingga berimplikasi pada perpanjangan waktu penyelesaian tindak lanjut. 2) Terdapat gap pemenuhan beban kerja tindak lanjut obat TMS dengan banyaknya penugasan lain dalam rangka menunjang system pengawasan obat beredar. Faktor Penunjang Keberhasilan : 1) Proses penyelesaian keputusan hasil pengawasan berjalan lebih optimal seiring dengan peningkatan kualitas data hasil pengawasan dari UPT, penerapan standar verifikasi yang lebih konsisten, serta koordinasi yang intensif melalui mekanisme desk terpadu.
2	4123,BIA,001 Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan (laporan)	765,644,000	765,504,012	99,9817	140	145	103,57	Hambatan yang dialami : 1) Belum tersedia secara lengkap acuan data lampiran penandaan yang disetujui pada aplikasi sharing folder PPI (Pre-Post Market Integration) sehingga dalam melakukan evaluasi pusat masih memerlukan konfirmasi dari Unit Pusat maupun pelaku usaha terkait. 2) Laporan hasil pengawasan label obat memerlukan pembahasan komprehensif bersama dengan unit kerja terkait maupun UPT pelapor untuk menghasilkan keputusan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan. Faktor Penunjang Keberhasilan :

No.	Rincian output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
								1) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan supervisi secara luring ke beberapa UPT BPOM sesuai kajian risiko. 2) Pelaksanaan kegiatan intensifikasi pengawasan iklan dan penandaan obat melalui jemput bola sebagai bentuk percepatan tindak lanjut laporan hasil pengawasan iklan dan label ONPP sehingga keputusan sanksi administrasi dapat lebih cepat diterbitkan. 3) Komitmen yang kuat dari SDM yang terlibat dalam proses evaluasi laporan iklan dan penandaan obat
3	4123,BIA,002 Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan (laporan)	437,377,000	437,369,481	99,9983	1,360	1,434	105,44	Tidak ada hambatan yang dihadapi. Capaian output hingga TW IV adalah 25.562 dokumen yang diterbitkan tepat waktu, dibandingkan dengan target hingga TW IV yaitu 24.000 dokumen, sehingga presentase capaian output adalah 106,51 %. Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian berikut adalah sebagai berikut: 1) Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat dan NPP telah melaksanakan kegiatan Sinergi Lintas Kementerian Lembaga Sebagai Upaya Peningkatan Pengawasan Ekspor Impor Obat dan NPP pada tanggal 20 November 2025 di mana fokus kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi terkait data realisasi impor pada sistem INSW serta mengidentifikasi importasi untuk tujuan obat dan makanan dan nonobat dan makanan. 2) Komitmen petugas (evaluator hingga perekomendasi) dalam menyelesaikan dokumen sesuai dengan target waktu yang ditetapkan 3) Penyediaan berbagai kanal konsultasi (Telepon, live chat, tatap muka) yang responsif dalam menjawab konsultasi.

No.	Rincian output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
4	4123,BAH,001 Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat serta Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu (Dokumen)	427,676,000	427,433,017	99,9432	24,000	25,562	106,51	Tidak ada hambatan yang dihadapi. Faktor Penunjang Keberhasilan : Pengawasan label produk tembakau masuk dalam Perjanjian Kinerja Kepala UPT BPOM pada bulan Agustus 2025 dan Rencana Strategis BPOM 2025-2029 pada bulan Oktober 2025 sebagai Indikator Kinerja UPT BPOM yaitu "Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar". Hal ini memberikan dasar kuat untuk meningkatkan kinerja UPT BPOM dalam hal pengawasan produk tembakau.
5	4123,QIA,001 Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan (Label)	600,200,000	600,137,373	99,9896	6,000	7,076	117,93	Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah tingkat kesulitan permasalahan isu keamanan dapat berbeda dan kajian risiko implikasi terhadap akses obat dan pelayanan kesehatan harus menjadi salah satu poin kajian yang harus dilakukan dan berpengaruh dalam strategi komunikasi yang diperlukan. Faktor Penunjang Keberhasilan : 1) Komitmen yang kuat dari SDM. 2) Pelaksanaan pengawasan penerapan farmakovigilans di industri farmasi memberikan dampak peningkatan kepatuhan pelaporan farmakovigilans oleh industri farmasi. 3) Kesadaran tenaga kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO. 4) Dukungan tim ahli dalam proses pengkajian sebelum ditetapkan tindak lanjut regulatori.

No.	Rincian output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
6	4123,QIA,002 Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (Laporan)	1,012,893,000	1,012,888,958	99,9996	12	12	100,00	Penyusunan materi KIE yang telah dilaksanakan di kedeputan bidang pengawasan obat dan NAPPZA, bertujuan untuk untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar turut serta mendukung dan berkomitmen dalam pemberantasan penyalahgunaan obat di Indonesia. Masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya memilih obat dan makanan yang aman. Selain itu, masyarakat juga diedukasi mengenai bahaya obat ilegal dan palsu, serta cara membuang obat kedaluwarsa dan rusak dengan benar guna mencegah penyalahgunaan. Agar pesan dapat tersampaikan dan tepat sasaran kepada Masyarakat secara menyeluruh, maka materi ini juga disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan disampaikan melalui beberapa media baik media cetak maupun elektronik. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari risiko produk yang tidak terjamin keamanannya.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif**



**Jl. Percetakan Negara No. 23,
Jakarta Pusat, 10560
@deputi1.bpom**